

ISSN 0126-222X

ANALISIS CSIS

Perubahan Global & Regional: Dimensi Politik, Ekonomi dan Keamanan

- Pandangan ASEAN Mengenai Perubahan-perubahan Global dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia-Pasifik
- Kecenderungan dan Globalisasi Ekonomi
- Landasan Teoritis dan Konseptual Kerjasama Antar Regional: Kasus Forum Kerjasama Asia Pasifik
- Kebijaksanaan Luar Negeri Jepang: Tantangan dan Inisiatif dalam Masalah Internasional
- Transformasi Peranan Strategis RRC: Menuju Skenario "Dominant Power"?
- Implikasi Eropa 1992 Terhadap Persaingan Bisnis Global
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjanan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap *a priori* -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge-mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng-analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta meng-uraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Rufinus LAHUR

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO,
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAHI, Jusuf WANANDI,
Clara JOEWONO, Djisman S. SIMANDJUNTAK, Onny S PRIJONO,
Bantarto BANDORO

Redaksi Pelaksana

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO, Medelina K. HENDYTIO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X



ANALISIS CSIS

TAHUN XX, NO. 3, MEI-JUNI 1991

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	208
• Pandangan ASEAN Mengenai Perubahan-perubahan Global dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia-Pasifik <i>Jusuf WANANDI</i>	210
• Kecenderungan dan Globalisasi Ekonomi <i>Sabana KARTASASMITA</i>	222
• Landasan Teoritis dan Konseptual Kerjasama Antar Regional: Kasus Forum Kerjasama Asia Pasifik <i>Bantarto BANDORO</i>	231
• Kebijaksanaan Luar Negeri Jepang: Tantangan dan Inisiatif dalam Masalah Internasional <i>Edy PRASETYONO</i>	242
• Transformasi Peranan Strategis RRC: Menuju Skenario "Dominant Power"? <i>Rizal SUKMA</i>	252
• Implikasi Eropa 1992 Terhadap Persaingan Bisnis Global <i>Ronald NANGOI</i>	269
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>SUDIBYO, Yoyok ARIESSUSANTO & F. ANDREA</i>	278

Pengantar Redaksi

BETAPA penting bagi ASEAN untuk bersatu erat dan menjadi kuat agar dapat menghadapi berbagai perubahan di berbagai belahan bumi baik bidang keamanan dan strategi maupun ekonomi internasional. Menurut *Jusuf Wanandi* ASEAN dapat secara efektif ikut ambil bagian dalam usaha-usaha regional tersebut sekiranya memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggalang kerjasama di kalangan mereka sendiri di semua bidang. Pengembangan kemampuan institusional ASEAN merupakan salah satu tugas yang paling mendesak sekarang ini.

Dalam hal globalisasi ekonomi, *Sabana Kartasasmita* menekankan terbukanya persaingan antar produk, dan karenanya mendorong berlangsungnya perlombaan di sektor teknologi. Ini memungkinkan berbagai peluang dan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebagai akibatnya ada negara yang maju industrialisasinya, di samping ada negara terbelakang yang semakin tertinggal. Bagi negara terbelakang dikemukakan, pembangunan industrialisasi Jepang merupakan suatu model untuk transformasi teknologi: dari industri ringan bergeser ke industri berat, ditunjang program liberalisasi perdagangan dan investasi asing, meningkat ke industrialisasi padat pengetahuan.

Perhatian terhadap kawasan Pasifik akhir-akhir ini memperlihatkan dua garis pemikiran yang sejalan. Pemikiran pertama mempersoalkan atau memperhatikan masalah pergaulan sosial, ekonomi dan politik di antara negara-negara di kawasan. Pemikiran kedua mempersoalkan bagaimana kerjasama ekonomi di antara mereka dapat mempertahankan dinamika pertumbuhan ekonomi regional melalui pembentukan suatu institusi regional. *Bantarto Bandoro* mencoba menganalisis secara lebih dalam landasan teoritis dan konseptual dari pemikiran yang disebut terakhir. Analisis mengenai pemikiran yang kedua menunjukkan bahwa landasan konseptual gagasan kerjasama ekonomi Pasifik tidak seragam. Selanjutnya, gagasan kerjasama ekonomi Pasifik secara teoritik dilandasi oleh motivasi para pencepatusnya untuk mengelola interdependensi ekonomi.

Masalah peran internasional dan kebijakan luar negeri Jepang menjadi sorotan publik dalam negeri Jepang dan masyarakat internasional. Tekanan internasional dan perdebatan dalam politik domestik tentang peran internasional Jepang mempertanyakan kembali diplomasi ekonomi Jepang dalam masalah politik dan keamanan internasional. Krisis Teluk menunjukkan bahwa kekuatan dan diplomasi ekonomi saja tidak cukup. Krisis Teluk

menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan ekonomi Jepang dan kelemahannya untuk mengembangkan inisiatif dalam masalah internasional. Tampaknya tidak ada pilihan yang terbaik bagi Jepang kecuali memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. *Edy Prasetyono* membahas kebijaksanaan luar negeri Jepang dalam masalah stabilitas dan keamanan internasional.

Menghadapi perubahan-perubahan yang sedang berlangsung baik dalam politik global maupun politik regional Asia-Pasifik, RRC dihadapkan kepada beberapa kendala dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu kekuatan dominan. Kesulitan-kesulitan ekonomi di dalam negeri dan kecurigaan negara-negara di kawasan terhadap maksud-maksud RRC, merupakan kendala utama bagi Beijing untuk mencapai status dominan demikian. Satu-satunya peluang yang dimiliki Cina untuk tujuan demikian adalah memperluas proyeksi kekuatan militernya. Untuk itu, RRC tampaknya sedang melakukan semacam transformasi peranan strategis, yang akan mengubah statusnya dari sebuah kekuatan regional yang berorientasi global menjadi kekuatan global dengan orientasi global. Kecenderungan transformasi strategis dalam politik luar negeri RRC itu, menjadi fokus tulisan *Rizal Sukma*.

Eropa 1992 menciptakan integrasi ekonomi regional di kawasan Eropa, dan diperkirakan akan mendorong regionalisasi ekonomi di kawasan-kawasan dunia lainnya, terutama Asia-Pasifik. Integrasi ekonomi Masyarakat Eropa ini telah menimbulkan berbagai spekulasi mengenai implikasinya terhadap kecenderungan bisnis internasional yang mengarah pada globalisasi bisnis. Hal ini mengingat bahwa integrasi ekonomi ME berkaitan erat dengan kepentingan bisnis Eropa Barat secara keseluruhan, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis internasional dan global. Bahkan terciptanya Pasar Tunggal Eropa akan mendorong globalisasi bisnis, kendatipun menimbulkan pertanyaan apakah bisnis internasional sedang mengarah pada regionalisasi bisnis ataukah globalisasi bisnis itu sendiri. *Ronald Nangoi* berusaha membahas perkembangan Eropa 1992 dan implikasinya terhadap globalisasi bisnis.

Sejak tahun 1980 negara-negara ASEAN dan ME secara teratur mengadakan pertemuan dalam rangka mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pembaruan kerjasama ASEAN-ME, ASEAN akan mengutamakan peningkatan kerjasama industri dan alih teknologi modern, sedangkan pola kerjasamanya perlu diubah ke arah pengembangan kerjasama yang lebih adil dan seimbang sehingga mencerminkan kepentingan dasar dari kedudukan kedua belah pihak. Demikian hal yang dikemukakan oleh Menlu Ali Alatas, dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ME yang berlangsung di Luxemburg tanggal 31 Mei 1991. Berbagai kerjasama ASEAN lainnya dapat diikuti dalam Ringkasan Peristiwa ASEAN bulan Mei sampai dengan Juni 1991 yang disusun oleh *F. Andrea, Yoyok Aries-susanto* dan *Sudibyo* sebagai editornya.

Pandangan ASEAN Mengenai Perubahan-perubahannya Global dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia-Pasifik*

Jusuf WANANDI

Pengantar

DALAM Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Juli 1990, Menteri Luar Negeri Pilipina, Raul Manglapus mengusulkan agar ASEAN hendaknya mulai mendiskusikan dan mengkaji masalah keamanan Asia Tenggara dilihat dari segi perubahan baik di lingkungan global maupun kawasan Asia-Pasifik. Pilipina memiliki kepentingan tertentu dalam diskusi seperti itu karena ia menghadapi masalah yang konkret dan mendesak sehubungan dengan persoalan pangkalan.

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN telah sepakat untuk mengadakan dialog dengan para anggotanya mengenai masalah keamanan, yang harus dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan ASEAN yang tercetus dalam KTT Pertama ASEAN yang diadakan

di Bali tahun 1976 dan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971. Dalam Konperensi Pasca Pertemuan ASEAN yang diadakan se-sudah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN pada bulan Juli 1990, baik Australia maupun Kanada juga menyarankan perlunya suatu dialog mengenai masalah keamanan di wilayah yang lebih luas lagi yakni di kawasan Asia-Pasifik.

Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, mengusulkan suatu dialog di antara negara-negara Asia-Pasifik, yang dapat dinamakan Konperensi mengenai Keamanan dan Kerjasama di Asia-Pasifik, yang mirip dengan CSCE (Konperensi mengenai Keamanan dan Kerjasama Eropa) di Eropa. Menteri Luar Negeri Kanada, Joe Clark juga menyarankan agar Konperensi Pasca Pertemuan Menteri ASEAN itu hendaknya diubah menjadi suatu forum untuk mendiskusikan masalah-masalah keamanan regional. Disarankannya pula agar negara-negara lain, seperti negara-negara Asia Selatan, negara-negara Indocina, Cina, dan bahkan juga Uni Soiet, diundang untuk ikut serta. Shevardnadze juga mengusulkan agar apa yang diutarakan dalam perundingan Hel-

*Dialihbahasakan oleh M. Bambang Walgito dari Jusuf Wanandi, "Global Changes and Its Impact on the Asia-Pacific Region: An ASEAN View," Asian Forum Conference, CSIS Building, Jakarta, 17-18 January, 1991.

sinki untuk kawasan Asia-Pasifik dilontarkan kembali pada pertemuan para menteri luar negeri tahun 1993.

Apapun bentuk dialog yang akan diambil, kiranya perlu bagi ASEAN untuk memulai mengambil beberapa langkah persiapan sebagai berikut. Pertama, menilai dan mendiskusikan perubahan-perubahan fundamental yang sedang terjadi di bidang ekonomi dan keamanan politik baik di tingkat global maupun regional, serta dampaknya bagi kawasan Asia-Pasifik. Kedua, merumuskan dan mengembangkan suatu perspsi bersama mengenai berbagai ancaman baru dan tantangan yang dihadapi kawasan Asia-Pasifik setelah era Perang Dingin. Ini memang bukan tugas yang mudah, namun perlu, mengingat kawasan ini jauh lebih kompleks dan beraneka-ragam dibanding Eropa. Ketiga, mendiskusikan berbagai pilihan yang dapat diambil ASEAN untuk menghadapi aneka perubahan tersebut dan untuk mengatasi berbagai ancaman dan tantangan baru di masa mendatang.

Dalam meneliti aneka pilihan tersebut, ASEAN haruslah selalu menyadari dua faktor yang akan mempengaruhi arah kebijakannya di masa mendatang. Yang pertama adalah konsep ASEAN mengenai keamanan, yang akan selalu terlihat dalam konteks menyeluruh mengenai ketahanan nasional dan regional. Dalam arti ini, konsep tersebut mencakup semua aspek kehidupan, dan ini agaknya serupa dengan konsep mengenai "keamanan komprehensif" yang diperkenalkan Perdana Menteri Ohira di Jepang. Ini berarti bahwa masalah ekonomi dan sosial merupakan suatu bagian integral dari masalah-masalah keamanan regional. Tantangan dan ancaman yang dihadapi negara-negara ASEAN menjadi makin kompleks. Semuanya itu bermuara baik dari dalam maupun dari luar kawasan, serta tidak terbatas hanya pada aspek militer ataupun politik militer semata. Jadi, pendekatan

ASEAN terhadap masalah keamanan menjadi lebih valid. Faktor kedua mengacu pada konsensus di ASEAN bahwa diskusi-diskusi yang diadakan mengenai masalah keamanan ASEAN harus dibimbing oleh Kesepakatan ASEAN tahun 1976 dan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 tentang ZOPFAN.

Dampak Perubahan Global Terhadap Kawasan Asia-Pasifik

Lingkungan Politik Strategis

Lingkungan politik strategis sekarang ini ditandai dengan berakhirnya era Perang Dingin pasca Perang Dunia II. Konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun merupakan konflik yang unik karena menyangkut suatu konflik antar-ideologi. Berakhirnya Marxisme-Leninisme yang disebabkan oleh kegagalannya dalam meningkatkan ke sejahteraan rakyat, yang mendorong pula penghentian konflik Timur-Barat, juga secara luas telah menghapuskan kemungkinan timbulnya perang nuklir. Dampak dari perubahan ini terhadap masalah internasional memang dramatis sekali, seperti terlihat di Eropa.

Kini orang berharap bahwa secara global dunia akan menjadi lebih stabil dan damai. Akan tetapi berbagai sumber konflik masih tetap menonjol. Ancaman-ancaman baru terhadap perdamaian dan stabilitas agaknya masih didasarkan atas real politik dan tidak lagi bersumber pada konflik ideologi seperti yang terjadi di masa lalu. Permusuhan tradisional yang berdasarkan nasionalisme, pertentangan etnis dan agama (yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini), akan terus berkecamuk. Akan muncul pula konflik-konflik global yang diakibatkan oleh ancaman "baru" seperti perdagangan senjata-

senjata canggih, narkotika dan terorisme serta kerusakan lingkungan.

Penghapusan tirai besi di Eropa telah menciptakan suatu situasi yang benar-benar baru dengan timbulnya suatu kemungkinan munculnya satu Eropa yang membentang dari Samudera Atlantik sampai ke pegunungan Ural. Perkembangan ini jelas membuka peluang baru termasuk masalah dan tugas baru.

Tugas pertama adalah mengembangkan suatu sistem keamanan baru bagi Eropa. Pakta Warsawa praktisnya sudah tidak ada lagi, sementara NATO sedang diubah menjadi suatu forum kerjasama politik. Eropa sekarang ini sedang mencari pengaturan-pengaturan baru yang dapat diterima baik oleh Eropa Timur maupun Uni Soviet, CSCE (Konperensi mengenai Keamanan dan Kerjasama Eropa) dapat memberikan landasan bagi pengaturan baru, namun lembaga-lembaga itu sendiri dianggap terlalu lemah. Selain itu CSCE terdiri dari begitu banyak negara. Ada juga usulan untuk memodifikasi lembaga tersebut sehingga memungkinkan terbentuknya suatu kelompok inti dan perluasan fungsinya sehingga tidak hanya menangani masalah politik tetapi juga dapat menangani latihan militer gabungan, pembentukan pasukan penjaga perdamaian untuk Eropa, dan semacam itu. Agaknya untuk sekarang ini NATO yang telah ditransformasikan kiranya dapat menangani sebagian tugas-tugas tersebut. Akhirnya, keamanan Eropa akan menjadi tanggung jawab negara-negara Eropa sendiri. AS memang masih akan memainkan peran penting dalam masalah keamanan Eropa untuk masa transisi ini, namun pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya mulai menggambarkan suatu bentuk baru di masa mendatang bagi kehadiran AS di Eropa.

Masalah kedua, yang amat berkaitan dengan masalah pertama, adalah penyatuhan

Jerman. Unifikasi ini terjadi lebih cepat dari yang semula diharapkan, bahkan juga oleh orang-orang Jerman sendiri. Hal ini melahirkan kekuatan-kekuatan baru bagi negara-negara Eropa lainnya berdasarkan fakta sejarah masa lalu yang menyangkut Jerman, misalnya Perang Jerman-Perancis di akhir abad ke-19 dan dua perang dunia. Persoalan di sini adalah apakah Jerman benar telah berubah, dan sehubungan dengan itu persoalannya ialah apakah Jerman akan menjadi ancaman bagi Eropa. Kedua pertanyaan ini tidaklah dapat dijawab. Apa yang penting bagi Eropa sekarang ini adalah mempoliskem-skema yang akan mencakup Jerman dalam suatu struktur (atau kerangka-kerangka) kerjasama, termasuk kerjasama di bidang militer. Dalam konteks ini, sulit dibayangkan suatu skema di mana AS tidak diikutsertakan, paling tidak untuk masa sekarang ini.

Masalah ketiga muncul dari ketidakpastian yang terus berlanjut mengenai perkembangan Eropa Timur dan Uni Soviet di masa mendatang. Berbagai negara Eropa Timur memiliki sejarah pengalaman dan kondisi internal yang berbeda dan karenanya keberhasilan program reformasi mereka akan berbeda pula satu sama lain. Akan tetapi mereka menghadapi tantangan yang sama, yakni harus mengubah sistem dan kemasyarakatan mereka dari sistem komunis tertutup menjadi suatu sistem demokratis, multi-partai yang lebih terbuka, serta mengubah ekonomi terpusat mereka menjadi ekonomi pasar. Tambahan pula, banyak dari negara-negara tersebut dihadapkan pada kebangkitan kembali masalah minoritas etnis yang juga mempersulit jalinan hubungan antar beberapa negara Eropa Timur.

Masalah keempat mengacu pada masa depan Eropa Barat sebagai suatu kesatuan politik. Kecenderungan ini dipererat oleh adanya kemajuan yang berhasil diraih di bidang ekonomi melalui proyek 1992 yang

pada gilirannya telah dipengaruhi secara positif oleh berbagai perkembangan politik dan militer di Eropa. Namun perkembangan yang terjadi di Eropa Timur dan proses unifikasi Jerman dapat menghambat momentum terciptanya suatu Negara Serikat Eropa atau bahkan suatu Kesatuan Politik Masyarakat Eropa.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di Eropa ini dapat dipakai untuk menggambarkan secara bagus berbagai perubahan fundamental yang sedang terjadi di tingkat global yang telah mengurangi atau menghapus bahaya timbulnya perang nuklir ataupun perang total. Sekarang ini, konflik ideologi masih tetap menonjol misalnya antara nilai-nilai Barat (liberalisme dan kapitalisme) dan nilai-nilai Islam. Akan tetapi konflik tersebut tidaklah meluas dan total seperti konflik antara liberalisme-kapitalisme melawan komunisme.

Namun dunia masih belum bebas dari konflik dan perang. Terbukti jelas dengan penyerbuan Irak ke Kuwait baru-baru ini dan yang kemudian menghasilkan krisis Teluk. Hal ini menunjukkan bahwa tata internasional baru memang sedang dibentuk di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memainkan peran yang lebih sentral dan di mana peranan kepemimpinan Amerika Serikat selaku satu-satunya negara adidaya masih terus dicari. Krisis ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam menangani krisis internasional. Juga terlihat bahwa Masyarakat Eropa belumlah menjadi "Negara Serikat Eropa" yang dapat menyuarakan satu suara dan bahwa Jepang masih belum siap untuk memainkan peran politik yang lebih besar yang sesuai dengan kekuatan ekonominya.

Faktor-faktor geostrategis tetap merupakan penentu utama dalam hubungan internasional kendati faktor-faktor geo-ekonomi

telah memperoleh keunggulan. Peran negara-negara yang lebih kecil, termasuk negara Dunia Ketiga, tidaklah dapat dikecualikan baik oleh negara besar maupun adidaya karena dukungan mereka masih diperlukan untuk melegitimasi tindakan atau kebijakan yang dicanangkan negara besar dan adidaya tersebut dalam mempertahankan tata internasional. Kegiatan-kegiatan unilateral, bahkan yang dilakukan oleh negara-negara adidaya, tidak lagi dapat dilaksanakan karena adanya oposisi internasional yang kuat. Dapat dimengerti reaksi yang terjadi tahun 1980-an dalam kaitannya dengan konflik di Kamboja, Angola, Afghanistan dan Nikaragua. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan forum negara maju dan berkembang untuk mencapai konsensus mengenai masalah-masalah internasional yang penting, akan memainkan peran yang lebih besar dan menduduki tempat yang lebih penting di masa mendatang.

Lingkungan Ekonomi

Perekonomian dunia saat ini ditandai dengan adanya dua perkembangan utama, yakni interdependensi yang meningkat dan globalisasi kegiatan ekonomi. Ada juga kecenderungan ke arah ketergantungan yang lebih besar pada kekuatan pasar dalam pengelolaan ekonomi. Kecenderungan lain yang juga penting adalah makin kuatnya posisi perekonomian Eropa Barat dan Jepang serta lemahnya secara relatif posisi ekonomi Amerika Serikat. Posisi negara-negara berkembang telah digerogoti karena hilangnya peran tenaga kerja dan bahan mentah dalam produksi dunia dibandingkan dengan meningkatnya kepentingan modal, teknologi dan manajemen yang kebanyakan berada di tangan negara-negara industri.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di kedua kawasan dunia diharapkan mengandung implikasi penting

bagi perekonomian dunia. Kebutuhan akan modal di Eropa Timur diharapkan mampu menciptakan peningkatan persaingan di pasar internasional di saat cadangan modal internasional tampak sedang merosot. Konflik bersenjata yang terjadi di Timur Tengah sebagai akibat penyerbuan Irak atas Kuwait, dapat secara serius mempengaruhi suplai minyak, dan pada gilirannya dapat membawa dunia ke jurang resesi ekonomi.

Perkembangan-perkembangan yang disebut di atas akan mempunyai implikasi lebih lanjut pada hubungan ekonomi antara dunia industri dan dunia berkembang, yang sudah memburuk sejak dekade 1980-an, tidak hanya di bidang turunnya bantuan pembangunan tetapi juga di bidang-bidang ekonomi lainnya. Kepentingan negara-negara industri terhadap "dunia ketiga" agaknya menurun terus sebagai akibat dari berakhirnya perang dingin. Lebih lanjut, seperti telah dibahas di muka, negara-negara berkembang yang memiliki tenaga kerja dan bahan mentah melimpah kini kehilangan banyak keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Dilihat dari uraian di atas, penting kiranya diberikan beberapa pemikiran untuk merumuskan dan menciptakan suatu struktur baru yang mengatur hubungan antara negara-negara industri dan berkembang, dengan memperhitungkan berbagai masalah internasional yang muncul belakangan ini (masalah lingkungan, narkotika, terorisme, dan sebagainya) serta keinginan untuk memecahkan masalah "Utara-Selatan" dalam ruang lingkup regional dan bukan dalam ruang lingkup global. Dirasa pula adanya suatu kebutuhan untuk memberi informasi dan mendidik masyarakat di negara-industri agar menyadari bahwa bekerjasama dengan dunia berkembang bermanfaat sekali bagi kepentingan mereka sendiri, karena konflik-konflik baik lokal maupun regional dapat menjadi sumber ketidakstabilan yang luas

sekali jangkauannya. "Dunia Ketiga" yang merupakan tigaperempat penduduk dunia tidaklah dapat di kesampingkan begitu saja.

Di bidang geopolitik, krisis Teluk amat mempengaruhi perkembangan internasional, misalnya terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara berkembang yang semakin meningkat. Akan tetapi dampak krisis tersebut terhadap perekonomian internasional, ditambah lagi dengan efeknya pada harga minyak, tetap tidak mentu, dan belum ada satu ide pun yang muncul mengenai apa yang seharusnya dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangani perekonomian internasional. Sebagai salah satu negara yang memiliki ekonomi terkuat dan merupakan penyumbang terbesar, Jepang hendaknya ditempatkan secara khusus dalam mengembangkan berbagai prakarsa multilateral baru dalam konteks tersebut.

Implikasinya bagi Kawasan Asia-Pasifik

Belumlah dapat diketahui dengan jelas apa implikasi dari situasi global yang cepat berubah ini terhadap keamanan kawasan Asia-Pasifik. Akan tetapi satu hal yang sudah dapat dipastikan yakni bahwa semuanya itu telah membawa akibat yang penting bagi kawasan tersebut.

Berakhirnya perang dingin telah mengurangi konflik antar-negara adidaya dan mengurangi pula persaingan mereka di kawasan Asia-Pasifik. Walaupun perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik itu lebih lambat dibanding yang terjadi di Eropa, Uni Soviet telah menarik hampir seluruh kehadiran militernya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Cam Ranh (kecuali yang diperlukan untuk pengawasan). Sebaliknya kini Uni Soviet sedang memusatkan kekuatannya di kawasan

Timur Laut Asia dan Laut Okhotz, barangkali dengan tujuan untuk mempertahankan kemampuannya guna mengimbangi Armada Ketujuh Amerika Serikat dan agar masih memiliki kemampuan serang kedua yang efektif sekiranya diserang Amerika Serikat. Sekalipun demikian kemampuan operasionalnya di kawasan tersebut telah berkurang sekali.

Menurut penilaian Departemen Pertahanan Amerika Serikat, AS juga akan mengurangi kehadiran militernya di kawasan sebagai jawaban atas situasi strategis yang berubah dan sebagai akibat dari kendala anggaran belanjanya sendiri di masa mendatang. Rencana Departemen Pertahanan adalah untuk mengurangi secara bertahap pada lima tahun mendatang, mengingat kompleksitas kawasan ini dinilai lebih besar dibanding medan Eropa. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa proses ini dapat dipercepat oleh adanya desakan dari Kongres dan pendapat masyarakat AS atau karena adanya berbagai pertimbangan ekonomi dalam negeri. Proses tersebut bahkan dapat lebih dipercepat lagi sekiranya publik Amerika Serikat sendiri melontarkan reaksi emosional yang meningkat sehubungan dengan peningkatan ketegangan ekonominya dengan Jepang atau sekiranya pihak Pilipina tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi persetujuannya dengan Amerika mengenai pangkalan.

Seperti halnya dengan kasus Eropa, kehadiran AS di kawasan Asia-Pasifik masih dianggap vital demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Peran utamanya di kawasan tersebut adalah untuk membantu memastikan bahwa negara-negara besar lainnya akan mengendalikan diri untuk tidak menciptakan gejolak di kawasan tersebut. Ini berarti bahwa kehadiran Amerika Serikat tidak melulu bertujuan untuk mengimbangi Uni Soviet, melainkan pula untuk mengendalikan Cina, India ataupun Jepang

di masa mendatang.

Akan tetapi secara politis Jepang tidak siap untuk meningkatkan kemampuan militernya secara substansial atau individual. Sekiranya siap, Jepang akan mendapat tantangan besar dari negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, struktur pertahanan AS-Jepang tetap vital untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama karena ada kekhawatiran besar bahwa suatu hari Jepang akan memutuskan untuk bergerak sendiri di bidang pertahanan.

Uni Soviet masih merupakan suatu kekuatan militer besar yang memiliki senjata-senjata nuklir. Sebagai tambahan, pembangunan dan stabilitas internalnya masih belum menentu, dan selama ia tidak terlibat dalam kerjasama baik ekonomi maupun politik dengan negara-negara di kawasan, ia tetap akan merupakan sumber ketidakstabilan kawasan.

RRC agaknya masih sibuk dengan program pembangunan dan modernisasinya untuk jangka waktu duapuluhan tahun mendatang, dan karenanya akan menahan diri dari keterlibatan dalam kegiatan petualangan apa pun di kawasan. RRC akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan hubungan ekonomi terbuka dengan dunia. Perkembangan-perkembangan tersebut akan membantu mengubah RRC dari suatu kekuatan revolusioner menjadi suatu kekuatan konvensional. Jadi merupakan kepentingan dunia untuk tidak mengisolasi Cina. Sebaliknya Cina hendaknya diikutsertakan dalam struktur regional maupun internasional sehingga akan dilibatkan pula dalam aturan-aturan permainan internasional serta terjalin dalam kepentingan regional - dan bukan sekedar kepentingan nasionalnya yang sempit. Dalam ruang lingkup inilah hendaknya Cina diikutsertakan dalam skema kerjasama regional, seperti proses Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

India dilihat sebagai ancaman potensial mengingat kemampuan angkatan udaranya serta pembangunan angkatan lautnya yang pesat, pembangunan pangkalan militer di Andaman, yang berdekatan dengan Selat Malaka, dan khususnya mengingat kenyataan bahwa pembangunan militer tersebut tidak memiliki sasaran yang jelas. Akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa India menghadapi masalah internal yang serius dan mengalami banyak kesulitan dalam hubungannya dengan tetangga-tetangganya. Ini semua akan mengharuskan India untuk memusatkan perhatiannya pada subkontinen Asia dan Samudera Hindia. Semuanya itu merupakan suatu hambatan besar bagi kemampuannya untuk mengambil aksi politik-militer jauh dari wilayah pantainya sendiri.

Berbagai perkembangan yang tersebut di atas dan ketidakpastian mengenai kehadiran Amerika Serikat di masa mendatang di kawasan memberikan suatu alasan kuat bagi negara-negara di kawasan itu sendiri untuk memulai secara serius mempelajari implikasi dari berbagai skenario yang berbeda tersebut. Salah satu skenario meramalkan pengurangan kehadiran AS di Pasifik Barat akan jauh lebih cepat dari yang direncanakan oleh pemerintah AS sendiri. Hal ini dapat terjadi bila Kongres Amerika serta pendapat umum masyarakatnya melontarkan reaksi yang berlebihan terhadap keputusan yang diambil Pilipina untuk tidak melanjutkan lagi persetujuan dengan Amerika mengenai pangkalan militer. Kemungkinan seperti ini tidaklah kecil mengingat kenyataan bahwa mayoritas dalam senat Pilipina menentang dilanjutkannya perjanjian tersebut.

Perundingan-perundingan babak berikutnya mengenai pangkalan itu diharapkan selesai dan menjadi suatu Perjanjian baru pada September 1991, sebagai kelanjutan dari penyerahan pemberitahuan resmi Manila ke Washington pada bulan Mei 1990

mengenai berakhirnya sewa.

Sejauh menyangkut pilihan mengenai pangkalan, hendaknya Amerika mempertimbangkan masak-masak guna menyembangkan kepentingan strategisnya di masa mendatang di Pasifik Barat, stabilitas politiknya di kawasan dan juga kepentingan nasional Pilipina. Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu terpadu. Dapat timbul komplikasi sekiranya putusan Pilipina untuk mencabut persetujuan mengenai pangkalan itu didasarkan atas sentimen dan emosi nasionalis. Demikian pula Pilipina hendaknya menyadari bahwa bantuan dan investasi keuangan akan menyusut kelak sekiranya ia tidak lagi menjadi tuan rumah bagi pangkalan Amerika Serikat. Tambahan pula sekiranya tidak memperpanjang persetujuan tersebut masih ada biaya ekonomi lain yang harus dipikulnya termasuk kehilangan lapangan kerja dan biaya kompensasi.

Iklim perundingan telah berubah ke arah yang baik, dan jelaslah ada titik temu antara tujuan-tujuan baik dari pemerintah Amerika Serikat maupun Pilipina. Perundingan-perundingan tersebut kini sedang berada dalam kondisi dan situasi 'naik-turun'. Akan tetapi Senat Pilipina juga harus memikirkan tentang fase akhir, yakni apa yang diharapkan pada akhirnya adalah tingkat penurunan kehadiran Amerika di Pilipina pada kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, dan bahwa pada akhirnya fasilitas AS seperti halnya yang ada di Singapura dapat mengantikan pengaturan-pengaturan yang dibuat dalam suatu perjanjian baru.

Amerika Serikat pada awal mulanya berreaksi keras terhadap posisi pemerintah Pilipina, sebelum mengakui bahwa deklarasi untuk mengakhiri persetujuan merupakan suatu formalitas yang perlu sekiranya Manila harus melanjutkan perundingan. Kemudian Amerika pun sepakat untuk membayar kompensasi dalam bentuk peralatan dan ru-

mah sakit militer yang sebelumnya diadakan di Eropa. Pada saat kompromi-kompromi ini mampu menciptakan suatu situasi yang lebih bersahabat dan dapat menunjang dia-dakannya perundingan lebih lanjut, masih ada beberapa faktor lain yang harus diper-timbangkan dengan saksama.

Pertama, haruslah disadari sepenuhnya bahwa kebanyakan kelompok elit politik Pi-lipina masih mempersoalkan penggunaan lebih lanjut pangkalan tersebut oleh Amerika Serikat. Kedua, dilihat dari segi Amerika Serikat, sebelum membuat suatu perund-ning terlebih dahulu harus diteliti kembali berbagai masalah yang berkaitan dengan masa berlakunya persetujuan, luasnya wilayah pangkalan, wewenang dan kedaulatan atas pangkalan tersebut, usaha patungan mereka, dan pemakaian multiguna dan tingkat kompensasi yang diminta oleh Pemerintah Pilipina. Keputusan akhir tentang apakah Amerika Serikat akan tetap tinggal atau pergi tergantung dari pemecahan atas masalah-masalah tersebut.

Dari pihak Amerika Serikat sudah ada tanda tersendiri, yakni adanya keputusan untuk mengangkat Richard Armitage sebagai ketua khusus perunding dan bukannya menunjuk Duta Besar AS di Pilipina. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu determinasi yang jelas dari pihak Washington untuk meng-anggap bahwa masalah hubungan antara AS dan Pilipina hendaknya jangan hanya didominasi oleh masalah pangkalan militer se-mata. Tambahan pula, Armitage telah me-miliki reputasi baik di kalangan pemimpin Asia Tenggara, dan merupakan orang keper-cayaan Angkatan Laut Amerika dan Pen-tagon, mengingat keduanya memiliki minat jelas dalam penyelesaian perjanjian.

Akhirnya, haruslah menjadi kepentingan Amerika dan juga Pilipina untuk mempertahankan pangkalan militer tersebut demi kontribusi mereka terhadap stabilitas di ka-

wasan Asia-Pasifik dan demi pembangunan ekonomi Pilipina sendiri. Hal ini juga harus merupakan kepentingan semua negara di kawasan, termasuk ASEAN. Sementara Si-ngapura, Brunei dan Thailand telah melon-tarkan dukungan mereka secara lebih lang-sung dibandingkan Malaysia dan Indonesia, pada dasarnya semua negara anggota ASEAN sepakat agar Pilipina tetap menjadi tuan rumah untuk pangkalan tersebut.

Kepentingan strategis pangkalan-pangkalan itu adalah untuk mendukung kepen-tingan militer AS di Asia Timur Laut, khususnya di Jepang dalam menghadapi Uni Soviet di Laut Okhotsk. Pangkalan-pangkalan itu juga penting untuk mengamankan jalur laut Asia Tenggara, dan menyumbang pada usaha untuk mempertahankan kekuatan AS di Samudera Hindia dan di Teluk.

Makna politik dari keberadaan pangkalan itu barangkali amat penting bagi ne-gara-negara di Asia Tenggara, karena pangkalan tersebut merupakan simbol kehadiran Amerika di kawasan, yang dapat mencegah campur tangan negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini disetujui oleh negara-negara di kawasan, khususnya ASEAN, un-tuk memusatkan perhatian mereka pada pembangunan ekonomi.

Seperti telah dikemukakan di muka, sumber lain yang dapat menimbulkan gejolak emosi di pihak Kongres Amerika Serikat adalah friksi ekonomi dan perdagangan yang terus berlanjut dengan Jepang. Akan tetapi reaksi-reaksi Amerika akan dipengaruhi oleh kenyataan bahwa hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat amat vital artinya bagi Amerika dan Jepang tidak akan diperkenankan berjalan sendiri di bidang pertahanan.

Sampai sekarang ini masalah paling pen-ting dalam hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat terletak di bidang ekonomi,

yang semula tidak hanya berasal dari ketimpangan perdagangan antar dua negara yang besar sekali sehingga mencapai sekitar US\$50 trilyun setahun melainkan juga karena adanya peningkatan investasi Jepang di AS serta terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian dan masyarakat Jepang sendiri sebagaimana diutarakan dalam SII (*Structural Impediment Initiative/ Inisiatif Hambatan Struktural*) dengan Amerika Serikat. Dalam menangani masalah ekonomi bilateral dengan Jepang ini, ada suatu perbedaan di kalangan masyarakat Amerika sendiri, yakni antara kelompok "tradisional" yang terdiri dari kaum birokrat dan cendekiawan yang memahami Jepang, dan kelompok "revisionis" yang tetap beranggapan bahwa Jepang tidaklah dapat diperlakukan sebagai masyarakat Barat. Kelompok ini percaya bahwa SII tidak akan berhasil karena memperlakukan Jepang dalam pola pikir Barat. Oleh karenanya dianjurkan agar kebijakan yang akan diambil terhadap Jepang hendaknya dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai dan sistem Jepang sendiri.

Krisis Teluk telah memberi beban tambahan pada Jepang, khususnya beban untuk mengambil peran politik yang lebih besar sesuai dengan statusnya sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Hal ini penting untuk pendapat umum dan Kongres Amerika Serikat karena hal itu berkaitan dengan masalah tentang berbagi beban antara AS dan Jepang, terutama karena Teluk Parsi itu bagi Jepang jauh lebih penting sebagai sumber minyak dibanding bagi Amerika. Seharusnya menjadi kepentingan ASEAN dan juga negara-negara tetangga Jepang lainnya di Asia untuk mendorong Jepang selangkah demi selangkah untuk meningkatkan keikutsertaannya dalam kegiatan keamanan kolektif, seperti ikut serta dalam pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB. Jadi bukannya mengucilkan Jepang, sebab bahayanya adalah Jepang akan berjalan sendiri bila nanti menghadapi tekanan

yang lebih besar.

Pada kenyataannya, Jepang telah mulai memikirkan peran politiknya dalam menghadapi Krisis Teluk, namun seperti biasanya proses pengambilan keputusan itu berjalan terlalu membosankan, lamban dan cenderung menghasilkan "terlalu sedikit dan terlambat." Janji Jepang untuk memberi sumbangan awal sebesar US\$1 trilyun memperoleh kritikan tajam dari Kongres Amerika Serikat. Keputusannya untuk menggelarkan pasukan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB serta menyumbangkan US\$4 trilyun telah mengurangi tekanan pada Jepang namun tampak jelas bahwa di masa mendatang masih banyak lagi yang diharapkan dari Jepang. Juga dapat dimengerti bahwa Jepang tidak dapat membatasi perannya hanya dengan memberi sumbangan keuangan. Namun dalam merumuskan kebijakannya yang lebih komprehensif Jepang perlu juga memikirkan perasaan dari negara-negara tetangganya di Asia Timur Laut, khususnya Cina dan Korea. Cina telah mengkritik Jepang karena mengirimkan Pasukan Bela Dirinya sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB walaupun tidak dengan seragam militer.

Bagi ASEAN, aliansi AS-Jepang merupakan jaminan yang paling penting yang menjamin bahwa Jepang tidak akan berjalan sendiri dalam masalah pertahanan. Oleh karena itu, Jepang harus mengambil kebijakan apa pun untuk mempertahankan aliansi tersebut dan ASEAN akan mendukungnya. Akan tetapi, Jepang tidak boleh bertindak berlebihan di bidang militer. ASEAN akan mendukung penggelaran Pasukan Bela Diri Jepang sebagai pasukan khusus penjaga perdamaian PBB di mana pasukan tersebut terlibat dalam kegiatan logistik atau tergabung dalam tim medis. Namun penggelaran kapal frigat atau penyaru ranjau ke Teluk Parsi akan menciptakan tanggapan yang keliru bagi pandangan umum masyarakat

negara-negara ASEAN.

Dalam kasus apa pun negara-negara ASEAN akan mulai menyiapkan diri menghadapi suatu kemungkinan seperti yang telah terbukti dalam sejarah, bahwa suatu kekosongan sebagai akibat dari penarikan mundur suatu kekuatan akan segera diisi oleh negara-negara besar lainnya. Mengingat ketidakpastian seperti itu, perlu bagi negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan. Mereka hendaknya memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral yang sudah ada sekarang ini sedemikian rupa sehingga jalinan hubungan pertahanan ini dapat suatu waktu ditransformasikan ke dalam suatu mekanisme koordinasi pertahanan yang lebih formal antara negara-negara tersebut. Negara-negara ASEAN dapat juga menjalin kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan Australia, namun hal ini tidak dapat didasarkan atas FPDA (*Five Power Defence Arrangement*/Kerjasama Pertahanan Lima Negara) karena hal itu akan dilihat sebagai suatu pengaturan yang semula dibuat untuk menghadapi Indonesia.

Masalah penting lain dalam agenda ASEAN adalah 'normalisasi hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, khususnya Vietnam, segera setelah penyelesaian konflik Kampuchea. Penting bagi ASEAN untuk menemukan suatu cara guna mengikutsertakan negara-negara Asia Tenggara yang tidak tergabung dalam ASEAN ini dalam menerapkan ide mengenai ZOPFAN. Langkah pertama yang dapat diambil menuju ke arah itu adalah dengan mengundang negara-negara tersebut agar bergabung dalam Perjanjian ASEAN mengenai kerjasama dan persahabatan seperti yang telah dilakukan oleh Papua New Guinea. Hal ini secara implisit berarti mau menerima penyelesaian secara damai setiap konflik yang terjadi di kawasan. Usaha lain yang dapat dilakukan ASEAN hendaknya

mencakup perkembangan lebih lanjut ide mengenai CBM serta pembentukan suatu forum dialog politik dalam kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan sebagai cara untuk meningkatkan stabilitas, perdamaian dan perkembangan di kawasan. Sehubungan dengan ini semua prakarsa yang diambil oleh *think tanks* swasta hendaknya diterima dengan baik. Dulu ada anggapan bahwa konflik dan persengketaan regional haruslah ditangani terlebih dahulu sebelum membentuk forum semacam itu, akan tetapi CSCE di Eropa justru dibentuk sebelum masalah-masalah yang muncul di Eropa berhasil ditangani. Oleh karena itu, tidak ada alasan mengapa kawasan Asia-Pasifik tidak membentuk terlebih dahulu suatu forum untuk membahas masalah keamanan regional. Dialog tersebut hendaknya bersifat informal pada awal mulanya, kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih formal.

Sekiranya Amerika Serikat memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya dari Pasifik Barat, kendati kemungkinan seperti itu kecil sekali, ASEAN dapat mulai memikirkan untuk membentuk suatu pengaturan pertahanan yang lebih formal dengan negara-negara di Pasifik Barat Daya (Australia, Selandia Baru, dan Papua New Guinea). Tambahan pula ASEAN hendaknya mencari kerjasama dengan Jepang di bidang alih teknologi dan penyediaan peralatan yang dapat mengamankan SLOC (Jalur Laut Perdagangannya) di Asia Tenggara yang vital artinya bagi kepentingan keamanan Jepang. ASEAN menentang usaha Jepang untuk menjadi polisi bagi jalur laut di Asia Tenggara itu tetapi ASEAN juga siap untuk bekerjasama dengan Jepang karena ASEAN tidak mampu memikul sendiri beban keuangan dalam menjalankan tugas tersebut. ASEAN dapat pula meneliti kemampuan-kemampuan AS di masa mendatang untuk menyediakan teknologi dan peralatan yang diperlukan bagi ASEAN.

Suatu kerjasama formal ASEAN di bidang pertahanan memang tidaklah dapat tercipta begitu saja dalam waktu semalam. Sebagai prasyarat, ASEAN perlu terlebih dahulu memecahkan aneka persoalan yang ada di kalangan anggota-anggotanya, yang sebegitu jauh masih tersembunyi. Misalnya antara lain persoalan mengenai Sabah antara Malaysia dan Pilipina, begitu pula tentang sikap Thailand yang mendua terhadap ASEAN serta minatnya yang lebih besar untuk menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Yang juga dianggap sama pentingnya bagi kerjasama ASEAN di bidang pertahanan adalah perkembangan dari pandangan umum mengenai ancaman, khususnya mengenai pemahaman mereka tentang peran Cina dan Vietnam di Asia Tenggara, serta tentang hubungannya dengan negara-negara besar lainnya. Hal ini tentu membutuhkan suatu formulasi yang lebih tepat, dan perlu suatu adaptasi terhadap pelaksanaan konsep ZOPFAN (Zona Damai, Bebas dan Netral).

Di samping implikasi-implikasi keamanan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan global baru-baru ini juga membawa implikasi politik dan ekonomi terhadap kawasan. Implikasi politik dari perkembangan dramatis yang terjadi di Eropa Timur dapat dilihat dari kesadaran yang semakin berkembang di dunia mengenai ide tentang kemerdekaan, demokrasi, pluralisme politik, penguasaan oleh hukum, dan hak-hak asasi manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut langsung dirasakan oleh negara-negara sosialis yang ada di kawasan, yakni Cina, Vietnam dan Korea Utara di mana para pemimpin politiknya masih terus berjuang membendung aneka perubahan. Mongolia, Myanmar dan Nepal juga ikut terkena, dan pengaruhnya juga akan dirasakan oleh negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik walaupun secara tidak langsung. Pada kenyataannya pergerakan rakyat di Korea Selatan, Pilipina dan Taiwan telah

terjadi lebih dahulu dibanding Eropa Timur. Dari penelitian sekilas tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di berbagai negara yang berbeda satu sama lain itu dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan akan lebih cepat bila negara-negara tersebut mengalami kesulitan-kesulitan berat di bidang ekonomi.

Implikasi dari perubahan ekonomi global telah dibahas secara panjang-lebar. Di kawasan Asia-Pasifik, perubahan-perubahan tersebut telah mengakibatkan negara-negara di Pasifik Barat semakin bergantung satu sama lain di bidang ekonomi. Hal ini telah menciptakan beberapa peluang ekonomi baru bagi negara-negara di kawasan, terutama negara-negara berkembang, namun juga dapat menjadi sumber utama persengketaan politik di antara mereka sendiri. Di tahun-tahun belakangan ini, dapat dilihat adanya peningkatan luar biasa investasi langsung Jepang di bidang industri di negara-negara Asia. Hal ini telah menyebabkan semakin besarnya perdagangan intra-industri antara negara-negara Asia Timur dan Jepang. Perkembangan ini memang menguntungkan negara-negara ASEAN, tetapi juga dapat menjadi sumber timbulnya ketidakpuasan secara politis, khususnya bila hal tersebut dapat membuat suatu struktur produksi regional yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Tambahan pula, kawasan ini akan terus menjadi saksi atas timbulnya friksi ekonomi dan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi besar, yakni antara Amerika Serikat dan Jepang. Perkembangan semacam ini telah menggoyahkan seluruh kawasan.

Catatan Penutup

Apa yang dibahas di muka menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa penting bagi ASEAN untuk bersatu erat dan menjadi kuat agar dapat menghadapi berbagai per-

ubahan yang lebih besar lagi yang terjadi di berbagai belahan bumi baik di bidang keamanan dan strategi maupun ekonomi internasional. Pada kenyataannya ASEAN telah menyadari hal tersebut pada pertemuan para Menteri ASEAN yang terakhir. Telah dibuat berbagai usulan untuk mengambil prakarsa meningkatkan kerjasama ekonomi regional dan memperkuat mekanisme kerjasama, termasuk pula Sekretariat ASEAN, Pertemuan Bersama Tingkat Menteri dan keterlibatan para menteri ekonomi ASEAN dalam Konferensi Pasca Pertemuan ASEAN (*ASEAN Post Meeting Conference*). Lebih lanjut diakuinya pula perlunya membentuk suatu dialog untuk membahas masalah keamanan politik. Semuanya itu akan dibahas dalam KTT ASEAN mendatang yang akan diselenggarakan di Singapura bulan Desember 1991.

Peningkatan peran dan kehadiran Jepang di kawasan Asia-Pasifik dapat bermanfaat dan tidak akan dianggap sebagai ancaman selama aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat tidak terganggu. Aliansi tersebut vital sekali artinya untuk mempertahankan dan menjaga perdamaian, stabilitas serta kemakmuran kawasan. Juga sudah menjadi kepentingan ASEAN untuk tidak terlalu menggantungkan diri pada Jepang. Hal seperti ini baru dapat dimungkinkan selama kehadiran Amerika Serikat di kawasan ini juga memadai.

RRC itu penting bagi ASEAN karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan Asia Tenggara serta karena adanya persengketaan teritorial di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu forum untuk membahas masalah-masalah tersebut. Forum ini misalnya dapat dimanfaatkan untuk membahas usulan Perdana Menteri Li Peng yang diajukannya sewaktu mengunjungi Singapura di bulan Agustus 1990 untuk mengembangkan suatu eksplorasi dan eksploitasi bersama sumber-sumber daya yang ada di kawasan.

Uni Soviet hendaknya juga diajak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan dan pengembangan ekonomi kawasan. Tugas utama bagi Uni Soviet di kawasan Asia-Pasifik ialah mengupayakan penyelesaian damai atas pulau-pulau di utara. ASEAN hendaknya meneliti apakah dapat memainkan suatu peran pula dalam usaha mencari penyelesaian damai atas masalah tersebut.

Dalam analisis akhir, ASEAN dapat secara efektif ikut ambil bagian dalam usaha-usaha regional seperti tersebut di atas sekeranya memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggalang kerjasama di kalangan mereka sendiri di semua bidang. Pengembangan kemampuan institusional ASEAN merupakan salah satu tugas yang paling mendesak sekarang ini.

Kecenderungan dan Globalisasi Ekonomi

Sabana KARTASASMITA

APABILA globalisasi ekonomi kita artikan sebagai penyebaran industri ke seluruh dunia, maka globalisasi dimaksud telah sama tuanya dengan sejarah manusia. Banyak contoh mengenai ini, seperti pengalihan pembuatan kaca dari Syria ke Italia dan Bohemia, pengalihan industri metalurgi dari Roma ke Gaul/Spanyol dan Cornwall, pengalihan industri sutera dari Cina ke Turki, Italia, Eropa Timur dan Inggris, dan sebagainya. Sama tuanya adalah kekuatan-kekuatan yang menghambatnya, seperti kelambatan penyebarannya dan proteksionisme.

Apa yang sebenarnya berubah dalam globalisasi antara dahulu dan sekarang adalah dalam hal intensitasnya. Kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan transportasi, menyebabkan dunia terasa semakin kecil dan batas-batas negara semakin bersifat/berfungsi formalitas. Sifat pasar beserta peluang-peluang dan persaingannya menjadi semakin tajam dan dinamis, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sekaligus mendorong terjadinya

perlombaan dalam bidang teknologi, dan menyebabkan *obsolency* teknologi terjadi semakin cepat. Akibat dari hal ini:

- a. Industri yang tidak didukung "padat ilmu" tidak akan mampu mengikuti "perlombaan teknologi," terlebih apabila tidak mendapat subsidi/proteksi akan tergilas (tersisih).
- b. Peningkatan produktivitas, kualitas dan utilitas perlu diupayakan dengan berbagai cara, di mana peran R & D, TQC (*Total Quality Control*)¹ menjadi semata

¹Di Indonesia dikenal dengan istilah "Pengendalian Mutu Terpadu" lihat DR. Kaoru Ishikawa, *Guide to Quality Control*, 1982 (versi Indonesia). TQC dikenal sebagai salah satu gaya manajemen partisipatif, atau gaya manajemen "memanusiakan manusia" di mana sumberdaya manusia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai salah satu faktor produksi, tetapi lebih dihargai sebagai partner dalam suatu proses produksi, telah dikembangkan dengan sebaik-baiknya melalui tahapan Quality Control Circle atau gugus mutu terpadu. Untuk melakukan pengendalian mutu inilah, maka peranan sumberdaya manusia dalam proses produksi sangat penting dan menonjol, baik dalam statusnya sebagai pimpinan, staf maupun mereka yang berada di lapangan.

kin mendapat tempat pada banyak perusahaan/industri.

Siklus Barang

Pertarungan ekonomi antar negara industri terjadi di pasar, dalam bentuk upaya penguasaan pasar semaksimal mungkin. Saingan yang ada dihancurkan. Produk baru yang muncul -- apabila dinilai berupa ancaman -- tidak diberi peluang untuk tumbuh. Tujuannya jelas, agar dapat mengendalikan pasar secara sepenuhnya, sehingga dimungkinkan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Guna mendukung ini dilakukan ekspor, *direct investment* pada negara-negara lain ataupun melalui lisensi.

Hal itu memperkuat penguasaan pasar, termasuk penguasaan pasar bahan baku yang diperlukan, yang banyak di antaranya dihasilkan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Penguasaan pasar bahan baku ini mengait pula faktor pengendalian harga, sehingga nilai tambah yang diperoleh negara penghasil bahan baku menjadi dikendalikan juga. Sebab pengelolaan bahan baku menjadi bahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi terbentur pada kebutuhan dana investasi serta teknologi, di mana ini tidak selalu dapat disediakan oleh negara-negara yang sedang berkembang.

Globalisasi yang diiringi dominasi pasar menjadikan negara-negara industri maju sebagai *leader in technology*, posisi ini sekaligus digunakan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Inovasi-inovasi sangat intensif, -- sejalan dengan keunggulan teknologi sebagai andalan -- menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi semakin padat teknologi dan dengan *product life cycle* (siklus barang)

yang semakin pendek. Industri negara-negara sedang berkembang menjadi semakin jauh tertinggal. Maka, semakin rendah tingkat teknologi suatu negara, semakin besarlah dampak pengaruh negatifnya, yang sekaligus mempengaruhi neraca perdagangannya. Dampak atas keseimbangan eksport-impor antar negara pada berbagai tahap pembangunan (teknologi) disajikan secara skematis pada Gambar 1.

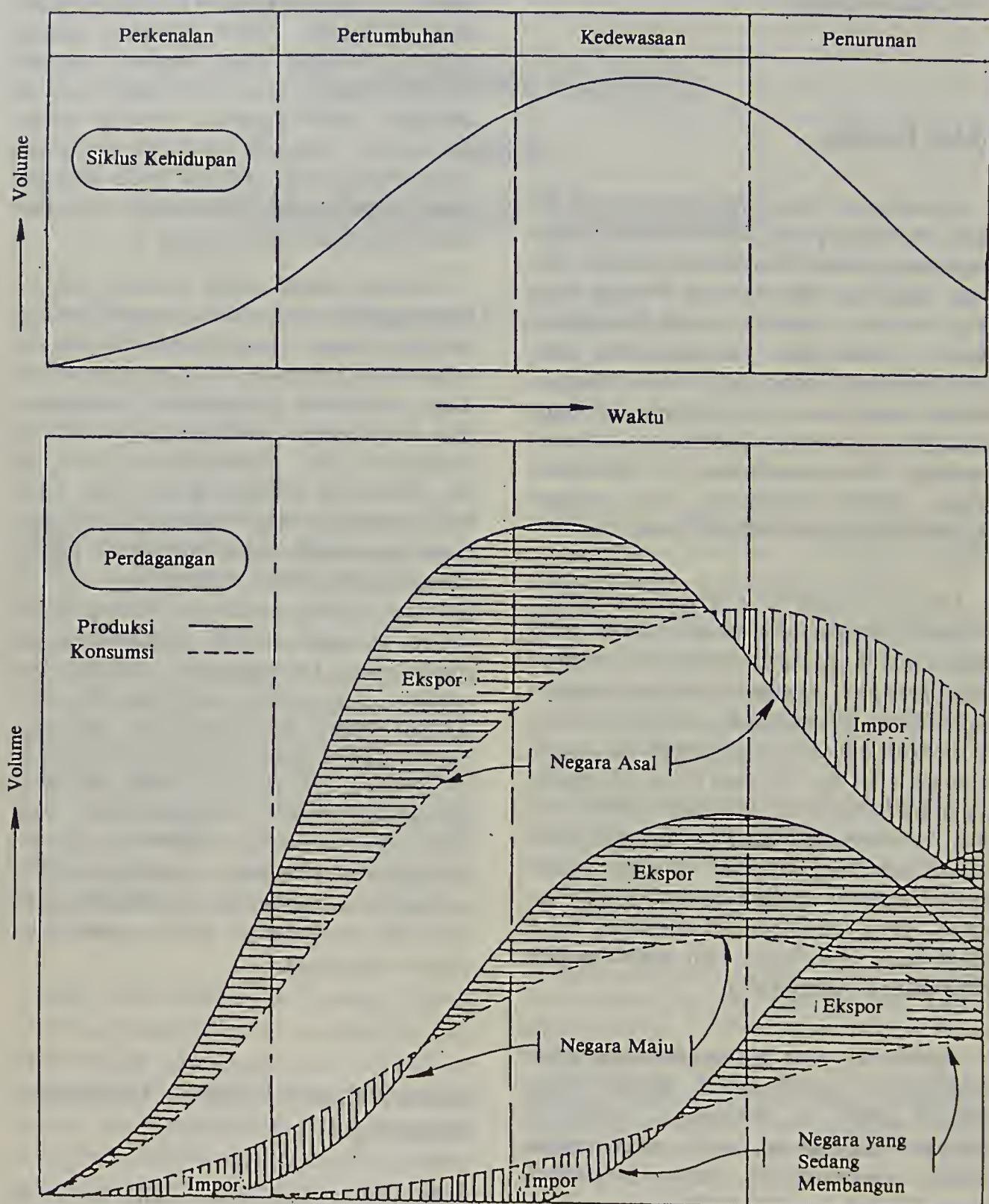
Sebagai akibat siklus barang yaitu kekadaluarsaan pemburukan progresif barang-barang, dengan volume yang bertambah dan kemudahan produksi, maka pemburukan ini akan membawa pengurangan keuntungan dan syarat-syarat perdagangan pun kurang menguntungkan. Barang-barang baru dan tua cenderung berbeda dalam rasio kadar intelektualnya, sebab barang-barang baru berisi massa lebih sedikit tetapi lebih banyak menonjolkan kadar ketrampilan dan intelektual. Bahkan dalam barang-barang massa material seperti mobil-mobil dan mesin-mesin, kecenderungan meningkatkan produk berkualitas demikian itu jelas terlihat dalam micro-processor, chip-chip, plastik dan sebagainya. *Kecenderungan-kecenderungan inilah yang telah membantu globalisasi dengan mempermudah membagi proses produksi ke dalam komponen-komponen/suku-suku cadang/partikel-partikel kecil, sehingga menyebabkan material dan ketrampilan lebih mudah dapat dibawa dan digeser.*

Industrialisasi dalam Globalisasi Teknologi

Tingkat industrialisasi yang dapat dicapai sangat tergantung pada kemampuan menyerap teknologi (teknologi baru) serta intensitas perlindungan (kadarnya serta waktunya) yang diberikan kepada industri-

Gambar 1

SIKLUS KEHIDUPAN TEKNOLOGI
DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Sumber: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, *Technology for Development* (Tokyo: ESCAP Studies, 1984).

industri tersebut, dan dukungan lain yang diberikan (seperti bantuan R & D yang umumnya memerlukan dana besar serta tenaga yang langka). Bimbingan manajerial juga diperlukan, karena industrialisasi memerlukan penyesuaian struktural dan penyesuaian sosial-budaya.

Cara penyerapan teknologi sendiri sangat penting diperhatikan. Kondisi teknologi (yang akan diserap) serta kondisi masyarakat penyerap (kadang-kadang bersifat lokal) sering sangat menentukan. Diperlukan berbagai model untuk ini, antara lain dengan menyimak bagaimana hal tersebut telah berlangsung pada berbagai negara di kawasan Pasifik (yang bercorak "budaya Timur" seperti Indonesia) dengan tingkat keberhasilan industrialisasi yang berbeda-beda. Yang pasti, *model linier yaitu jalan langsung dari ilmu pengetahuan ke pembangunan tidak lagi sepenuhnya berlaku bagi dunia. Teknologi tanpa ilmu pengetahuan akan menghambat inovasi, ilmu pengetahuan tanpa teknologi akan kehilangan motivasi.* Keserasian antara keduaanya perlu tertata secara tepat dan terpadu, supaya lompatan-lompatan teknologi menjadi lebih dimungkinkan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa dapat di terapkan (teknologi) menimbulkan kekecewaan, dan kemajuan teknologi tanpa diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan akan kehilangan kelanggengan (tidak mampu bersaing dalam "jangka panjang").

Model-model yang disusun bersifat dinamis, karena penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh kondisi (teknologi) lingkungan di mana terkait pengertian "tepat guna." Model yang digunakan karenanya perlu disesuaikan dengan berubahnya (maju) kondisi lingkungan.

Statistik-statistik Bank Dunia² tahun 1984 dan 1985 tentang tingkat pertumbuhan untuk tahun-tahun terakhir memperlihatkan bagaimana globalisasi mempengaruhi industri yang terletak di wilayah Pasifik. Umpamanya Jepang, Oceania, negara-negara industri baru, dan ASEAN secara kolektif naik 6%; khususnya industri manufaktur mereka tumbuh 7,2% tiap tahunnya. Dalam syarat-syarat yang relatif negara-negara ASEAN, NIB Asia dan Mexico mempunyai tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada negara-negara yang maju, meskipun dasar darimana mereka mulai adalah rendah.

Pada tahun 1986 Jepang telah menyusul semua negara maju dalam tingkat pertumbuhan dan produk nasional bruto tiap kepala. NIB Asia dan negara-negara ASEAN, dengan pengecualian Pilipina, memperlihatkan pertumbuhan yang menyalok selama kedua goncangan harga minyak sesudah perang. Ramalan pertumbuhan GNP yang biasanya didasarkan pada model-model yang canggih, menyarankan lanjutan yang menurun dari kecenderungan-kecenderungan ini.³

Karena itu tingkat menengah pertumbuhan yang diproyeksikan oleh pakar-pakar tersebut untuk periode 1980-1985 adalah kira-kira 5,6% untuk NIB-Asia, 4,7% untuk ASEAN (Indonesia diproyeksikan 3,7-4,1%), 4,1% untuk Jepang dan 3,4% untuk Australia. Sedangkan untuk negara-negara industri Amerika Utara dan Eropa tingkat pertumbuhan diproyeksikan 2,3%. Tingkat rendah diproyeksikan bagi Pilipina

²World Bank Development Report 1984-1985, Washington DC.

³Findlay C.K. Anderson & P. Drysdale, *China's Trade and Pacific Economic Growth* (Canberra: Australian National University, 1986). A. Onishi & O. Nakamura, *Longterm Economic Perspective for Asia and the Pacific 1986-2000* (Tokyo: Joko University, 1986).

dan pertumbuhan lebih cepat dari dasar yang rendah diproyeksikan untuk RRC.

Proyeksi dimaksud menunjukkan bahwa secara kuantitatif pertumbuhan negara-negara yang sedang berkembang tidak mampu mengejar ketinggalan dari negara-negara industri maju tanpa tersedianya dana/bantuan dari luar negeri. Proyeksi tersebut juga menunjukkan betapa "labil"-nya pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang, dan hal ini merupakan indikasi "kurang mantap"-nya landasan dasar yang digunakan untuk pengembangan ekonomi. Globalisasi ekonomi sangat berperan di sini, di samping adanya keterbatasan dalam hal "penyerapan teknologi."

Globalisasi dan Perubahan Struktural

Secara mikro, globalisasi mempengaruhi struktur usaha sejalan dengan bergesernya *critical factor*: dari "keunggulan produk" menjadi "keunggulan alat pembuat produk + keunggulan produk," dan ini mempengaruhi struktur usaha. Secara makro, globalisasi memaksa setiap negara untuk tidak hanya bertumpu pada industri primer saja (pertanian, pertambangan, perikanan, dan sebagainya), atau industri sekunder saja (manufaktur, processing, dan sebagainya). Tetapi harus juga dikembangkan sekaligus ketiga jenis industri, yaitu industri primer, industri sekunder dan industri tertier (jasa, informasi, dan sebagainya), agar negara dimaksud dapat mempertahankan keunggulan komparatif dan dapat memaksimalkan (mengoptimalkan) nilai tambah yang diperolehnya. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan struktural yang mendasar dalam negara tersebut secara menyeluruh (struktur *employment*, struktur perdagangan, struktur pendidikan dan sebagainya).

Untuk memberikan gambaran mengenai pergeseran-pergeseran keuntungan komparatif, kita harus melihatnya dalam struktur industri dan produk yang dikembangkan. Kuznetz⁴ telah menggunakan keuntungan komparatif yaitu ratio dari bagian suatu negara untuk barang manufaktur tertentu dalam keseluruhan ekspor manufaktur dunia sebagai indikator dari pergeseran-pergeseran keuntungan komparatif, seperti terlihat dalam Tabel 1.

Terlihat bahwa di Amerika Serikat di mana industri farmasi adalah padat penelitian teknologi tinggi, industri itu dapat mempertahankan dan memperbaiki keuntungan komparatifnya. Sebagai perbandingan perdagangan obatan-obatan generik (obat-obatan yang tidak dilindungi patent lagi), Hongkong yang pada dasarnya ber-teknologi rendah, keuntungan komparatifnya telah menurun. Dalam hal barang-barang kayu, negara-negara yang mendapat keuntungan dari bahan-bahan mentah alami adalah baik keuntungan komparatifnya, khususnya bila mereka mempunyai juga biaya-biaya buruh yang rendah. Taiwan, Korea Selatan dan Malaysia telah berusaha dengan baik, tetapi dengan biaya buruh yang menaik, keuntungan mereka menurun. Tekstil dan mainan anak-anak menunjukkan penurunan progresif Jepang dalam keuntungan daripada negara industri baru. Dalam hal mesin-mesin kantor, keunggulan teknis Amerika Serikat tetap bertahan dalam syarat-syarat murni menghadapi konsumen Hongkong dan kemunculan Jepang yang lebih cepat, khususnya sesudah tahun 1978.

Timbulnya negara-negara industri baru

⁴P.W. Kuznetz, "Economic Development, Export Structure and Shifting Comparative Advantage in the Pacific Region" dalam Jan E. Kolm, *Regional and National Consequence of Globalizing Industries of the Pacific Rim, Council of Engineering and Technological Sciences* (Washington D.C.: National Academy Press, 1988).

Tabel 1

KEUNTUNGAN KOMPARATIF MENURUT GOLONGAN
INDUSTRI, 1970-AN

Industri dan Negara	1970	1978	Industri dan Negara	1970	1978
Obat-obatan (SIC 541)			Kendaraan Bermotor (SIC 732)		
Hongkong	1,24	0,63	Australia	1,26	0,40
Jepang	0,24	0,17	Canada	3,83	3,87
Singapura	1,11	1,65	Jepang	0,88	1,62
Amerika Serikat	0,99	1,23	Singapura	0,79	0,26
Barang-barang Kayu (SIC 631, 2)			Amerika Serikat	1,08	1,16
Canada	2,24	3,43	Pakaian (SIC 84)		
Jepang	0,90	0,19	Hongkong	9,49	10,13
Korea Selatan	17,65	5,80	Jepang	0,86	0,17
Malaysia	26,14	8,23	Korea Selatan	10,67	7,50
Taiwan	8,46	4,34	Taiwan	4,12	4,00
Amerika Serikat	0,60	0,75	Peralatan Ilmiah, Lain (SIC 681)		
Tekstil (SIC 65)			Canada	0,14	0,36
Hongkong	1,71	1,92	Hongkong	0,34	0,85
Jepang	2,46	0,87	Jepang	1,45	1,91
Korea Selatan	1,95	2,91	Amerika Serikat	1,64	1,21
Taiwan	1,67	1,55	Mainan, Barang-barang Olahraga (SIC 894)		
Mesin-mesin Kantor (SIC 714)			Hongkong	9,90	10,26
Canada	0,75	1,23	Jepang	2,16	0,89
Hongkong	0,11	1,26	Korea Selatan	0,48	3,62
Jepang	0,76	0,88	Taiwan	2,57	2,73
Taiwan	0,73	0,51	Amerika Serikat	0,70	1,13
Peralatan Telekomunikasi (SIC 724)					
Hongkong	1,60	1,92			
Jepang	2,89	2,48			
Korea Selatan	0,32	1,93			
Taiwan	3,69	2,37			
Amerika Serikat	0,90	0,98			

Catatan: SIC = Standard Industrial Classification Code.

Sumber: P.W. Kuznetz, *Economic Development*.

adalah penting artinya bagi produksi manufaktur yang padat teknologi dan padat karya seperti peralatan telekomunikasi, mainan anak-anak, pakaian dan alat-alat olahraga. Industri-industri tersebut agaknya didominasi oleh kegiatan Hongkong dan Taiwan. Dalam hal barang-barang massa yang sifatnya padat teknologi dan peralatan-peralatan ilmiah, Amerika Serikat dan Jepang tetap menonjol. Dalam produksi kendaraan bermotor, telah ada perkembangan yang relatif cepat dari Jepang dan penurunan yang tajam dari Australia.

Bagaimana perubahan struktural tersebut telah berlangsung di negara berbudaya Timur dapat kita lihat Jepang, di mana berbagai hasil dari Revolusi Industri telah memasuki Jepang pada pertengahan abad ke-19 sebagai akibat kebijakan "membuka diri" pemerintahnya. Teknologi yang diserap mula-mula adalah pada sektor pertanian dan angkutan, yang berperan mendorong peningkatan ekspor barang-barang primer, sekaligus melancarkan pertumbuhan awal teknologi Jepang. Surplus perdagangan yang diperoleh digunakan untuk mendukung pertumbuhan industri-industri pengganti impor dan industri-industri ini mendapat perlindungan. Sesudah Perang Dunia II pengaruh Amerika Serikat (yang waktu itu telah mencapai puncak pertumbuhan ekonomi) mendominasi Jepang yang sedang dalam periode transformasi teknologi menuju negara industri maju, menyebabkan mengalirnya dana/modal dan teknologi ke negara-negara yang menjadi pasar produk-produk mereka.

Contoh klasik mengenai Jepang sejak Restorasi Meiji yang mulai pada tahun 1868⁵ sering dipakai sebagai model bagi banyak

negara yang sedang membangun. Dengan mengambil contoh Jepang seperti yang telah diungkapkan, tahap-tahap perubahan dapat disimpulkan kembali dengan singkat sebagai berikut:

Pertama-tama adalah perlindungan dan promosi jangka panjang atas hampir setiap industri ringan yang ditujukan untuk penyerapan angkatan kerja. Pada dasarnya hanya industri ringan dianggap tepat pada waktu itu, mengingat banyaknya buruh murah. Sesudah Perang Dunia II, Jepang mengadopsi kebijaksanaan produksi prioritas dan alokasi sumber daya lebih didahulukan pada sektor-sektor dasar batubara, baja dan listrik.

Pada tahun 1960-an Jepang bergeser ke industri manufaktur berat, dan diversifikasi pertanian menjauhi beras sebagai satu-satunya komoditi. Industri-industri bayi setempat seperti mesin listrik, sepeda motor, mobil, kapal terbang, petrokimia dan elektronika disubsidi dan dilindungi terhadap impor, dan ekspor dirangsang keras oleh Pemerintah. Pada tahun 1960, Jepang juga mengambil langkah-langkah pertama pembebasan dengan mengubah pembatasan kuantitatif tarif-tarif dalam program "liberalisasi" perdagangan dan valuta asing. Program tersebut diikuti penerimaan artikel 11 *General Agreement on Tariffs and Trade* dengan pembebasan impor dan pelonggaran investasi luar negeri. Pada saat Jepang membebaskan investasi luar negeri, maka industri dasarnya telah mapan sepenuhnya dan negara sudah mempunyai valuta asing yang banyak.

Jepang berlanjut memimpin dalam perubahan struktural yang diilhami pemerintahnya. Pada tahun 1970-an biaya-biaya buruh naik, penduduk bertambah dan kendala-kendala lingkungan menekan industri-industri berat. Karena itu MITI memperkenalkan strategi *industrialisasi pa-*

⁵Sekiguchi & Horiuchi, "Foreign Trade and Industrial Policies: A Review of Japanese Experience" dalam Boulder, *Industrial Future of the Pacific Basin* (Westview Press, 1984).

dat pengetahuan yang menempatkan kebijaksanaan Pemerintah menyesuaikan diri pada kecenderungan yang diprakarsai sektor swasta di Amerika Serikat, kebijaksanaan ini kemudian diikuti oleh semuanya. Dengan slogan "industri matahari terbit" sisa-sisa perlindungan untuk para petani dan upaya non-tarif baru habis pada tahun 1980-an.

Apa yang dapat kita amati dan pelajari dari sejarah industrialisasi Jepang itu adalah bentuk-bentuk/transformasi struktural seiring dengan proses industrialisasi. Dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan serta budaya dan etos kerja, Jepang telah berhasil dalam proses industrialisasi serta teknologinya, tanpa "banyak kehilangan" nilai-nilai budayanya.

Pola-pola Industrialisasi

Pola industrialisasi Jepang (dengan latar belakang budaya Timur), pola industrialisasi Eropa (dengan latar belakang budaya konservatif Barat) dan pola industrialisasi Amerika Serikat (dengan latar belakang budaya imigran/agresif) menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan. Kesamaan terutama adalah dalam hal tahapan pembangunan yang ditempuh (dari industri pertanian/pertambangan ke industri pengolahan bahan pertanian/pertambangan, ke industri pembuatan alat pertanian/pertambangan dan industri manufaktur serta transportasi, dan seterusnya hingga mencapai industri canggih dan padat ilmu maupun modal seperti yang dikenal sekarang). Perbedaannya adalah dalam hal "lompatan-lompatan"-nya dan dalam cara "merebut" kemajuan teknologi (tahap yang tidak perlu dilompati karena teknologinya "dicuri" atau "dilarikan").

Apabila dilihat lebih rinci, perbedaan tersebut akan semakin nyata dalam cara-

cara perusahaan mengadakan improvisasi/inovasi produknya, di mana dalam pengembangannya selalu bergandengan dengan aplikasi ilmu pengetahuan.⁶ Perbedaan akan semakin nyata lagi apabila kita teliti penjabaran detailnya, misalnya dalam hal aplikasi nyata setiap usaha/industri dengan *operation system*-nya masing-masing, di mana pengaruh-pengaruh lokal semakin perlu mendapat perhatian dan di-perhitungkan. Transformasi industri hingga menjadi "padat modal" dan "padat ilmu" sangat jelas dengan tingkatannya masing-masing.

Namun demikian, guna sampai pada tahap/tingkat industrialisasi itu diperlukan berbagai prasyarat seperti tersedianya dana yang cukup, *learning curve* yang memakan waktu lama, di samping hal-hal lain yang terkait (seperti pengembangan ilmu yang tepat, sistem-sistem manajemen, dan sebagainya) yang secara keseluruhan perlu dipadu dalam program yang baik dilengkapi dengan sarana infrastruktur industrial yang diperlukan dan instrumen pengendalinya. Masalahnya ialah "apakah negara-negara berkembang mampu menyediakan semuanya itu?" Hal ini menjadi problema pertama, termasuk untuk Indonesia. Pada umumnya pertumbuhan negara-negara berkembang belum mampu menyediakan hal-hal tersebut; di samping terdapat kelangkaan serius tenaga cakap dan terampil untuk menangani program-programnya sendiri (termasuk kemampuan menyusun rencana/program yang mempunyai validitas tinggi).

Pertanyaan penting bagi Indonesia adalah: *bagaimana pola industrialisasi yang setepatnya bagi Indonesia*, atau dengan lebih dirinci sebagai "bagaimana kita mengaitkan ekonomi-industrialisasi-teknologi-ilmu/

⁶ Roy Rothwell & Walter Zegveld, *Reindustrialization and Technology* (Longman, 1985).

science." Masing-masing mempunyai polanya sendiri:

- Pertumbuhan industri mengikuti pola/tahapan tertentu;
- Penguasaan teknologi memerlukan pola/tahapan tertentu;
- Penguasaan ilmu memerlukan pola/tahapan tertentu;

Hal tersebut secara keseluruhan akan terfleksi dalam perkembangan ekonomi. Penyusunan polanya haruslah berdasarkan landasan potensi yang secara riil kita miliki, termasuk sumberdaya manusia beserta budayanya. Sementara itu pengaitan pola-pola ke dalam suatu pola terpadu memerlukan kerjasama yang erat antar semua bidang dan kesamaan dalam persepsi.

Landasan Teoritis dan Konseptual Kerjasama Antar Regional: Kasus Forum Kerjasama Asia Pasifik*

Bantarto BANDORO

Pendahuluan

DISKUSI mengenai kawasan Pasifik, dilihat dari berbagai aspeknya, masih terus berlangsung, ibarat bola yang terus menggelinding. Dalam dua abad terakhir ini, perhatian terhadap perkembangan di Pasifik sebagai suatu kawasan telah memperlihatkan suatu arah tertentu. Pada mulanya perhatian dipusatkan pada pengaruh perkembangan global terhadap ekonomi Pasifik utama dan bagaimana mereka harus menghadapi pengaruh-pengaruh eksternal itu. Kemudian, oleh karena pengakuan atas kemajuan ekonomi negara-negara Pasifik, perhatian difokuskan pada dinamika internal kawasan dan bagaimana kelompok ekonomi kawasan dapat menyumbang pada kemajuan ekonomi regional.

Dalam 4-5 tahun terakhir ini perhatian difokuskan pada implikasi global pertum-

buhan ekonomi kawasan yang mengesankan. Majalah *Newsweek* yang terbit tanggal 22 Februari 1988 melaporkan bahwa dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi Jepang dan ekonomi Asia Timur; mereka sedang bergerak ke arah suatu posisi untuk mendominasi ekonomi dunia. Laporan itu menggambarkan "Era Pasifik" sebagai "Era Bangkitnya Kekuatan Asia."¹

Istilah "Abad Pasifik," yang banyak muncul dalam tulisan-tulisan akademik, laporan media atau pidato-pidato,² sering digunakan untuk menunjukkan pergeseran pusat grafitas dunia dari Atlantik ke Pasifik. Robert Gilpin misalnya, melihat kecenderungan Pasifik sebagai kekuatan besar yang

¹ *Newsweek*, 22 Februari 1988.

*Makalah ini pernah diajukan pada Seminar Pasifik IV tentang Prospek dan Tantangan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 9 Maret 1991.

²Untuk tulisan akademik lihat misalnya Christopher Coker, "The Myth or Reality of the Pacific Century," *Washington Quarterly* (Summer 1980); Staffan B. Lindner, *The Pacific Century: Economic and Political Consequences of Asia Pacific Dynamism* (Stanford: Stanford University Press, 1986); untuk laporan lihat misalnya Norman Macrae, "Pacific Century, 1975-2075," *Economist*, (4 Januari 1975) dan "Pacific Century," *Newsweek*, (22 Februari 1988).

akan membentuk tatanan ekonomi internasional untuk beberapa dasawarsa mendatang.³ Staffan Burenstam Linder juga yakin bahwa kecenderungan Pasifik sedang menghidupkan kembali seluruh dunia.⁴

Di Amerika Serikat sendiri pemikiran semacam itu sebenarnya telah lama ada. Presiden Roosevelt, pengikut mashab geopolitik yang berkembang pada akhir abad 19, adalah salah seorang yang menganut pandangan seperti itu. Di tahun 1898, pada saat Amerika Serikat menduduki Filipina, ia pernah mengatakan bahwa: "Era Atlantik ... akan segera kehabisan sumber dayanya dan 'Era Pasifik,' yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi besar, kini mulai timbul."⁵ Ia mengungkapkan kembali pemikirannya pada tahun 1905 bahwa "abad ke-20 akan merupakan abad Pasifik."⁶

Analisis mengenai kawasan Pasifik akhir-akhir ini tampaknya berkisar, meskipun tidak selalu, pada pertumbuhan ekonomi negara-negara Pasifik dan interaksi yang meningkat di antara mereka. Dinamisme Pasifik, dengan berbagai keistimewaannya, antara lain seperti telah disebutkan tadi, menyumbang pada lahirnya anggapan bahwa "era Pasifik" telah tiba. Tetapi ada yang bersikap skeptis. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa apa yang dinamakan abad Pasifik agaknya tidak akan tiba.⁷

Perhatian terhadap kawasan Pasifik

³Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987).

⁴Staffan B. Linder, *The Pacific Century*.

⁵Sebagaimana dikutip oleh Coker, "The Myth or Reality."

⁶Sebagaimana dikutip oleh Kumao Kaneko, "A New Pacific Initiative - Strengthening the PECC Process," *Japan Review of International Affairs* (Spring-Summer, 1988).

⁷Coker, "The Myth or Reality."

sebagai suatu kawasan memperlihatkan dua garis pemikiran yang sejalan, kalaupun tidak konvergen. Pemikiran yang pertama mempersoalkan atau memperhatikan masalah pergaulan sosial, ekonomi dan politik di antara negara-negara di kawasan. Pemikiran yang kedua, yang mungkin timbul karena pemikiran yang pertama, mempersoalkan bagaimana kerjasama ekonomi di antara mereka dapat mempertahankan dinamika pertumbuhan ekonomi regional melalui pembentukan suatu institusi regional. Oleh sebab itu tulisan ini tidak bermakna memerdebatkan apakah "abad Pasifik" telah tiba, tetapi mencoba menelaah lebih dalam landasan teoretis dan konseptual dari pemikiran yang disebut terakhir. Diskusi-diskusi mengenai ide institusi regional mungkin dapat dilihat sebagai suatu keistimewaan tersendiri dalam "abad Pasifik" kalau abad itu memang dianggap telah tiba.

Dari PAFTA ke APEC

Konsep kerjasama Pasifik yang telah sejak lama didiskusikan, pada mulanya meliputi dua pokok persoalan, yaitu keinginan dan fasilitas. Keinginan negara-negara Pasifik untuk mengembangkan suatu bentuk kerjasama dan interaksi yang teratur dapat dilacak dari berbagai macam usul untuk melembagakan gagasan kerjasama yang muncul sekitar tiga dasawarsa yang lalu. Negara-negara Pasifik dewasa ini mungkin tidak perlu lagi mempersoalkan fisibilitas oleh karena kerjasama ekonomi dalam bentuknya sekarang ini (APEC misalnya) merupakan satu dari beberapa opsi yang pada waktu itu mungkin dianggap memadai dan mempunyai fisibilitas yang paling besar. Oleh sebab itu kiranya tidak pantas pula jika tulisan ini mempersoalkan kembali masalah fisibilitas. Tetapi usaha untuk menelaah kembali mengapa gagasan itu dianggap paling memadai di antara gagasan-gagasan

yang ada tampaknya juga terlalu penting untuk diabaikan oleh kalangan akademik. Oleh sebab itu bagian ini hendak menelaah bagaimana dan dalam situasi apa gagasan kerjasama Pasifik muncul dan mengapa gagasan tertentu dianggap paling meinadai.

Diskusi mengenai kerjasama ekonomi Pasifik dan *market integration* bagi keseluruhan kawasan Pasifik telah berlangsung dalam irama yang berbeda-beda. Oleh karena tiada pengaturan institusi formal (sampai tahun 1989 yang lalu) untuk suatu kerjasama, maka sebagian besar perdebatan mengenai kerjasama Pasifik, seperti tercermin dalam literatur, bersifat spekulatif dalam arti bahwa diskusi itu lebih memfokuskan pada skema potensial daripada mengevaluasi penampilan institusi yang ada dan tindakan-tindakan konkret.⁸

Konsep kerjasama ekonomi regional Pasifik pertama kali didiskusikan dalam konferensi mengenai "Kerjasama Ekonomi untuk Pembangunan dan Perdagangan di Pasifik" yang berlangsung di *East-West Centre*, Hawaii, Februari 1964. Salah satu "pelopor" diskusi-diskusi akademik mengenai kerjasama ekonomi di Pasifik adalah Kiyoshi Kojima, yang dalam makalah yang diajukan pada konferensi yang diorganisir oleh *Japan Economic Research Centre* (1965), mengajukan usul pembentukan: *Pacific Free Trade Area* (PAFTA). Rationale kerjasama (suatu integrasi) ekonomi regional di kawasan Pasifik secara predominan didasarkan atas suatu analisis akibat kejadian-kejadian *ekstern* atas perekonomian kelima negara Pasifik yang maju, dan pada gilirannya juga atas hubungannya antara negara-negara ini dan negara-negara berkembang di Pasifik. Ia mengatakan bahwa "setiap kali dirasakan

⁸Hans Christopher Rieger, "Regional Cooperation in the Asia Pacific Region," *Asia Pacific Economic Literature*, vol. 3, no. 2 (September 1989).

suatu kejutan dari kelima negara Pasifik itu, perlunya integrasi Pasifik yang lebih erat dirasakan lebih serius."⁹

Usul PAFTA¹⁰ pertama-tama adalah reaksi atas dibentuknya MEE. Blok Eropa (pada waktu itu) dilihat sebagai suatu yang meneruskan dan memperkuat kebijakan-kebijakan yang melihat ke dalam dengan meningkatkan pembangunan intra-regional dan menaikkan tingkat swasembadanya. Kojima mengatakan bahwa logis bagi negara-negara kawasan Pasifik untuk memajukan integrasi (ekonomi) mereka dalam rangka mengembangkan kawasan yang mempunyai potensi yang besar sekali dibandingkan dengan Eropa yang telah berkembang dengan baik.

Kojima menganalisis bahwa PAFTA akan mendatangkan perluasan perdagangan intra-regional, tetapi pembagian keuntungan akan sangat pincang akibat perbedaan tahap industrialisasi di kelima negara itu. Oleh sebab itu ia sendiri mengakui sulit untuk mencapai suatu konsensus mengenai pembentukan PAFTA.¹¹

Dalam makalahnya yang diubah pada tahun 1968, Kojima mengatakan bahwa usulnya (PAFTA) masih prematur. Oleh sebab itu ia mengusulkan suatu alternatif yang lebih praktis untuk mengintensifkan hubungan dagang yang lebih erat antara kelima negara Pasifik yang maju dan untuk

⁹Kiyoshi Kojima, *Japan and A New World Economic Order* (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1977).

¹⁰Terdiri atas Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

¹¹Ada beberapa faktor. Pertama, kepentingan-kepentingan global AS tidak akan mengizinkannya berperan dalam suatu pengelompokan regional Eropa atau Pasifik. Kedua, kelima negara Pasifik yang maju itu belum memiliki solidaritas dan tingkat integrasi yang akan diperlukan.

meningkatkan bantuan serta perdagangan dengan negara berkembang di kawasan. Tujuan-tujuan itu harus dicapai dengan memperkuat integrasi *fungsional*, bukan integrasi *institusional* seperti tersirat dalam usulannya semula. Sehubungan dengan itu Kojima mengusulkan pembentukan suatu Organisasi Perdagangan dan Pembangunan Pasifik (OPTAD), untuk melaksanakan tiga kode perilaku internasional, yaitu: (1) kode perilaku di bidang perdagangan; (2) kode investasi luar negeri; dan (3) kode kebijakan bantuan kepada dan perdagangan dengan negara-negara berkembang yang tergabung. Struktur organisasi OPTAD akan mengikuti model OECD dengan beberapa komite.¹²

Tetapi gagasan itu secara politik dan ekonomi tidak dapat diterima. Beberapa keberatan diajukan terhadap gagasan itu baik di Jepang maupun di negara-negara yang "lebih kecil" seperti Australia, Kanada dan Selandia Baru. Akan tetapi beberapa pengamat berpendapat bahwa fokus kebijakan luar negeri di bawah usul PAFTA mengandung pendekatan berguna terhadap masalah-masalah penting yang muncul akibat meningkatnya hubungan ekonomi di antara ekonomi-ekonomi yang bermacam-macam di kawasan Pasifik.

Pada tahun 1978, Komite Hubungan Luar Negeri, Senat AS, minta suatu *congressional research paper* mengenai Pembangunan, Bantuan dan Perdagangan di Pasifik. Penelitian kemudian dilakukan oleh Peter Drysdale dan Hugh Patrick¹³ yang

¹²Komite-komite itu adalah perdagangan, investasi dan bantuan.

¹³Peter Drysdale dan Hugh Patrick, "Evaluation of A Proposal Asian-Pacific Regional Economic Organization," dalam *An Asian-Pacific Regional Economic Organization: An Explanatory Concept Paper*, disiapkan untuk Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, oleh Congressional Research Service, Library of Congress (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1979).

kemudian memberi dampak nyata pada perdebatan-perdebatan berikutnya.

Dibandingkan dengan Kojima, yang menekankan pada kejadian-kejadian ekstern dan dampaknya terhadap negara-negara Pasifik, Drysdale dan Patrick memfokuskan pada *dinamika intern* kawasan Pasifik. Menurut mereka ada tiga faktor yang memberikan dorongan dan pertumbuhan ekonomi dan arti Pasifik yang meningkat dalam ekonomi dunia, yaitu: (1) meningkatnya kekuatan industri Jepang yang semakin membutuhkan bahan-bahan mineral; (2) hasil-hasil pertumbuhan perdagangan dan industri negara-negara berkembang Asia Timur dan Tenggara yang menyolok; dan (3) merosotnya pertumbuhan di Eropa Barat yang mengakibatkan sedikitnya peluang yang dapat dikembangkan di pasaran Eropa.

Drysdale dan Patrick menginginkan agar OPTAD dikembangkan menurut garis OECD dan menyarankan asas-asas organisasi umum, yaitu; (1) agar OPTAD menjadi suatu organisasi pemerintah; (2) bahwa struktur organisasi paling baik dibangun dengan keterlibatan ekonomi-ekonomi pasar Amerika Utara dan Pasifik Barat; (3) aparat administrasi kecil dan tidak birokratis; (4) isyu-isyu ditangani oleh satuan-satuan tugas fungsional yang spesifik; dan (5) gaya operasi bersifat konsultatif, informal dan komunikatif.

Hasil penelitian Drysdale dan Patrick melahirkan ide-ide lainnya mengenai kerjasama Pasifik. Yang perlu dicatat di sini adalah ide mengenai konsep kerjasama kawasan Pasifik (PBCC) dari Kelompok Studi Jepang. Konsep ini paling komprehensif dan akan meningkatkan apa yang oleh Hoon-mok Chung disebut "gejala difusi" dalam perkembangan gagasan atau

ide kerjasama ekonomi Pasifik.¹⁴ Oleh karena Kelompok Studi itu mengetahui usul-usul sebelumnya dan keberatan-keberatan terhadap usul-usul itu, usul PBCC perlu dievaluasi dalam konteks historis, politik maupun institusional. Kelompok studi mengetahui bahwa diskusi mengenai gagasan kerjasama ekonomi Pasifik bergerak ke arah yang oleh Yoseph Nye disebut "politik tinggi," yang melibatkan soal-soal dan alasan-alasan tersembunyi para pengusulnya (pengusul Jepang).

Laporan Kelompok Studi itu bermaksud menyarankan suatu usul tindakan, yaitu memajukan kerjasama kawasan Pasifik dengan cara yang sengaja dan mantap dan bertolak dari soal-soal urusan bersama yang oleh negara-negara yang bersangkutan dirasa relatif mudah untuk ditangani dengan sedikit bentrokan kepentingan. Sikap hati-hati tampak diperlihatkan oleh Kelompok Studi ini oleh karena ia dibentuk oleh Perdana Menteri Ohira. Selain terdapat kendala-kendala politik dalam operasinya, laporan itu berbeda dari karya-karya ahli lainnya, karena pada hakikatnya laporan itu lebih dilihat sebagai dokumen politik.

Ide lain mengenai kerjasama Pasifik muncul dalam tingkat pemerintahan, yaitu ketika pada tahun 1980 Perdana Menteri Fraser (Australia) dan Perdana Menteri Ohira (Jepang) mengadakan suatu "Seminar Masyarakat Pasifik" di Canberra. Seminar ini memberi rekomendasi untuk membentuk Komisi Kerjasama Pasifik (PCC).¹⁵ Ini merupakan pertemuan pertama dari serang-

kaian pertemuan *tripartite* yang kemudian dikenal dengan Konperensi Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC).¹⁶ Pada tahun 1989 PECC telah berkembang dari suatu lembaga *informal inventory* menjadi suatu forum yang diakui secara internasional terutama untuk pertukaran informasi, pengkajian terhadap isyu dan masalah-masalah ekonomi, dan untuk formulasi usul-usul spesifik guna meningkatkan kerjasama ekonomi Pasifik. Sebagai suatu institusi PECC mewakili konsep "Masyarakat Pasifik" secara lebih luas yang mencakup semua negara Laut Pasifik.

Salah satu prakarsa terakhir mengenai kerjasama ekonomi Pasifik muncul dalam pertemuan tingkat menteri 12 negara Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, tanggal 6-7 November 1989. Pertemuan itu yang dikenal sebagai pertemuan para Menteri APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), merupakan usaha serius yang pertama oleh pemerintah untuk memikirkan kemungkinan menciptakan suatu forum antar pemerintah guna konsultasi dan kerjasama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan kawasan. Jadi dapat dikatakan bahwa APEC muncul sebagai akibat pengakuan yang kuat akan pentingnya kerjasama ekonomi dan konsultasi di kawasan guna mempertahankan dinamika pembangunan ekonomi (regional). Seperti halnya Eropa, kawasan Asia Pasifik perlu mempertimbangkan pengembangan struktur regionalnya sendiri atau badan regional yang dapat memajukan pembangunan regional di masa depan. Jadi PECC dan APEC merupakan dua usaha kerjasama regional yang membentuk tanggapan-tanggapan regional yang diperlukan.

Berbagai macam rencana kerjasama ekonomi Pasifik seperti dipaparkan di atas secara jelas menunjukkan arah perkem-

¹⁴Hoon-mok Chung, "Economic Integration in the Pacific Basin: A Historical Review," ed. Han Sung-joo, *Community Building in the Pacific Region: Issues and Opportunities* (Seoul: The Asiatic Research Centre, 1981).

¹⁵Peter Drysdale, *International Economic Pluralism, Economic Policy in East Asia and the Pacific* (Sydney: Ullen & Unwin, 1980).

¹⁶Kaneko, "A New Pacific Initiative."

bangkit gagasan kerjasama Pasifik selama seperempat abad yang lalu. Tampak bahwa kerangka institusional yang diusulkan juga beralih dari kerangka "integrasi institusional" yang bersifat kaku (PAFTA) ke arah pengaturan "integrasi fungsional" yang lebih longgar, dan dewasa ini analisis dipusatkan pada semacam "koalisi" yang jauh lebih longgar. Perlu dicatat bahwa "gejala difusi" dalam perkembangan dalam gagasan kerjasama ekonomi Pasifik ini tidak harus dipandang sebagai perkembangan yang negatif. Sebenarnya gejala itu muncul dari penilaian yang lebih realistik terhadap keragaman kawasan Pasifik, dan usaha memajukan kerjasama ekonomi Pasifik melalui institusi hanya akan memberikan manfaat jika "masyarakat Pasifik" memanfaatkan keragaman yang ada di kawasan.

Politik Rendah dan Politik Tinggi

Diskusi mengenai gagasan-gagasan kerjasama ekonomi Pasifik yang terus berlangsung sampai saat ini sangat didasari oleh suatu kesadaran negara-negara di kawasan akan perkembangan yang terjadi di luar maupun di dalam kawasan sendiri. Keragaman yang ada dan pertumbuhan ekonomi serta menguatnya interaksi antar negara-negara di kawasan merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diabaikan oleh para pembuat keputusan di "masyarakat Pasifik." Kondisi-kondisi seperti itu mendorong mereka untuk mempola suatu mekanisme kerjasama kawasan yang lebih teratur; suatu kerjasama yang tidak hanya melibatkan komitmen untuk mengadakan dialog terbuka dan konsensus, tetapi juga bertujuan memperkuat perolehan (*gains*) dari proses saling ketergantungan di kawasan.

Apa yang dilakukan oleh negara-negara

Pasifik dalam bidang kerjasama ekonomi melalui pembentukan institusi regional merupakan suatu upaya untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi kerjasama antara mereka. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dari situasi kawasan dewasa ini. Situasi yang ada di kawasan secara keseluruhan memang tidak memperlihatkan benih-benih konfrontasi. Hubungan internasional di kawasan dewasa ini menurut seorang pengamat, tidak lagi bersifat *zero-sum* tetapi *positive-sum*¹⁷ yang lebih menonjolkan pertumbuhan *trans-border economy* daripada persaingan dan konfrontasi. Dapat dikatakan bahwa dorongan (*impetus*) untuk melakukan kerjasama muncul bukan hanya karena kesadaran mereka (negara-negara di kawasan) akan pentingnya saling ketergantungan, tetapi juga karena peluang yang muncul di kawasan dewasa ini jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Apa yang hendak dikemukakan dalam bagian ini adalah bahwa dalam diskusi-diskusi mengenai kerjasama (ekonomi) kawasan yang mencakup antara lain bentuk, struktur atau sasaran-sasaran dan fungsi-fungsi yang harus terlilit dalam kerjasama-kerjasama yang diusulkan akan sangat menentukan tempat kedudukan dan kerjasama kawasan dalam spektrum antara "politik rendah" dan "politik tinggi."

Joseph Nye mengatakan "bahwa 'politik tinggi' itu penuh lambang, emotif dan didasarkan atas sikap-sikap yang bercirikan intensitas yang *lebih besar* dan waktu yang lebih lama daripada 'politik rendah' yang sebagai akibatnya lebih terbuka untuk kalkulasi rasional keuntungan-keuntungan yang terjalin dengan masalah-masalah ekonomi." Bila kita amati kembali secara

¹⁷Seizaburo Sato, "The International Relations of the Asia Pacific Region and Role of Japan," *The Korean Journal of International Studies*, vol. XXI, no. 3 (Autumn 1990).

saksama ide-ide kerjasama (ekonomi) Pasifik yang didiskusikan sejak beberapa dasawarsa yang lalu, tampak bahwa ide-ide itu berada dalam liputan "politik rendah." Alasan yang mendasari analisis itu antara lain adalah bahwa ide kerjasama itu menunjukkan adanya suatu dinamika internal negara-negara Pasifik yang dapat berakibat terjadinya suatu transformasi mendalam di kawasan itu sendiri. Kawasan Pasifik akan menjadi bergantung satu sama lain dalam bidang perdagangan dan investasi. Demikian pun arus bantuan merupakan faktor penting yang mempererat hubungan ekonomi regional mereka. Dari acuan regional ini kawasan Pasifik akan memperoleh keuntungan guna memudahkan negara-negara di kawasan meraih sasaran perdagangan dan pembangunan serta mengatasi konflik antara mereka (di sekitar kawasan).

Dengan demikian dapat dikatakan faktor-faktor yang mendorong timbulnya gagasan kerjasama bersifat "politik rendah," dalam arti bahwa landasan untuk melakukan kerjasama lebih memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi dari pada bidang-bidang non-ekonomi. Akan tetapi bila kita amati secara lebih saksama lagi, dan bila mereka (orang-orang yang mendiskusikan dan memperdebatkan gagasan kerjasama Pasifik) lebih jujur lagi, maka sesungguhnya persoalan "politik tinggi" muncul dalam diskusi-diskusi mengenai gagasan kerjasama Pasifik. Dalam pengertian bahwa diskusi-diskusi itu sesungguhnya mempersoalkan tidak hanya landasan tetapi juga implikasi politik dan keamanan dari kerjasama-kerjasama yang diusulkan.

Hal itu antara lain dapat dilacak dari persoalan mengapa mereka mengusulkan ide kerjasama seperti itu. Konsep kerjasama kawasan Pasifik yang dihasilkan oleh Kelompok Studi Jepang, misalnya, me-

mang cukup komprehensif dibandingkan usul-usul lainnya. Tetapi usul Kelompok Studi Jepang itu perlu dievaluasi dalam konteks politiknya. Mungkin saja kelompok studi tersebut mempunyai alasan dan maksud tersembunyi dengan mengeluarkan usul semacam itu. Atau dengan perkataan lain, mereka (kelompok studi) mencoba menggerakkan diskusi ke arah "politik tinggi."

Contoh lain, terutama yang baru-baru ini muncul, adalah gagasan pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang diusulkan Malaysia. Persoalan yang muncul di sini adalah siapa yang harus menjadi anggota atau bukan anggota dari kerjasama itu dan siapa pula yang akan menjadi "core" dari kerjasama itu. Mungkin jawaban atas pertanyaan ini akan lebih bersifat politis, karena menyangkut pertimbangan-pertimbangan geografis. Mengenai keanggotaan, usul "non-paper" Malaysia itu menyatakan bahwa "keanggotaan akan meliputi negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur." Meskipun usul itu menyatakan tiada negara yang secara *apriori* diabaikan (*exclude*) dari pengelompokan itu, usul itu menyatakan beberapa negara sebagai anggota pengelompokan itu, termasuk negara-negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan dan Utara, Cina, Taiwan, Hongkong, negara-negara Indocina dan Myanmar. Pengelompokan itu mengabaikan anggota APEC, yaitu Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada, yang secara geografis tidak berada dalam kawasan Asia Timur.

Selain ditentang oleh negara-negara ASEAN, pembentukan "blok" ekonomi tanpa keanggotaan AS melahirkan perdebatan-perdebatan hangat. Diabaikannya AS dari pengelompokan itu akan membuat Jepang menjadi pemimpin dalam pengelompokan itu. Hal ini tentu tidak akan disambut baik oleh sejumlah negara-negara Asia Timur, karena akan membangkitkan

kembali ingatan mereka akan *East Asia Co-Prosperity Sphere*. Selain itu diabikannya AS juga membuat usul itu tidak atraktif bagi Jepang. Apalagi Jepang dan negara-negara Pasifik Barat sangat mendukung keanggotaan AS dan Kanada dalam APEC.

Jadi, persoalan yang muncul dari gagasan EAEG Malaysia dipandang dari sudut negara-negara ASEAN lainnya, menyangkut kemungkinan implikasi politik dan keamanan dari gagasan itu. Selain belum "siap" menghadapi kepemimpinan Jepang, negara-negara ASEAN lainnya sejak awal memang tidak menghendaki suatu forum yang dapat merongrong solidaritas ASEAN. Apa pun bentuk yang akan diambil oleh EAEG, ASEAN akan lebih mengutamakan kerjasama yang didasarkan atas konsensus ASEAN dan fleksibilitas kelompok dalam menangani persoalan hubungan mereka dengan blok perdagangan lain.

Jadi, dalam diskusi mengenai kerjasama ekonomi Pasifik sebenarnya terdapat dikotomi "politik rendah" dan "politik tinggi." Munculnya dikotomi ini akan lebih bisa dipahami bila kita melihat keanekaragaman dan interdependensi yang merupakan ciri-ciri utama ekonomi Pasifik. Hal ini selain akan menciptakan peluang yang lebih luas, seperti telah dikatakan di muka, juga akan membangkitkan kepekaan politik. Mungkin bukan rahasia lagi bahwa negara-negara yang perekonomiannya "lebih kecil" akan khawatir mengenai tempat dan posisi mereka dalam kerjasama regional Pasifik.

Persoalan dikotomi "politik rendah" dan "politik tinggi" dalam diskusi kerjasama Pasifik dapat pula dilihat dari diskusi mengenai kerjasama Pasifik dalam bentuk APEC. Memang sejak semula APEC tidak dimaksudkan sebagai organisasi ekonomi regional yang formal dengan keputusan-keputusan yang mengikat ang-

gota. Tetapi bahwa ia muncul sebagai akibat pengakuan akan pentingnya kerjasama ekonomi dan konsultasi di kawasan harus diakui. Selanjutnya, meskipun fokus APEC adalah bidang ekonomi, tidak dapat diingkari bahwa kerjasama semacam itu mempunyai implikasi dalam bidang-bidang lain, termasuk bidang politik strategi. *Pertama*, APEC akan dapat berfungsi sebagai forum bagi AS untuk memfokuskan pada kawasan guna mempertahankan kehadirannya di kawasan. *Kedua*, APEC dapat membantu menstabilkan hubungan bilateral yang paling penting di kawasan, yaitu hubungan AS-Jepang. *Ketiga*, APEC dapat memberikan suatu struktur regional yang dapat mengakomodasikan partisipasi Cina. *Keempat*, APEC dapat pula menjadi dasar bagi kawasan dalam menanggapi keinginan Gorbachev akan suatu peran yang lebih besar dan lebih konstruktif di kawasan Pasifik. *Kelima*, APEC dapat menjadi alat yang efektif untuk meng-*counter* kecenderungan *inward-looking* dalam masyarakat Eropa. *Keenam*, APEC dapat mempertahankan daya tarik kawasan sekalipun Barat dan Timur bersatu di kemudian hari. *Ketujuh*, APEC dapat menjadi suatu model untuk memajukan hubungan yang baik antara negara maju dan berkembang dalam kerangka regional.

Empat implikasi yang disebut pertama cukup penting bila kita ingin melihat persoalan itu dalam konteks politik dan keamanannya. Disadari atau tidak anggota APEC sesungguhnya telah meletakkan landasan-landasan baru tidak hanya bagi kerjasama politik di antara anggota APEC, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Persoalannya sekarang apakah anggota APEC akan memberi perhatian yang lebih besar kepada implikasi-implikasi itu dan tanpa disadari mengabaikan hakikat sesungguhnya dari pembentukan APEC itu sendiri atau justru kepada makna yang terkandung dalam APEC dengan mem-

biarkan polarisasi antara anggota APEC dan non-APEC yang mungkin akan memberi dampak yang merugikan APEC ataupun lingkungan dalam kawasan. Bila yang pertama yang lebih tampak, meskipun tidak secara nyata, maka apa yang dilakukan negara-negara di kawasan dalam kerangka APEC selama ini lebih merupakan bentuk lain dari usaha untuk mengatasi kecenderungan politik yang mungkin diperlihatkan oleh negara besar bukan anggota APEC. Jika analisis ini benar, maka cukup alasan untuk mengatakan bahwa hubungan internasional di kawasan Pasifik masih diliputi oleh persaingan ataupun konfrontasi.

Analisis di atas menunjukkan bahwa dalam diskusi mengenai gagasan-gagasan kerjasama Pasifik dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendorong bergeraknya gagasan-gagasan itu ke arah "politik tinggi" atau "politik rendah". Apa yang tampak dewasa ini dalam kerjasama Pasifik memang lebih menampakkan "politik rendah." Tetapi munculnya persoalan-persoalan yang didasarkan atas pertimbangan geografis ataupun kekhawatiran beberapa negara tertentu akan peran dominan suatu negara dalam suatu kerjasama dapat meyakinkan orang bahwa gagasan-gagasan itu bergerak ke arah ujung "politik tinggi."

Analisis

Bagian kedua menunjukkan bahwa untuk selama bertahun-tahun sejak tahun 1960-an telah ada berbagai konsep dan gagasan mengenai kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik. PAFTA Kojima, yang diusulkan pertengahan tahun 1960-an, merupakan konsep yang pertama. Sejak itu muncul berbagai gagasan serupa dalam lingkup kawasan. Bagian ketiga mungkin dapat dianggap sebagai konsekuensi dari bagian pertama dengan kemungkinan-kemungkinan implikasinya.

Paparan bagian kedua dan ketiga menunjukkan bahwa pandangan-pandangan mengenai gagasan kerjasama ekonomi kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam dua aliran utama yang mengungkapkan dua jenis kelas konsepsional mengenai masyarakat (*community*). Yang *pertama*, menjabarkan konsep itu pertama-tama dari gagasan-gagasan struktur (*structure oriented*), yaitu suatu wilayah geografis, suatu sistem kegiatan dan institusi ekonomi yang terjalin satu sama lain, dan suatu satuan yang secara politik memerintah diri. Contoh dari kelas konsepsi yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan geografis adalah gagasan Morinosuke Kajima mengenai *Pan-Asianism* (Persatuan Negara-negara Asia) yang muncul awal tahun 1960-an. Gagasan Kajima ini berasal dari kenyataan bahwa wilayah atau kawasan-kawasan geografis lainnya telah mengembangkan kerjasama semacam itu.¹⁸ Demikian pun inisiatif Presiden Lyndon Johnson akhir 1960-an yang mendorong pengembangan regionalisme Asia berasal dari kenyataan bahwa kawasan itu tidak memiliki struktur institusional.

Yang *kedua*, kelas konsepsi yang menekankan pada aspek positif dari interaksi sosial. Acuan gagasan ini adalah proses (*process oriented*). Konsepsi ini muncul sebagai konsekuensi perubahan sosial umum dan kemajuan ekonomi serta teknologi. Tetapi perkembangan konsepsi ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur psikologis dalam pikiran para ahli ilmu sosial. Mereka akhirnya memusatkan perhatian pada segi-segi interaksi sosial yang lebih positif. Beberapa usul, terutama setelah munculnya usul Drysdale dan Patrick, memperlihatkan kecenderungan itu. Istilah "masyarakat" digunakan sebagai bentuk perhimpunan di mana konflik yang boros disingkirkan dan di mana proses perhimpunan menjanjikan

¹⁸Morinosuke Kajima, *The Road to Pan-Asia* (Tokyo: The Japan Times, Ltd., 1973).

hasil-hasil yang positif. Dalam arti ini, suatu masyarakat adalah suatu proses interaksi sosial yang membangkitkan suatu sikap yang lebih intensif dan luas dan suatu praktik interdependensi, kerjasama, kolaborasi dan bahkan unifikasi.

"Komunitas" Pasifik yang berbentuk APEC, misalnya, terutama lebih dilandasi oleh kelas konsepsi yang pertama. Sejak dibentuk tahun 1989, APEC tidak berhasil mencapai persetujuan atas dua isyu, yaitu keanggotaan (terutama yang menyangkut Cina, Taiwan dan Hongkong) dan institusionalisasi. Inkorporasi Cina, Taiwan dan Hongkong ke dalam APEC sebagian besar tergantung atas persetujuan antara ketiga entitas itu. Cina tampaknya tidak berkeberatan atas partisipasi Hongkong, tetapi modalitas yang cukup memuaskan perlu pula dicari untuk Taiwan. Sulit dipastikan kapan inkorporasi itu akan terjadi selama APEC sendiri belum berhasil mengatasi isyu institusionalisasi.

Demikianpun usul EAEG Malaysia jelas-jelas dilandasi oleh kelas konsepsi yang pertama. Hal ini dapat dilihat dari tidak dimasukkannya AS dan Kanada dalam EAEG, mungkin karena mereka telah membentuk kelompok perdagangan sub-regional mereka sendiri dan tidak dianggap sebagai negara-negara dalam kawasan Asia Timur.

Dapat dikatakan bahwa landasan konseptual gagasan-gagasan kerjasama ekonomi Pasifik tampaknya tidak seragam. Adanya sub-kelompok Asia Timur, Pasifik Barat, Asia Timur Laut, atau ASEAN mungkin dapat menjelaskan lebih lanjut keragaman landasan konseptual gagasan kerjasama Pasifik. Demikianpun kebhinekaan kawasan baik dilihat dari sudut budaya, agama, politik, ekonomi, sosial maupun geografis dapat menjelaskan keragaman landasan konseptual. Seperti telah

kita lihat, landasan kerjasama yang berbeda juga akan menimbulkan implikasi-implikasi yang berbeda pula. Misalnya, organisasi seperti APEC di mana AS merupakan salah satu anggotanya oleh seorang pengamat malahan dianggap sebagai strategi baru AS di Asia. "Kecurigaan" demikian bisa dipahami bila kita mengamati lebih saksama landasan inisiatif Hawke.¹⁹ Ada anggapan bahwa AS mencoba menghindari *blue print* kerjasama ekonomi regional "buatan Amerika."²⁰ Yang jelas adalah bahwa kepentingan Washington dalam organisasi kerjasama ekonomi Pasifik terutama berasal dari pengakuan bahwa politik luar negeri AS harus mencerminkan kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang berubah di kawasan Pasifik. Jadi, landasan konseptual suatu gagasan kerjasama ekonomi Pasifik akan sangat tergantung tidak hanya atas faktor geografis, tetapi juga atas persepsi para pengambil inisiatif mengenai situasi politik, ekonomi, sosial ataupun budaya di kawasan.

Dari analisis di atas dapat dikatakan bahwa rumusan suatu kawasan secara geografis seringkali dipengaruhi oleh persepsi tentang hakikat dari struktur kawasan itu sendiri. Seperti kita lihat di muka, rumusan suatu kawasan seringkali timbul dari pemikiran-pemikiran yang fungsional daripada atas dasar pertimbangan geografis yang ketat. Dalam masalah yang disebut pertama kita berbicara mengenai kawasan fungsional. Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah bahwa setiap kawasan semacam itu memiliki anggota inti (*core*). Dikaitkan dengan kondisi kawasan Pasifik dewasa ini, hendaknya kawasan itu dilihat sebagai kawasan yang fungsional. Mungkin dalam pertumbuhannya, kawasan fung-

¹⁹Barbara Manner, "Pacific Economic Cooperation: Washington's New Asian Strategy," *JEI Report*, no. 44 (17 November 1989).

²⁰Ibid.

sional dapat mencakup wilayah geografis yang lebih luas. Dalam proses inilah hakikat fungsionalnya dapat dikompromikan dengan faktor geografis.

Kawasan Pasifik telah menyaksikan lahirnya beberapa organisasi kerjasama ekonomi seperti ASEAN, PECC, APEC atau ide EAEG. Landasan konseptual kerjasama-kerjasama itu tentu beragam. Tetapi kecenderungan yang terlihat dari kerjasama antara mereka (kecuali EAEG) tampaknya bergerak ke arah suatu kompromi. Mungkin dalam pertumbuhan kawasan di kemudian hari akan muncul kerangka kerjasama Pasifik yang luas (*Pacific region wide*). Dengan perangkat-perangkat yang telah ada (ASEAN, EAEG dan APEC), kemungkinan terbentuknya konperensi mengenai Keamanan dan Kerjasama di Asia Pasifik (CSCAP) model CSCE di Eropa perlu diamati.

Paparan bagian pertama menunjukkan bahwa dinamisme kawasan Pasifik muncul

sebagai akibat jalinan interdependensi ekonomi yang semakin erat. Interdependensi ekonomi itu sendiri dipahami sebagai akibat dari dan dilihat sebagai refleksi interaksi ekonomi yang intensif, yang mempererat ikatan di bidang perdagangan, investasi dan teknologi serta modal. Jadi teorinya adalah bahwa ikatan-ikatan seperti itu akan melipatgandakan aneka hubungan dan cenderung memaksa pemerintah dan sektor swasta mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Gagasan-gagasan mengenai kerjasama ekonomi Pasifik, terutama yang muncul dalam sepuluh tahun terakhir ini, mungkin dapat dilihat dalam kerangka teori semacam itu. Selain itu interdependensi ekonomi terjadi karena negara-negara itu sendiri membiarkan hal tersebut tumbuh berkembang. Dengan kata lain, interdependensi muncul dari kebijakan-kebijakan. Jadi lahirnya PECC, APEC atau ide EAEG secara teoretik dilandasi oleh suatu motivasi para pencetusnya untuk mengelola interdependensi ekonomi agar ia tidak dibiarkan mencari jalannya sendiri.

Kebijaksanaan Luar Negeri Jepang: Tantangan dan Inisiatif dalam Masalah Internasional

Edy PRASETYONO

BAGI Jepang, usainya perang dingin tampaknya membawa implikasi politik dan strategis yang lebih rumit. Masalah pokoknya berkisar pada bagaimanakah Jepang mengkonsepsikan peranan dan merumuskan kebijaksanaannya dalam masalah-masalah internasional.

Sebenarnya masalah di atas bukanlah sesuatu yang baru bagi Jepang, dan beberapa kali dalam perubahan-perubahan situasi internasional Jepang selalu berhasil merumuskan kebijaksanaan luar negeri yang menggambarkan perimbangan antara tuntutan kepentingan nasional (dan juga semangat pasifis dalam negeri) dan tuntutan eksternal terutama dari Amerika Serikat. Formulasi tersebut dapat kita lihat dari lahirnya Doktrin Yoshida pada periode pasca Perang Dunia II, tiga prinsip non-nukir pada tahun 1960-an, kebijaksanaan *economic security* dan *omnidirectional diplomacy* pada pertengahan tahun 1970-an sebagai akibat oil shock, *comprehensive security concept* pada tahun 1980-an, dan kebijaksanaan *International Cooperative Initiative* pada tahun 1988.

Kini masalah peranan dan kebijaksanaan luar negeri Jepang kembali menjadi sorotan publik baik dari dalam negeri maupun masyarakat internasional. Di dalam negeri masalah di atas melahirkan perdebatan sengit di kalangan politisi dan masyarakat Jepang. Sementara itu dalam masyarakat internasional dewasa ini muncul tekanan yang lebih besar agar Jepang memainkan peranan yang lebih aktif dalam masalah-masalah internasional termasuk masalah keamanan (*security*), sepadan dengan kekuatan ekonominya.¹

Sejauh yang menyangkut aspek ekonomi, hampir semua pihak sepakat bahwa Jepang telah memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Bahkan bantuan ekonomi Jepang kemudian dikaitkan

¹Lihat misalnya himbauan Perdana Menteri Swedia Ingvar Carlson agar Jepang memainkan peranan dalam pasukan perdamaian PBB, *Mainichi Daily News* (18 Maret 1991); Kenichi Koyama, "Time for Japan's Initiative," *The Japan Times* (5 Maret 1991); lihat pula tulisan seorang anggota Parlemen Jepang dan Direktur National Defense Division LDP (Liberal Democratic Party) Koji Kazikawa, "Create An Asian Peacekeeping Force," *The Japan Times* (17 April 1991).

dengan masalah stabilitas dan keamanan. Dari sinilah lahir istilah bantuan strategis (*strategic aid*). Konsep ini menunjuk pada kebijaksanaan luar negeri Jepang melalui saluran hubungan ekonomi sebagai hasil koordinasi dengan Amerika Serikat dalam persaingan global dengan Uni Soviet. Dimensi keamanan dan strategis dari *strategic aid* direalisir dalam bentuk bantuan kepada *countries bordering conflict* dan *areas which are important to the maintenance of the peace and stability of the world*.² Karena itu aktivitas ekonomi Jepang tidak semata-mata bersifat ekonomis, melainkan juga sebagai salah satu cara untuk menyumbang stabilitas dan keamanan internasional. Perkembangan terakhir di mana pemerintah Jepang mengusulkan agar ODA diberikan dengan mempertimbangkan tingkat belanja militer pada negara sasaran menunjukkan dimensi politik dan keamanan kebijaksanaan ekonomi Jepang terhadap negara-negara penerima.³

Tekanan internasional dan perdebatan dalam politik domestik tentang peran internasional Jepang mempertanyakan kembali diplomasi ekonomi Jepang dalam masalah politik dan keamanan internasional. Krisis Teluk menunjukkan bahwa kekuatan dan diplomasi ekonomi saja tidak cukup. Banyak kritik terhadap Jepang, walaupun Tokyo telah memberikan sumbangan sebanyak US\$13 miliar; suatu jumlah yang melebihi jumlah total ODA Jepang pada tahun 1990. Kuwait, misalnya, menyatakan terima kasih tidak kepada Jepang tetapi kepada negara-negara yang telah membebaskan negara tersebut dari pendudukan Irak. Kuwait menghargai sikap Jepang yang mengirim kapal penyapu ranjau ke Teluk. Poll pendapat yang dilakukan oleh ABC

²Dennis T. Yasutomo, *The Manner of Giving: Strategic Aid and Japanese Foreign Policy* (Toronto: D.C. Heath and Company, 1986), hal. 41-57.

³Foreign Bureau Information Service/East Asia, (6 Maret 1991), hal. 8; *The Japan Times* (10 Mei 1991).

News dan *Washington Post* menunjukkan bahwa 30% masyarakat AS kehilangan respek terhadap Jepang.⁴ Bahkan Jepang tidak diikutsertakan secara langsung dalam pembicaraan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis dan Jerman untuk membahas langkah-langkah bersama menghadapi Irak selama krisis berlangsung.⁵ Yang lebih penting adalah bahwa Krisis Teluk menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat tajam antara kekuatan ekonomi dan kelemahan untuk mengembangkan inisiatif dalam masalah internasional. Tampaknya tidak ada pilihan lain bagi Jepang kecuali memperkuat kembali hubungan dengan Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Kaifu ke Amerika Serikat baru-baru ini.

Jika saat ini tampak ada pemikiran baru di mana kekuatan dan diplomasi ekonomi tidak cukup untuk meningkatkan status internasional Jepang, dan juga tidak cukup untuk memberikan sumbangan bagi ketabilan dan keamanan internasional, maka pertanyaannya adalah bagaimakah kebijaksanaan luar negeri Jepang dalam masalah stabilitas dan keamanan internasional?

Sekilas tentang Perkembangan Kebijaksanaan Luar Negeri Jepang

Sampai dengan awal tahun 1970-an asumsi kebijaksanaan luar negeri Jepang adalah bahwa dukungan dan perlindungan AS terhadap keamanan Jepang sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Dalam waktu yang sama Jepang memusatkan perhatian pada masalah ekonomi. Sebagai konsekuensinya Jepang akan mendukung

⁴ *Time* (18 April 1991), hal. 20; Ayako Doi, "'\$13 Billion Should Buy Japan A Little Respect,'" *Asian Wall Street Journal* (21 Maret 1991).

⁵ *Mainichi Daily News* (2 Maret 1991).

tujuan politik luar negeri AS secara global. Di bawah perlindungan AS ini Jepang menjalankan politik luar negeri *seikei bunri* yaitu pemusatkan pada masalah-masalah ekonomi dan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam masalah politik dan keamanan.⁶

Perubahan situasi internasional dan kebijaksanaan strategi AS pada awal tahun 1970-an mempertanyakan asumsi-asumsi positif yang menguntungkan Jepang. Jepang tidak lagi dapat menggantungkan diri pada situasi internasional yang *taken for granted* karena perlindungan AS. Doktrin Nixon pada tahun 1969 melalui mana AS mengurangi kekuatan militer secara global sebanyak 1.200.000 pasukan dan dari Asia Pasifik sebanyak 600.000 pasukan memang mempengaruhi politik luar negeri Jepang. Lalu disusul dengan pendekatan Nixon pada Beijing pada tahun 1971 tanpa memberi tahu Jepang terlebih dahulu dan *oil shock* pada tahun 1973.

Perkembangan-perkembangan di atas memaksa Jepang untuk merumuskan kembali kebijaksanaan luar negeri dengan tetap memusatkan pada pembangunan dan kepentingan ekonomi Jepang. Kebijaksanaan *seikei bunri* kemudian dimodifikasi ke dalam kebijaksanaan *zenhoi heiwa gaiko* (*omnidirectional peaceful diplomacy*), yaitu menjalin persahabatan sebanyak mungkin dengan negara lain, dan tidak mengambil langkah-langkah politik yang membahaya-

⁶Kebijaksanaan *seikei bunri* adalah perwujudan dari *legacy* Yoshida Doktrin pada pasca Perang Dunia II yang secara garis besar menyatakan bahwa tujuan utama nasional Jepang adalah pembangunan ekonomi, dan bahwa Jepang harus mempertahankan tingkat kekuatan militer yang kecil; menghindarkan diri dari masalah politik dan strategi, dan bahwa tujuan jangka panjang keamanan Jepang tergantung pada kehadiran dan perlindungan militer AS. Lihat Tsueno Akaha, "Japan's Security Policy After US Hegemony," *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 18/3 (Winter 1989), hal. 437.

kan kepentingan ekonomi Jepang. Karena prinsip ini Jepang lebih pro negara-negara Arab dalam krisis minyak tahun 1973. Untuk pertama kali pada tahun tersebut Jepang berbeda sikap dengan AS dalam masalah internasional. Istilah *economy security* menjadi sangat populer dalam periode Perdana Menteri Takeo Fukuda ini. Karakteristik menonjol dalam pendekatan ini adalah sikap *passive, wait and see*.⁷

Jepang mulai memberi perhatian pada masalah politik dan keamanan dalam politik luar negerinya ketika ia melihat kemunduran secara relatif kekuatan ekonomi dan supremasi militer Amerika Serikat. Sementara itu pada saat yang sama ancaman militer Uni Soviet dan sekutunya dirasakan makin meningkat. Di samping Doktrin Nixon pada tahun 1969, persepsi kemunduran kekuatan militer Amerika Serikat juga diperkuat oleh kegagalan Washington dalam Perang Vietnam 1975, krisis Iran tahun 1978, invasi Vietnam ke Kamboja 1978, invasi Uni Soviet ke Afghanistan 1979, serta keterlibatan pasukan Kuba di negara-negara Afrika pada akhir tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1980. Kalangan politisi dan masyarakat Jepang mempertanyakan tentang kepemimpinan dan komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan para sekutunya, termasuk Jepang. Suatu kelompok studi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ohira pada tahun 1980 menyatakan dalam laporannya:

In considering Japan's security, the most fundamental change that took place in the international situation in the 1970s is the termination of clear American supremacy in both military and economic spheres.⁸ ...

⁷Edward A. Olsen, *US-Japan Strategic Reciprocity: A Neo Internationalist View* (Stanford University Press: California, 1985), hal. 10; Reinhard Drifte, *Japan's Foreign Policy* (Royal Institute of International Affairs, tanpa tahun), hal. 38-39.

⁸Report on Comprehensive National Security (Tokyo: The Comprehensive National Security Study Group, 2 Juli 1980), hal. 7.

US military power can no longer able provide its allies and friends with nearly full security and it has become necessary for US friends and allies to strengthen their self-help efforts particularly in the area of conventional forces.⁹ ...

Laporan tersebut selanjutnya menyimpulkan bahwa Pax Americana telah berakhir dan dimulainya *era peace through shared-responsibility*.¹⁰ Laporan serupa yang dihasilkan oleh kelompok studi di bawah Nakasone pada tahun 1985 juga memberikan pandangan yang sama tentang perubahan kekuatan AS serta konsekuensinya bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan memperhatikan perkembangan di atas laporan tersebut kemudian menelurkan dua rekomendasi kebijaksanaan luar negeri Jepang. Pertama, bahwa *omnidirectional diplomacy* tidak mungkin dapat dipertahankan karena pihak Barat dan Amerika Serikat menuduh bahwa kebijaksanaan tersebut sebagai sikap oportunisme Jepang dan melepaskan tanggung jawab terhadap stabilitas internasional. Sebagai salah satu sekutu AS, adalah tidak mungkin bagi Jepang untuk menjalankan *omnidirectional diplomacy* dan menjaga jarak yang sama dengan kedua superpower. Terlebih Perjanjian Persahabatan dan Perdamaian Tokyo-Beijing tahun 1978 yang jelas ditujukan kepada Uni Soviet tidak akan menjadikan Jepang netral dalam persaingan global. Dengan meningkatnya ancaman Soviet pada saat itu, *omnidirectional diplomacy* hanya akan membuat Jepang terisolasi. Terlebih pada saat laporan tersebut dibuat AS sedang gencar menekan Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

Kedua, kebijaksanaan keamanan nasional Jepang harus bersifat komprehensif,

⁹ *Ibid.*, hal. 7-8.

¹⁰ *Ibid.*

dan tidak semata-mata diukur dari patokan-patokan militer. Karena itu pula ancaman keamanan nasional tidak semata-mata berupa ancaman militer. Dengan demikian aktivitas diplomasi untuk melindungi kepentingan keamanan Jepang dapat dilakukan dengan berbagai jalan misalnya dengan memberi bantuan ekonomi kepada negara lain untuk menjaga kestabilan kawasan.

Pada akhirnya memang kebijaksanaan komprehensif Jepang tidak memberikan batasan atau keseimbangan yang jelas antara peran kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa kebijaksanaan komprehensif Jepang memberi ruang gerak yang lebih besar pada peningkatan kekuatan militer. Bagi Jepang tampaknya kebijaksanaan tersebut merupakan jawaban terbaik untuk menghadapi tekanan Amerika Serikat tentang *burden-sharing* dan juga untuk mencegah kemungkinan munculnya reaksi negatif dari negara-negara Asia yang pernah mengalami penjajahan Jepang. Cina misalnya menyatakan mendukung kebijaksanaan komprehensif Jepang dalam masalah keamanan. Di samping itu orientasi pasifis yang sangat kuat di Jepang harus diperimbangkan oleh para pembuat keputusan kebijaksanaan luar negeri Jepang sejauh kebijaksanaan tersebut menyangkut masalah keamanan. Pencantuman istilah *alianси* di akhir komunikasi Jepang-Amerika Serikat sebagai hasil kunjungan Suzuki ke AS pada tahun 1981 menimbulkan protes keras di Jepang yang mengakibatkan mundurnya Menteri Luar Negeri Ito adalah contoh kuatnya orientasi pasifis di Jepang.¹¹

Sejak itu pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri Jepang banyak menggunakan saluran ekonomi seperti ODA, IMF, World Bank untuk memberikan sumbangan bagi kestabilan dan keamanan internasional.

¹¹ Olsen, *op. cit.*, hal. 24-25.

Faktor Amerika Serikat

Apakah karena para pembuat kebijaksanaan luar negeri Jepang harus mempertimbangkan orientasi pasifis masyarakat Jepang, dan apakah karena Jepang harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya reaksi negatif dari negara-negara Asia jika Jepang meningkatkan kekuatan militernya, yang pasti adalah sampai saat ini masalah keamanan dalam kebijaksanaan luar negeri Jepang masih sangat sensitif, sejauh hal itu dilakukan melalui jalan non-ekonomi.

Demikian pula masih belum jelas apakah sikap yang ditempuh Jepang di atas merupakan penyebab lemahnya inisiatif mengembangkan kebijaksanaan luar negeri ataukah justru sikap di atas ditujukan untuk membentuk suatu model diplomasi gaya Jepang. Tidak ada faktor tunggal yang memberikan penjelasan tentang hal di atas. Dari pihak Amerika Serikat sendiri juga tidak ada jawaban yang pasti tentang apa yang Washington inginkan dari Jepang jika memang Jepang akan mengembangkan peranan keamanan dengan meningkatkan kekuatan militernya dalam rangka berbagi beban (*burden-sharing*). Nakasone pada tahun 1977 menyatakan bahwa:

Some American argue that Japan is not doing enough for its own defense. Other American argue that a step up in Japanese defence capabilities would lead to a revival of militarism. Japanese are set a loss to know what to do. One side says get off the bus; the other side says get on.¹²

Pada tahun 1987 Kongres AS meminta Jepang untuk mengalokasikan 3% dari GNP-nya untuk belanja pertahanan.¹³

¹²Yasuhiro Nakasone, "Japan Confronts the Future," A paper presented at a meeting of the Sino-Soviet Institute, George Washington University, 26 September 1977, sebagaimana dikutip oleh Olsen, *op. cit.*, hal. 112.

¹³House Resolution, 18 Juni 1987 dalam Hisahiko Okazaki, "The Restructuring of the U.S.-Japan

Okazaki, seorang pengamat masalah luar negeri Jepang, mempertanyakan apa yang diinginkan oleh AS dari Jepang dengan anggaran militer 3% dari GNP. Selanjutnya dikatakan seandainya anggaran militer Jepang adalah 2% dari GNP sampai dengan tahun 2000 anggaran tambahan militer akan terakumulasi US\$300 miliar yang berarti mampu membangun 10 kapal induk dengan teknologi nuklir mutakhir. Tetapi jika ditanyakan kepada AS apakah demikian yang mereka inginkan, mereka akan menyatakan tidak.¹⁴

Jadi banyak variabel untuk menjelaskan mengapa Jepang tetap memberi tekanan pada diplomasi ekonomi dalam kerangka *comprehensive security concept*, walaupun konsep ini sendiri juga memberi peluang peningkatan peranan kekuatan militer dalam kebijaksanaan luar negeri Jepang, seperti yang dilakukan oleh Suzuki dengan kebijaksanaan perlindungan 1.000 mil laut dan kebijaksanaan Nakasone yang memecah tradisi anggaran belanja militer dalam batas 1% GNP. *Japan Diplomatic Blue Book 1989* menggambarkan penekanan diplomasi gaya Jepang untuk memberi sumbangan pada perdamaian dan keamanan internasional.¹⁵

Alliance," *Japan Review of International Affairs*, vol. 2/2 (Fall/Winter 1988), hal. 125.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 126.

¹⁵Pernyataan dalam *Japan Diplomatic Blue Book 1989* ini tampaknya merupakan jawaban Jepang atas tekanan Kongres AS agar para sekutu menanggung *burden-sharing* yang lebih besar. Congressional Report 1988 mengkritik Jepang dan negara-negara Eropa karena tidak memberikan kontribusi keamanan internasional sepadan dengan kekuatan ekonomi mereka. Secara otentik laporan tersebut menyatakan: "Alliances as a whole should play larger role in deciding whether they view US troops and bases in their territories as necessary for defence and, if so, should share or pay for all of additional cost incurred by the United States in stationing its forces overseas," *Interim Report of the Defense Burdensharing Panel of the Committee on Armed Service*, House of Representative, One Hundredth Con-

There is a wide spread opinion in the United States, especially in the Congress, that Japan and other allies should share the burden for the peace and prosperity of the world. Japan believes that the allies can contribute to the peace and prosperity of the world not in *uniform way* (cetak miring dari penulis) but that it is important for each to fulfill its responsibility from its *own standpoint* not only in defense but also in many other areas.¹⁶

Sejak itu apa yang disebut tanggung jawab dan kontribusi Jepang terhadap perdamaian dan keamanan internasional dirumuskan dalam kebijaksanaan *Japan Contributing to the World* dengan mempromosikan *International Cooperation Initiative* pada tahun 1988 yang terdiri dari tiga pilar yaitu: kerjasama untuk perdamaian; perluasan dan peningkatan ODA; dan kerjasama kebudayaan.¹⁷

Terlepas dari persoalan bahwa kebijaksanaan di atas ditujukan untuk melindungi kepentingan Jepang, terutama kepentingan ekonomi, yang bersifat global, tampaknya karena kebijaksanaan itu pula yang menjadikan AS tetap melakukan tekanan terhadap Jepang. Alexander Haig pernah menyatakan bahwa AS tidak melihat langkah-langkah ekonomi dan politik Jepang sebagai pengganti kontribusi dalam bidang pertahanan dalam rangka berbagi beban. Pada pemerintahan Reagan memang terjadi penurunan intensitas tekanan AS terhadap kebijaksanaan luar negeri Jepang, karena AS harus mendengarkan kekhawatiran negara Asia terutama Asia Timur dan Asia Tenggara. Kedua negara kemudian lebih menekankan aspek peran (*role*) dan misi (*mission*) daripada sekedar ukuran

gress, Second Session, Agustus 1988 (Washington, D.C.: U.S. Gogernment Printing Office, 1988), hal. 47, sebagaimana dikutip oleh Akaha, "Japan's Security Policy ...," hal. 436.

¹⁶ *Japan Diplomatic Blue Book 1989* (Tokyo: Ministry of Foreign Affairs), hal. 61.

¹⁷ *Ibid.* Lihat pula teks pidato Toshiki Kaifu pada Sidang Diet ke-114 tanggal 10 Februari 1989.

anggaran belanja militer dalam kerangka berbagi beban.¹⁸ Tetapi sejalan dengan adanya friksi ekonomi akibat defisit perdagangan AS terhadap Jepang, Tokyo merasa tidak pernah lepas dari tekanan AS dalam menentukan kebijaksanaan luar negerinya. Selama Krisis Teluk berlangsung seorang anggota Kongres AS menyatakan: "Jika Jepang tergantung AS dalam masalah keamanan, mereka harus membayar untuk itu (biaya operasi militer AS di Teluk)."¹⁹ Menanggapi reaksi Jepang terhadap tekanan AS, seorang pengamat baru-baru ini menyebut Jepang sebagai negara yang *unik* yang memberi justifikasi atas kebijaksanaan keamanannya bukan karena ancaman musuh (Uni Soviet), melainkan untuk melindungi dirinya dari pelindungnya, yaitu Amerika Serikat.²⁰ Friksi ekonomi menjadi saling terkait dengan tekanan AS dalam masalah kebijaksanaan keamanan dan politik luar negeri Jepang. Dari sini muncul tuduhan terhadap Jepang sebagai pembonceng gratis (*free rider*).

Tuduhan *pembonceng gratis* menuduh Jepang tidak memberi sumbangan pada usaha menjaga stabilitas dan keamanan internasional sepadan dengan kekuatan ekonominya. Karena konsep *security comprehensive* dan *International Cooperation Initiative* dalam prakteknya banyak menekankan kekuatan ekonomi, misalnya melalui bantuan ODA, maka hal itu dipandang tidak cukup sebagai kontribusi Jepang dalam masalah stabilitas dan keamanan.²¹ Penjelasan-penjelasan stra-

¹⁸ Olsen, *op. cit.*, hal. 22.

¹⁹ *Asahi Evening News* (22 Februari 1991).

²⁰ M. Kase, "Japan Pledge of Appeasement," *Asian Wall Street Journal* (13 Februari 1991).

²¹ Menunjuk kasus penyerbuan Kuwait oleh Irak Deputy Menteri Pertahanan AS Donald J. Aswood menyatakan: "Kuwait was economically secure, but poor armed, and proved no match for its heavily armed neighbor. Similarly, Japan's economic power alone is

tegis dan keamanan atas dasar ancaman Soviet memang mendapatkan validitas.²² Karena menurut Jepang, pihak AS sendiri tidak memberi jawaban tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan dari Jepang dengan berbagi beban, maka tuduhan *pembonceng gratis* pun pada akhirnya menjadi tuduhan yang fleksibel.

Menjadi menarik di sini untuk membahas argumen *pembonceng gratis*. Berikut penulis paparkan data tentang tingkat belanja pertahanan per kapita Jepang dan negara-negara NIC (lihat tabel). Data diambil pada periode 1981-1984 karena pada periode tersebut tekanan *burden-sharing* dan tuduhan pembonceng gratis sangat kuat. Data tersebut menunjukkan fakta bahwa tingkat belanja pertahanan Jepang sangat rendah yaitu di bawah 1% dari GNP. Sementara itu Korea, Taiwan, Singapore membelanjakan rata-rata lebih dari 5% dari GNP mereka untuk anggaran pertahanan. Dilihat dari sudut beban per kapita untuk anggaran pertahanan, Jepang juga terendah di antara mereka, yaitu kurang dari US\$100.

Namun kita harus cermat memandang Jepang sebagai *pembonceng gratis*. Argumen *pembonceng gratis* mengasumsikan bahwa kemajuan ekonomi Jepang dicapai karena tingkat belanja militer yang sangat rendah dan dalam waktu yang sama ia menikmati perlindungan keamanan dari AS.

no guarantee of security. While there are many lessons to be learned from this still unfolding crisis, one is very clear. In today's world, economic power alone is not enough to guarantee security. Security still requires military strength," disampaikan pada Tokyo-American Club, Tokyo, 4 Oktober 1990.

²²Lihat Richard H. Solomon, "The U.S. and Japan Between Two Eras: An Evolving Partnership," teks pernyataan yang disampaikan pada The Foreign Correspondents Club, Tokyo 10 April 1990. Lihat pula pidato Deputy Menteri Pertahanan AS Donald J. Aswood, "The U.S.-Japan Security Relationship in A Changing World," pada Tokyo-American Club, Tokyo 4 Oktober 1990.

TINGKAT BELANJA PERTAHANAN
PER KAPITA (DALAM US\$) DAN RASIO
TERHADAP GNP

	1981	1982	1983	1984
Jepang	88,17 (0,91%)	86,77 (0,93%)	96,17 (0,98%)	98,66 (0,99%)
Korea	113,40 (6,29%)	131,29 (7,56%)	105,93 (5,75%)	106,43 (5,40%)
Taiwan	194,59 (7,82%)	179,62 (7,32%)	173,36 (6,81%)	171,79 (6,09%)
Singapura	294,83 (5,70%)	340,71 (5,63%)	423,92 (6,52%)	402,30 (5,83%)

Sumber: Diolah dari *Military Balance 1981-1986* dan *Defense of Japan 1990* (Tokyo: Japan Times).

Ini berarti ada korelasi antara tingkat kemajuan ekonomi dengan tingkat belanja pertahanan. Data tersebut menunjukkan kelemahan argumen *pembonceng gratis* untuk menganalisis kemajuan ekonomi Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura pada tahun 1981-1984, meskipun belanja pertahanan per kapita dan rasio terhadap GNP jauh lebih besar daripada Jepang. Jadi memandang kemajuan ekonomi Jepang dalam korelasinya dengan belanja pertahanan yang rendah karena perlindungan keamanan Amerika Serikat masih diperlakukan. Memang tidak dapat ditolak bahwa rasio belanja pertahanan Jepang terhadap GNP adalah terendah di antara negara-negara maju. Tetapi mengapa Jepang yang menjadi sasaran tuduhan *pembonceng gratis*, sementara Jerman, Taiwan, dan Korea Selatan juga mengalami kemajuan ekonomi pesat dan juga mendapatkan perlindungan keamanan dari AS dan bukankah secara absolut anggaran

belanja militer Jepang sejajar dengan Inggris, Perancis, dan Jerman? Hubungan keamanan Jepang-AS seharusnya tidak dipandang memberi keuntungan sepihak kepada Jepang. Dari hubungan tersebut Amerika Serikat memperoleh *privilege* menghadapi Uni Soviet.

Dengan demikian sulit bagi kita menentukan faktor untuk menjelaskan mengapa hal di atas terjadi. Namun kita dapat menelusuri kembali bahwa tekanan berbagi beban dan argumen *peimboceng gratis* adalah karena kesulitan ekonomi AS akibat defisit yang sebagian besar disebabkan oleh perdagangannya dengan Jepang dan dalam waktu yang sama Jepang dipandang tidak menjalankan prinsip dagang liberalisme. Ini bukan saja merupakan masalah interaksi antara dua negara, namun yang lebih penting adalah masalah tersebut telah menjadi konsumsi politik domestik AS. Suatu poll pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ancaman ekonomi Jepang dipandang lebih besar daripada ancaman militer Uni Soviet.²³ Jika masalah ini telah menjadi konsumsi politik domestik AS, terutama dalam Kongres, maka isyu perdagangan antara AS dan Jepang akan terus mempunyai implikasi politik dan strategis dalam hubungan kedua negara tersebut.

Inisiatif Jepang

Membicarakan inisiatif Jepang dalam masalah internasional yang dewasa ini menjadi sorotan publik baik dari dalam negeri maupun masyarakat internasional harus melihat tiga kenyataan. Pertama, Jepang adalah *superpower* ekonomi yang mem-

punyai kepentingan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas global. Kedua, sentimen pasifis dan konstitusi damai. Secara normatif konstitusi damai dan semangat pasifis adalah sangat ideal. Namun kalaupun mereka dianggap kurang relevan karena hubungan internasional di-dominasi oleh mazhab realis, setiap usaha revisi konstitusi akan dipandang sebagai bangkitnya militarisme Jepang baik oleh masyarakat domestik Jepang maupun negara-negara Asia. Karena itu kecil kemungkinan adanya revisi konstitusi. Kemungkinan yang paling realistik adalah menafsirkan kembali konstitusi. Ketiga, Jepang terikat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

Dengan melihat kondisi-kondisi di atas tampaknya kontribusi dan inisiatif Jepang pada masa pasca perang dingin akan berpusat pada tiga opsi.²⁴ Pertama, inisiatif dalam PBB. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II Jepang telah membentuk kesatuan khusus penjaga perdamaian di bawah PBB. Ketiga partai politik (LDP, SDPJ, dan Komeito) telah mencapai kesepakatan mengenai hal di atas. Selain itu Jepang saat ini sedang merintis jalan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berusaha menghilangkan kata "enemy" dalam Piagam PBB. Kata "enemy" menunjuk pada negara-negara lawan sekutu dalam Perang Dunia II, yaitu Jepang dan Jerman. Usaha ini mendapat dukungan Perdana Menteri Australia Bob Hawke.²⁵ Usaha Jepang untuk menjadi anggota Dewan Keamanan dikemukakan oleh Duta Besar Jepang untuk PBB Yoshio Hatano. Dengan keras Hatano menyatakan: "We don't want people to make policy on

²³Mc. Cormack (Under Secretary of State for Economic Affairs of the U.S.), "Japan Must Re-evaluate Its World Role," pidato pada N. Carolina - Japan Forum, Tokyo, 1 November 1990.

²⁴Terumasa Nakanishi, "Options in An Age of International Initiatives," *Economic Eye*, vol. 12/1 (Spring 1991), hal. 6-7.

²⁵Stanley Meisler, "Japan's Thorny U.N. Bid," *Japan Times* (20 Mei 1991).

these (international) matters and send us bill. Forty six years after the end of the Second World War, Security Council should reflect the present reality. We are promoting the consensus that it is logical and reasonable that Japan be granted a special place on the Security Council.”²⁶ Walaupun masih dipertanyakan apakah Dewan Keamanan akan menjadi lebih efektif untuk memecahkan masalah internasional setelah masuknya Jepang, usaha Jepang di atas menggarisbawahi inisiatif yang lebih aktif di PBB dan memunculkan debat tentang perlu tidaknya PBB melakukan reformasi struktural setelah Perang Dingin berakhir.

Kedua, Jepang tetap mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat. Sepanjang Jepang mempertahankan komitmen pada konstitusi damai, Jepang tetap menemukan relevansi aliansi dengan Amerika Serikat. Karena aliansi ini, Jepang tidak melakukan remiliterisasi dalam skala besar yang berorientasi untuk agresi dan invasi. Sebaliknya karena konstitusi, aliansi diterima sebagai kekuatan penangkal agresi dari luar. Jadi logikanya kalau Jepang meninggalkan salah satu dari mereka, maka adalah tidak mungkin mempertahankan eksistensi yang lain. Ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan aliansi Jepang-AS, Jepang harus merevisi atau menafsirkan kembali konstitusi untuk memberi peluang keterlibatan militer Jepang dalam masalah internasional. Namun sekali Jepang menempuh jalan ini, aliansi Jepang-AS menjadi kurang relevan. Belum lagi Tokyo harus menghadapi reaksi negara-negara Asia Timur dan Tenggara.

Yang menjadi persoalan bagi Jepang adalah bahwa aliansi Jepang-AS tidak mempunyai dimensi global dalam masalah keamanan internasional. Lebih khusus aliansi tersebut tidak memberikan kerangka

yang jelas tentang usaha Jepang untuk memelihara kepentingan keamanannya di luar batas nasional. Kelihatannya yang diperlukan oleh Jepang pada masa mendatang bukanlah merevisi aliansi tersebut, melainkan memberikan penafsiran yang fleksibel sehingga aliansi tersebut mempunyai signifikansi global.²⁷ Namun juga tidak mungkin mempertahankan aliansi tersebut tanpa memperhatikan kepentingan Amerika Serikat. Jadi harus ada kondisi di mana Amerika Serikat tetap memandang perlu eksistensi aliansi. Kondisi-kondisi itu adalah pertama, pemeliharaan kepentingan keamanan dan ekonomi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Kedua, kesediaan pihak Jepang untuk memberikan *share* yang lebih besar dalam kerangka berbagi beban yang lebih luas. Karena Asia Pasifik tumbuh menjadi kawasan ekonomi yang maju, kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini akan lebih cenderung didefinisikan dalam kerangka kepentingan ekonomi. Ini berarti Jepang harus memberikan perhatian serius pada masalah ekonomi dalam hubungan Jepang-AS. Dalam kaitan ini tampaknya Jepang harus menata kembali hubungan dagang dengan Amerika Serikat.

Opsi ketiga adalah memberikan perhatian yang lebih besar pada kawasan Asia, khususnya Asia Pasifik. Perang Dingin telah berakhir dibarengi dengan munculnya Jepang sebagai superpower ekonomi. Perkembangan ini berjalan bersamaan dengan semakin pentingnya peran Asia Pasifik bagi kepentingan ekonomi Jepang, terutama kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Karena itu ada dorongan yang bersifat imperatif pada pihak Jepang untuk memberikan sumbangsih terhadap pemecahan konflik-konflik regional di kawasan ini, seperti masalah Kamboja dan Semenanjung Korea.

²⁶Ibid.

²⁷Masashi Nishihara, "New Roles for the Japan-U.S. Security Treaty," *Japan Review of International Affairs*, vol. 5/1 (Spring/Summer 1991), hal. 34-35.

Untuk keperluan ini Jepang tampaknya harus memberikan rumusan komitmen dan visi yang jelas pada negara-negara Asia, terutama dalam hal bantuan pembangunan ekonomi. Misalnya pembukaan pasar di Jepang bagi komoditi luar negeri harus dilakukan bukan semata-mata karena tekanan Amerika Serikat, tetapi yang lebih penting sebagai langkah untuk memperkuat pentingnya Jepang bagi Asia.

Kebijaksanaan di atas sebenarnya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Jepang untuk menempatkan dirinya di kawasan Asia. Harus diakui sebagai kenyataan bahwa trauma masa lalu akibat pendudukan Jepang masih mewarnai persepsi Asia terhadap Jepang. Selama Perang Dingin trauma sejarah di atas "dikalahkan" oleh pertentangan liberalisme dan komunisme. Dalam hubungan kebijaksanaan Asia ini kita dapat menafsirkan pernyataan Kaifu di Singapura tentang kesalahan Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara, sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Asia. Terlebih lagi jika pada periode yang akan datang Amerika Serikat harus mengurangi kehadirannya di kawasan Asia. Dalam kaitan ini kita , dapat menilai bagaimana jelinya Malaysia ketika mengajak Jepang untuk bergabung dalam kerjasama ekonomi Asia Timur (*East Asian Economic Group*). Usulan Malaysia tersebut tidak semata-mata berimplikasi ekonomi. Usul itu merupakan kekuatan untuk tawar-menawar dengan Jepang. Jika Jepang ingin mengembangkan inisiatif politik untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Asia Timur, serta ingin memperkuat pentingnya Jepang bagi Asia, ajakan Malaysia tampaknya tidak dapat begitu saja diabaikan oleh Jepang. Karena itu sampai saat ini belum ada jawaban resmi dari Pemerintah

Jepang apakah Jepang akan setuju atau tidak menjadi anggota EAEG.

Penutup

Pada periode mendatang kita akan menyaksikan peran internasional Jepang yang makin meningkat. Namun untuk keperluan ini kecil kemungkinannya Jepang akan melakukan revisi konstitusi, walaupun seandainya peran internasional tersebut disertai dengan pengiriman pasukan bela diri, yang selama ini masih merupakan isu kontroversial. Eksistensi aliansi Jepang-AS akan tetap dipertahankan. Sementara itu pentingnya kawasan Asia akan mendorong Jepang untuk lebih memberi perhatian pada kawasan ini, baik untuk memberikan sumbang bagi pemecahan masalah-masalah politik dan konflik-konflik regional, maupun bagi pembangunan ekonomi. Masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara penafsiran yang lebih luas atas aliansi Jepang-AS dengan semakin pentingnya peran kawasan Asia bagi Jepang. Sejauh Jepang dan negara-negara Asia mempunyai persepsi dan kepentingan yang sama terhadap Amerika Serikat, tidak sulit tugas yang dihadapi oleh para pembuat kebijaksanaan luar negeri Jepang. Namun jika persepsi dan kepentingan mereka tidak sama, Jepang perlu membuat keseimbangan. Perlu diperhatikan bahwa pada periode yang akan datang Jepang tidak akan menikmati hubungan yang sama dengan Amerika Serikat seperti yang terjadi pada periode Perang Dingin. Dengan demikian pendekatan regionalis Jepang terhadap negara-negara Asia tidak perlu dipandang sebagai kebijaksanaan yang melengkapi hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat.

Transformasi Peranan Strategis RRC: Menuju Skenario "Dominant Power"?

Rizal SUKMA

BERBAGAI perubahan yang terjadi dalam politik internasional belakangan ini, terutama perubahan dalam hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet, telah mengubah karakter pola hubungan di kawasan Asia-Pasifik. Berakhirnya konfrontasi dan persaingan militer antar *superpower*, dan asumsi bahwa kedua superpower secara perlahan mulai mengurangi peranan dan kehadiran mereka di kawasan ini, akan mengubah struktur internasional Asia-Pasifik dari bipolar ke multipolar. Cina, Jepang, dan mungkin juga India, akan memperoleh status sebagai kekuatan utama (*major power*), sementara status AS dan US sebagai superpower akan menurun namun tetap sebagai dua kekuatan Asia-Pasifik utama. Hal ini berarti, percaturan politik di Asia-Pasifik akan ditandai oleh terbentuknya sistem empat kekuatan besar dengan sejumlah kekuatan yang lebih kecil.¹

¹Struktur kekuatan seperti ini, sebenarnya sudah sering digambarkan oleh para analis sejak awal dekade 1980-an. Namun, selama dekade itu AS dan US lebih tepat dilihat sebagai *superpower* ketimbang *major power*. Peranan mereka di Asia-Pasifik waktu itu,

Salah satu hal yang mencemaskan sebagian negara di Asia-Pasifik karena perubahan itu adalah kemungkinan tampilnya RRC sebagai kekuatan utama yang akan mendominasi kawasan Asia-Pasifik, terutama Asia Tenggara. Dari sudut keinginan, kuat dugaan bahwa RRC sejak dahulu menyimpan ambisi untuk menjadi sebuah kekuatan dunia (*world power*). Dari sudut kekuatan militer, timbul pula kecurigaan bahwa Cina akan terus meningkatkan kekuatan militernya untuk mendukung keinginannya itu. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua hal tersebut, tulisan ini akan menelaah kemungkinan terwujudnya ambisi RRC untuk menjadi kekuatan utama itu.

lebih dominan ketimbang peranan Jepang atau RRC. Dengan adanya perkembangan sekarang ini, meskipun secara militer dan ekonomi masih terdapat perbedaan, status politik dan pengaruh kedua superpower mulai berkurang. Sementara, RRC dan Jepang, dan mungkin juga India, semakin berpeluang untuk tampil sebagai aktor-aktor utama di kawasan. Lihat misalnya, Rizal Sukma, "Jakarta-Beijing Relations and Security Challenges in Southeast Asia," *The Indonesian Quarterly*, vol. XVIII, no. 4 (Fourth Quarter, 1990), hal. 280-286.

Untuk tujuan demikian, secara analitik tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga pokok bahasan. Bagian pertama akan menelaah kecenderungan transformasi peranan RRC di Asia-Pasifik. Bagian kedua akan memuat penilaian tentang peluang-peluang yang dimiliki Cina untuk tampil sebagai *world power*. Bagian ketiga akan memuat beberapa catatan untuk ASEAN.

Transformasi Peranan Strategis: Tujuan RRC di Asia-Pasifik

Sejak retaknya persekutuan Cina-Soviet, keinginan RRC untuk tampil sebagai kekuatan utama di dunia semakin kuat. Pendiri Republik Rakyat Cina Mao Zedong, melalui formulasi teori Tiga Dunia (*Sange Shijie*), bercita-cita untuk menjadikan Cina sebagai pusat kekuatan dan pemimpin negara-negara yang sedang berkembang di Dunia Ketiga (*Disan Shijie*). Untuk mewujudkan cita-cita itu, Mao tidak segan-segan menjalankan politik luar negeri yang menentang Amerika Serikat dan Uni Soviet sekaligus, memberikan bantuan-bantuan luar negeri kepada negara-negara Dunia Ketiga, dan membantu gerakan-gerakan komunis di berbagai negara. Padahal, dilihat dari kesulitan-kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dihadapi di dalam negeri pada waktu itu, postur politik luar negeri demikian sungguh tidak realistik.

Keinginan untuk menjadikan Cina sebagai kekuatan besar dalam panggung politik internasional, tidak hanya menjadi obsesi Mao Zedong tetapi juga menjadi cita-cita pemimpin Cina pasca Mao, Deng Xiaoping. Hanya saja Deng lebih rasional untuk merealisasikan cita-cita itu. Deng melihat pen-

tingnya konsolidasi kekuatan nasional terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh untuk mewujudkan cita-cita "besar" itu. Untuk itu, Deng mencanangkan program Modernisasi Empat (*Sige Xiandaihua*). Bersamaan dengan itu, para pemimpin RRC menegaskan kembali keinginan mereka untuk menjadikan Cina sebagai negara kuat yang akan memainkan peranan sangat berpengaruh dalam urusan-urusan internasional di masa mendatang. Deng Xiaoping dengan tegas pernah mengatakan bahwa "Cina akan tampil sebagai negara kuat yang memiliki pengaruh jauh lebih besar di dunia".²

Pada tahun-tahun awal kepemimpinan Deng Xiaoping (1979-1982), Cina melihat pentingnya menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat. Dengan condong ke AS ini, Cina mendapat dua keuntungan sekaligus, yakni secara ekonomi memperoleh dukungan bagi pelaksanaan program Modernisasi Empat, dan secara strategis memperoleh rasa aman dari ancaman Uni Soviet. Namun, tuntutan modernisasi di dalam negeri dan tekanan militer Uni Soviet di luar negeri telah menjadikan hubungan dengan superpower sebagai aspek terpenting dalam strategi politik luar negeri Cina. Ini berarti bahwa arti penting Dunia Ketiga dalam strategi politik luar negeri RRC mengalami pergeseran yang cukup berarti. Beijing tampaknya lebih disibukkan oleh upaya memperkuat kerjasama dengan AS, Jepang, dan negara-negara industri maju Barat lainnya.³

Meskipun kesulitan-kesulitan dengan AS dan beberapa pertimbangan strategis lainnya

²Harry Harding, *China and Northeast Asia: The Political Dimension* (New York: University Press of America, 1988), hal. 14.

³Rizal Sukma, "Cina dan Dunia Ketiga: Prakiraan Dekade 1990-an," *Media Indonesia*, 19 Februari 1990.

pada tahun 1982 membuatkan keputusan politik luar negeri "baru" berupa nomenclatur politik luar negeri independen, sulit bagi RRC untuk menyangkal arti strategis hubungan dengan AS. Para pemimpin Cina melihat bahwa taktik independen yang ketat, yang ditujukan untuk menjaga jarak dengan AS dan normalisasi dengan US, kurang memberi jaminan bagi keamanan nasional dan dapat mempersulit pelaksanaan program Modernisasi Empat. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor penting, yaitu meningkatnya ketegangan dalam hubungan AS-US, kerawanan di kawasan Asia akibat meningkatnya pembangunan militer Uni Soviet, dan kebutuhan Cina akan bantuan ekonomi dari AS, Jepang, serta negara-negara Barat lainnya. Akibatnya, dekade 1980-an bisa dikatakan sebagai periode di mana Cina tidak begitu mengedepankan teori Tiga Dunia dalam politik luar negerinya, dan Dunia Ketiga yang tadinya menjadi hirauan utama terpaksa dinomorduakan. Status Cina dalam konstelasi politik dunia lebih tepat disebut sebagai kekuatan regional dengan orientasi global.

Sekarang ini, memasuki dekade 1990-an Cina tampaknya kembali harus melakukan beberapa penyesuaian dalam politik luar negerinya sehubungan dengan kemunculan beberapa faktor baru. Pertama, peredaan ketegangan dalam hubungan AS-US dilihat Beijing sebagai tidak menjamin terbentuknya tata hubungan internasional yang lebih stabil. Bahkan Beijing melihat perkembangan demikian sebagai memberi peluang yang sudah mulai dimanfaatkan oleh AS untuk mendominasi politik dan ekonomi internasional.⁴ Cina akan menentang terbentuknya tata hubungan internasional yang akan dido-

minasi oleh superpower. Untuk itu, Cina memandang dirinya sebagai satu-satunya pihak yang dapat tampil kembali sebagai kekuatan yang akan memperjuangkan nasib negara-negara sedang berkembang di Dunia Ketiga.⁵

Kedua, memburuknya hubungan Cina dengan AS akibat sanksi ekonomi yang dilakukan AS dan Barat menyusul peristiwa Tiananmen, memperkuat keyakinan para pemimpin RRC bahwa AS tidak dapat dijadikan sekutu yang permanen. Hal ini mendorong Cina untuk lebih memperkuat dan memperbarui hubungan dengan negara-negara maju Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN, yang juga berpotensi untuk mendorong pelaksanaan program Modernisasi Empat.

Ketiga, dengan semakin dekatnya penyelesaian konflik Kamboja, kalau Cina tidak segera menyusun suatu strategi baru maka ia akan tersisih dari percaturan politik di Asia Tenggara pasca Kamboja yang ditandai oleh perkembangan positif dalam hubungan segitiga ASEAN-Jepang-Indocina. Berkurangnya pengaruh Cina di kawasan terdekatnya ini akan mengurangi peranan strategis RRC sebagai salah satu kekuatan yang sangat dihitung dalam percaturan politik global. Dengan demikian, RRC merasa perlu untuk menegaskan kembali kehadirannya di kawasan ini sebagai kekuatan utama, baik melalui cara-cara damai maupun dengan

⁴Mengenai penegasan kembali tentang arti penting Dunia Ketiga dalam politik luar negeri RRC, antara lain lihat pernyataan PM Li Peng yang dikutip oleh *Asian Recorder*, vol. XXXVI, no. 44 (29 Oktober-4 November 1990). Untuk pembahasan yang lebih komprehensif mengenai perubahan pemikiran strategis RRC ini, lihat Rizal Sukma, *Peranan Strategis RRC dan Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara* (Jakarta: CSIS, Januari 1991).

⁴ SCMP, 15 Desember 1990.

memanfaatkan sengketa-sengketa teritorial yang ada di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

Dengan demikian, pilihan rasional bagi Cina sekarang ini adalah bagaimana mewujudkan status sebagai *kekuatan global* yang aktual (*actual global power*) namun, untuk sementara, lebih berorientasi regional. Arti regional di sini, tidak hanya dalam lingkup geografis tetapi juga politis seperti Dunia Ketiga. Dengan kata lain, prakarsa-prakarsa politik dan ekonomi RRC di masa mendatang akan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan regional ketimbang hanya memusatkan perhatian pada pola hubungan dengan superpower. Kendatipun demikian, bukan berarti RRC akan mengbaikan sama sekali globalnya, terutama dalam perspektif segitiga strategis AS-RRC-US. Kembalinya Dunia Ketiga dalam prioritas politik luar negeri RRC sekarang ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya Cina untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan ketiga yang setara dengan AS dan US.

Dengan perubahan-perubahan demikian, tujuan strategis RRC di Asia-Pasifik tampaknya akan mencerminkan keseluruhan tujuannya untuk mengimplementasikan "pemikiran baru" politik luar negerinya itu, yakni menjadikan Cina sebagai kekuatan utama di kawasan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan ini sebenarnya menjadi tujuan RRC sejak dahulu. Hanya saja, sekarang ini tujuan tersebut akan dicapai melalui transformasi peranan dari *kekuatan regional yang berorientasi global* menjadi *kekuatan global yang berorientasi regional*. Artinya, dalam mewujudkan ambisi menjadi kekuatan dunia sekarang ini Cina memilih cara yang lebih realistik sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Konsolidasi Ekonomi dan Proyeksi Kekuatan Militer: Peluang untuk Menjadi Kekuatan Dunia?

Untuk dapat tampil sebagai kekuatan utama di Asia-Pasifik, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh RRC. Pertama, Cina harus mampu menyusun suatu struktur aliansi atau koalisi di Asia-Pasifik di mana ia berperan sebagai pusat kekuatan dan keputusan. Kedua, Cina harus memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang dapat diproyeksikan ke kawasan ini. Paparan di bawah ini akan menilai peluang dan hambatan yang dimiliki oleh RRC dalam memenuhi kedua syarat tersebut.

Penyusunan Koalisi: Dilema Status Quo dan Tekanan Eksternal

Pada dasarnya, arti penting pembentukan sebuah aliansi atau koalisi erat kaitannya dengan persoalan keamanan yang dihadapi oleh sebuah negara. Namun, pembentukan sebuah aliansi atau koalisi juga bisa dimaksudkan untuk mempertegas proyeksi dan perluasan pengaruh sebuah negara dalam aliansi itu yang bermaksud menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Bagi RRC, arti penting sebuah aliansi atau koalisi mengandung kedua aspek tersebut. Pertama, dengan adanya persepsi Cina terhadap Uni Soviet sebagai musuh utama dalam skala global dan Vietnam dalam skala regional, sebuah koalisi anti-Uni Soviet dan anti-Vietnam akan mempertinggi bobot (*leverage*) dan posisi tawar-menawarnya dengan kedua negara itu. Kedua, kalau RRC mampu menarik negara-negara di Asia-Pasi-

fik ke dalam orbit pengaruhnya melalui pembentukan koalisi, maka ia akan mampu membuktikan statusnya sebagai aktor utama di kawasan.

Selama dekade 1980-an, pada tingkat politik global RRC dinilai cukup berhasil dalam membangun koalisi anti-hegemoni Uni Soviet melalui koalisi strategis AS-RRC-Jepang. Melalui koalisi segitiga ini, RRC memperoleh keuntungan keamanan yang cukup strategis. Di samping itu, Beijing juga berhasil menempatkan dirinya pada posisi yang mampu mempengaruhi perimbangan kekuatan antara AS dan US. Pada tingkat regional, sampai tingkat tertentu Cina berhasil menarik negara-negara ASEAN, terutama Thailand, ke dalam sebuah koalisi anti-pendudukan Vietnam di Kamboja.

Namun, memasuki dekade 1990-an ini RRC harus menghadapi kenyataan yang berbeda dari sebelumnya. Menyusul perubahan dalam politik luar negeri Moskow dan meluakknya sikap Hanoi dalam konflik Kamboja, isu ancaman Uni Soviet dan Vietnam tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk mempertahankan koalisi-koalisi demikian. Sekarang ini dapat dikatakan Cina sedang menghadapi "situasi kehilangan musuh" dengan berkurangnya ancaman Uni Soviet dan Vietnam di Asia-Pasifik umumnya dan Asia Tenggara khususnya. Meredanya ketegangan antara AS dan US, dan dimulainya pendekatan US-Jepang, telah mengurangi arti strategis Beijing dalam koalisi segitiga AS-RRC-Jepang bagi Washington dan Tokyo. Thailand, yang oleh RRC tadinya dapat diandalkan sebagai sekutu terdepan dalam menghadapi Vietnam, kini sudah mulai membangun hubungan baik dengan Indocina. Negara-negara ASEAN lainnya, terutama Indonesia, sekarang cenderung me-

mandang Vietnam sebagai mitra ketimbang lawan.⁶

Di samping itu, peluang Cina untuk membangun sebuah koalisi Asia-Pasifik, di mana ia dapat tampil sebagai pusat kekuatan dan keputusan, akan menghadapi berbagai kendala yang bersumber pada faktor-faktor historis, geografis, dan ideologis. Secara historis, sebagian besar negara Asia-Pasifik masih menyimpan kecurigaan terhadap maksud-maksud Cina di kawasan ini, sebagai akibat petualangan Beijing di masa lalu.⁷ Di mata negara-negara ASEAN, Beijing dipandang sebagai pendukung dan sumber persenjataan bagi pemberontak-pemberontak komunis pro-Beijing di seluruh kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, sengketa-sengketa teritorial dan klaim-klaim Cina terhadap kepulauan di Laut Cina Selatan dan Timur, ditambah kecenderungan Beijing untuk menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, menambah kecurigaan negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan ASEAN, mengenai maksud-maksud hegemoni Cina di kawasan ini. Terakhir, menguatnya komitmen para pemimpin PKC terhadap "sosialisme ala Cina" di tengah-tengah perubahan yang sedang melanda dunia komunis, memperkuat keyakinan negara-negara kapitalis dan non-komunis Asia-Pasifik bahwa RRC tetap negara komunis, namun sedang meminjam

⁶Diskusi yang lebih mendalam mengenai tantangan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh RRC ini, antara lain lihat Rizal Sukma, "Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja," *Analisis CSIS*, Tahun XIX, No. 5 (November-Desember 1990).

⁷Sheldon W. Simon, "China and Southeast Asia: Protector or Predator?," *Australian Outlook*, vol. 39, no. 2 (Agustus 1985), hal. 94.

caranya kapitalis untuk pembangunan sosialis.

Realita politik demikian jelas menjadi hambatan bagi RRC dalam mempertahankan *status quo* dekade 1980-an, meskipun secara strategis kondisi selama periode itu sangat menguntungkannya. Kalau ia tidak ingin tersisih dari perkembangan regional, tidak ada pilihan lain bagi RRC kecuali menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungannya itu. Dengan kata lain, untuk sekarang ini, membangun sebuah koalisi merupakan pekerjaan yang cukup sulit bagi RRC.

Penopang Modernisasi Ekonomi: Peluang di Asia Timur dan Tenggara

Karena pendekatan yang menekankan aspek keamanan dan politik sudah tidak efektif lagi, dan membangun sebuah koalisi pro-Cina bukan pilihan yang mudah, sekarang ini RRC cenderung menekankan aspek kerjasama, terutama kerjasama ekonomi, dalam mendekati negara-negara Asia-Pasifik. Pendekatan ini memberikan tiga keuntungan sekaligus. Pertama, untuk mewujudkan ambisi "kekuatan dunia" tampaknya Cina menyadari bahwa hal itu mustahil dicapai tanpa didukung oleh kekuatan ekonomi nasional yang berarti. Kerjasama ekonomi dengan negara-negara maju di Asia, dapat dijadikan alternatif bagi pendukung usaha-usaha modernisasi di dalam negeri. Kedua, kerjasama dengan negara-negara maju di Asia akan mengurangi ketergantungannya dari AS dan negara-negara Barat lainnya. Ketiga, secara politis, dengan pendekatan yang menekankan aspek ekonomi Cina berharap mampu menciptakan kesan bahwa ia adalah negara yang dapat mengikuti kecenderungan internasional.

Di kawasan Asia Timur, prakarsa-prakarsa diplomatik RRC untuk mendekati dan memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan merupakan bagian dari upaya Beijing untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Meningkatnya hubungan ekonomi RRC dengan negara-negara tetangganya di Asia Timur antara lain terlihat dari meningkatnya nilai perdagangan antara Cina dengan Korea Selatan. Nilai perdagangan kedua negara yang hanya AS\$ 188 juta pada tahun 1980, meningkat menjadi AS\$3.142 juta pada tahun 1989, dengan pertumbuhan sekitar 38% per tahun (lihat Tabel 1).⁸

Tabel 1

NILAI PERDAGANGAN RRC-KOREA SELATAN
(dalam Juta Dollar AS)

Tahun	Ekspor Korsel	Impor Korsel	Total
1979	4	15	19
1980	115	75	188
1981	205	158	353
1982	48	81	129
1983	51	83	134
1984	229	233	462
1985	683	609	1.292
1986	715	681	1.395
1987	813	866	1.679
1988	1.598	1.387	2.985
1989	1.438	1.705	3.142

Sumber: Karen Eggleston, "The Political Economy of Sino-South Korean Relations: An Exploratory Analysis," *Korea Observer*, Vol. XXI, No. 3 (Autumn 1990), hal. 336.

⁸Karen Eggleston, "The Political Economy of Sino-South Korean Relations: An Exploratory Analysis," *Korea Observer*, vol. XXI, no. 3 (Autumn 1990), hal. 336. Lihat juga, Choong Yong Ahn, "Impacts of China's Economic Modernization on East Asian Economy," *Korean Journal of International Studies*, vol. XXI, no. 1 (Spring, 1990), hal. 120.

Korea Selatan terutama mengekspor barang-barang elektronik, besi dan produk-produk baja, serat-serat sintetik, dan pupuk kimia, dan mengimpor sutra, katun, makanan ternak dan batu bara dari RRC. Hal ini tidak mengherankan karena kedua negara memiliki ekonomi yang saling melengkapi. Korea Selatan memerlukan barang-barang mentah dan hasil industri ringan dari RRC, sementara RRC memerlukan produk-produk elektronik, mesin, dan kendaraan yang dihasilkan Korea Selatan. Korea Selatan ingin mengembangkan pasar RRC untuk diversifikasi pasar ekspor, sementara RRC membutuhkan perluasan perdagangan dengan Korea Selatan yang memiliki pasar terbesar kedua di Asia.⁹

Sampai sekarang, RRC sudah berhasil menarik para pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan untuk menanam modal mereka di Cina. Misalnya, sejak awal tahun 1980, *Goldstar* telah mendirikan pabrik elektronik di Zhoushan, Provinsi Guangdong untuk mengembangkan usaha patungan yang akan memproduksi TV berwarna bagi keperluan pasar dalam negeri RRC dan juga untuk diekspor ke Korea Selatan. *Samsung* juga sudah merencanakan bisnis yang sama di Shenzhen. Perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti *Lucky Goldstar*, *Daewoo Electronic*, *Samick Musical Instrument*, dan *Doosan Industrial Co.*, di samping perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, juga sudah masuk ke Cina.

Hubungan dengan Jepang, yang sempat diwarnai oleh ketegangan diplomatik menyusul peristiwa Tiananmen 1989, sudah

normal kembali. Jepang sudah melanjutkan kembali bantuan ekonomi kepada Cina yang sempat tertunda. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 8,8 miliar dolar sampai bulan Juli 1990 (lihat Tabel 2).

Tabel 2

NILAI PERDAGANGAN RRC-JEPANG
(dalam Juta Dolar AS)

Tahun	Ekspor RRC	Impor RRC
1988	8.046	11.062
1989	8.180	10.105
1990*	4.741,1	4.140,2

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistic*, Yearbook 1990; Edisi Juli, Agustus dan November 1990.

*Perkiraan sampai bulan Juli 1990.

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, perdagangan dengan negara-negara ASEAN meningkat dengan pesat. Perdagangan bilateral antara RRC dan Thailand meningkat dari hanya 21 juta dolar pada tahun 1975 menjadi 1.181 juta dolar pada tahun 1989, dan untuk tahun 1990 sampai bulan Juli diperkirakan 686,3 juta dolar. Nilai perdagangan dengan Malaysia meningkat dari 100 juta dolar pada tahun 1974 menjadi 986 juta dolar pada tahun 1989, dan diperkirakan pada bulan Juli 1990 mencapai 531 juta dolar. Dengan Singapura, meningkat dari 1,1 miliar dolar selama periode 1979-1984 menjadi 3 miliar dolar pada tahun 1989, dan sudah mencapai jumlah 1,5 miliar dolar sampai bulan Juli 1990. Dengan Filipina, sampai bulan Juli 1990 menjadi 211,3 juta dolar. Dengan Indonesia, dari 400 juta dolar pada tahun 1986

⁹Hee Mock Noh, "The Development of Korean Trade and Investment in PRC," *Korea and World Affairs*, vol. XIII, no. 3 (Fall 1989), hal. 430.

meningkat menjadi 748 juta dolar pada tahun 1989, dan untuk tahun 1990 sampai bulan Juli mencapai 501 juta dolar (lihat Tabel 3).

Tabel 3

NILAI PERDAGANGAN RRC-ASEAN
(dalam Juta Dolar)

	1988	1989	1990*
Indonesia	917	748	501
Malaysia	879	968	532,9
Thailand	1.145	1.181	686,3
Singapura	2.512	3.042	1.517,7
Filipina	403	548	211,3
Brunei	9	-	-

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistic*, Yearbook 1990 dan edisi Juli, Agustus, dan November 1990.

* Perkiraan sampai bulan Juli 1990

Hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia tersebut, jelas akan menguntungkan dan dapat membantu kelancaran program modernisasi RRC, dan pada gilirannya akan mewujudkan harapan RRC untuk memperkuat kondisi ekonomi nasionalnya. Hanya saja, untuk sementara waktu ini RRC masih harus menyelesaikan berbagai kesulitan di dalam negeri terlebih dahulu. Dengan kata lain, Cina masih memerlukan waktu untuk memenuhi ambisinya menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik. Selama Cina masih memprioritaskan pembangunan ekonomi di dalam negeri, dan besarnya kepentingan Cina terhadap kerjasama ekonomi dengan pihak luar negeri, dapat diasumsikan bahwa terciptanya sebuah lingkungan internasional Asia-Pasifik yang stabil masih merupakan tujuan utama Beijing.

Kapabilitas Militer

Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, secara kuantitatif kekuatan militer RRC menduduki peringkat pertama. Dalam skala global, kekuatan militer RRC menduduki peringkat ketiga, di bawah AS dan US. Meskipun selama satu dekade pelaksanaan Modernisasi Empat (1979-1989) bidang pertahanan mendapat prioritas terakhir, namun merupakan suatu kesalahan kalau bidang ini dianggap tidak mendapat perhatian para pemimpin RRC sebagai sarana terpenting bagi pencapaian tujuan nasional Cina. Selama satu dekade terakhir ini, kekuatan militer RRC mengalami peningkatan yang cukup berarti. Cina telah berhasil memodernisasi kekuatan militer dengan melengkapi kekuatan darat, laut, dan udaranya dengan persenjataan-persenjataan nuklir.

Persenjataan Nuklir. Program pengembangan senjata nuklir merupakan bidang yang memperoleh perhatian yang cukup besar dalam kebijaksanaan pertahanan RRC. Diperkirakan, setiap tahun RRC mengalokasikan sekitar 5% dari anggaran pertahanan untuk program pengembangan persenjataan strategis.¹⁰ Sekarang ini Cina terus memproduksi tiga sistem rudal nuklir, yaitu *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) tipe DF-5 (CSS-4),¹¹ *Intermediate-range Ballistic Missile* (IRBM) tipe DF-4 (CSS-3), dan *Sea-launched Ballistic Missile*

¹⁰ Alfred D. Wilhelm, Jr., "National Security -- The Chinese Perspective," dalam *China Policy for the Next Decade: Report of the Atlantic Council's Committee on China Policy*, U. Alexis Johnson, dkk., eds. (Boston: OG&H, 1984), hal. 211.

¹¹ DF adalah singkatan dari Dong Feng, atau Angin Timur.

Tabel 4

SENJATA NUKLIR STRATEGIS RRC

Kategori & Tipe	Tahun Penge-laran	Jang-kauan (km)	Daya Lontar (000lb)	Jumlah Pelontar						Hulu Ledak	Daya Ledak						
				85	86	87	88	89	90								
LANDAS DARAT																	
ICBM																	
CSS-4 (DF-5)	1981	15.000	4,4	2	2	2	2	2	2	tunggal	5 MT						
CSS-3 (DF-4)	1978/9	7.000	4,4	4	4	4	4	6	6	tunggal	3 MT						
IRBM																	
CSS-2 (DF-3)	1970	2.700	4,4			60	60	60	60	tunggal	2 MT						
MRBM																	
CSS-1 (DF-2)*		1.100		50	50	50	50				20 KT						
LANDAS LAUT																	
SLBM																	
CSS-N-3 (JL-1)	1983/4	td				12	12	12			2MT						
UDARA																	
Medium Range Bombers		radius of action (km)	kecepatan maksimal (mach)														
H6	1968/9	2.180	0,91							up to 120							

Sumber: *The Military Balance* 1984-1985 sampai 1990-1991.

*Sudah ditarik sejak tahun 1988

(SLBM) tipe JL-1 (CSS-NX-3).¹² Diperkirakan, setiap tahun RRC mampu memproduksi sekitar 10 ICBM dan 20 IRBM. Dua jenis ICBM yang dimiliki RRC -- DF-5 dan DF-4 -- masing-masing memiliki daya jangkau 15.000 dan 7.000 km dengan daya penghancur masing-masing sekitar 5 dan 3 mega ton. Meskipun sampai sekarang kedua jenis rudal itu masih menggunakan hulu ledak tunggal, sejak tahun 1988 RRC sudah

mulai melakukan uji coba hulu ledak ganda (*Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle* - MIRV). Jarak jangkau IRBM dan MRBM telah diperbaiki sehingga mampu menjangkau sasaran sejauh 2.700 dan 1.300 km. Kapal selam nuklir pertama RRC adalah kelas *Xia* yang dilengkapi dengan 12 JL-1 (CSS-NX-4, varian IRBM DF-3) yang berdaya jangkau sekitar 2.200-3.000 km (lihat Tabel 4).¹³

¹²JL adalah singkatan dari Julang, atau Gelombang Besar.

¹³ISS, *The Military Balance* 1985-1986, hal. 111.

Pada awalnya, kekuatan nuklir RRC lebih dimaksudkan sebagai pertahanan nuklir defensif. Namun, sejalan dengan pergeseran yang terjadi dalam pemikiran militer Cina dari strategi pertahanan pasif ke pertahanan aktif (*jiji sangyu*), RRC juga melihat arti penting pengembangan kapabilitas serangan balasan (*counterforce capability*). Hanya saja, sampai sekarang kebijakan pengembangan kekuatan penangkal (*heweisheliang*) RRC masih terbatas untuk mempertahankan kemampuan penangkal minimum (*minimum deterrent*).¹⁴

Dengan kemampuan seperti sekarang, dapat dikatakan bahwa persenjataan nuklir RRC dimaksudkan untuk mencegah invasi dalam skala besar ke daratan Cina. Hal ini berarti RRC memerlukan perangkat persenjataan lain untuk menghadapi serangan dalam skala yang lebih kecil. Karena kapabilitas persenjataan konvensional RRC relatif lemah, terutama kalau dibandingkan dengan Uni Soviet yang dipersepsikan Cina sebagai negara yang paling mungkin menjadi sumber ancaman, keperluan terhadap perangkat yang lebih handal itu berusaha dipenuhi melalui pengembangan senjata-senjata nuklir taktis (*Tactical Nuclear Forces - TNF*). TNF merupakan sarana yang dapat diandalkan bagi PLA untuk menutupi kelemahan kekuatan konvensional. Meskipun para pengamat, terutama pengamat Barat, percaya bahwa sejak awal tahun 1980-an RRC sudah memproduksi TNF, sampai sekarang belum ada informasi yang rinci mengenai hal itu.¹⁵

¹⁴Alastair I. Johnston, "Chinese Nuclear Force Modernization: Implications for Arms Control," *Journal of Northeast Asian Studies*, vol. II, no. 2 (Juni 1983), hal. 16-17.

¹⁵Lihat, *Asia-Pacific Defence Reporter*, Edisi Referensi Tahunan 1991, hal. 178.

Persenjataan Konvensional. Angkatan bersenjata RRC, meskipun telah dikurangi sejak tahun 1982, masih tetap memiliki jumlah yang besar, yakni sekitar 3.030.000 personil.¹⁶ Dengan jumlah ini RRC merupakan negara yang memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia. Doktrin "Perang Rakyat" (*People's War*) yang cenderung mengandalikan kekuatan manusia masih cukup berpengaruh dalam pemikiran para perancang pertahanan RRC. Kekuatan angkatan bersenjata RRC masih bertumpu pada kekuatan angkatan darat yang besar, yaitu dengan kekuatan 2,3 juta personil dibandingkan dengan jumlah angkatan laut dan udara yang masing-masing hanya berjumlah 260.000 dan 470.000 personil. Besarnya jumlah angkatan darat RRC ini dipengaruhi oleh faktor sejarah pertempuran yang dialami oleh PLA, yang hampir seluruhnya terpusat pada perang darat. Misalnya, Perang Korea tahun 1950-1953, perang dengan India tahun 1962, perang perbatasan dengan Uni Soviet tahun 1969, dan perang dengan Vietnam tahun 1979. Di samping itu, ancaman eksternal yang dikhawatirkan oleh RRC lebih banyak berasal dari negara-negara yang memiliki perbatasan darat yang panjang dengannya, seperti Uni Soviet, Vietnam, dan India.

Dari sudut keperluan pertahanan (*self-defence*), perangkat perang yang dimiliki RRC saat ini lebih dari memadai. Angkatan darat RRC antara lain dilengkapi dengan tank-tank tempur utama (*main battle tank*) seperti 8.000 unit T-54, 6.000 Tipe-59, 200 T-69 (modifikasi Tipe-59), dan sejumlah Tipe-79 dan Tipe-80; tank-tank ringan se-

¹⁶Data dan informasi tentang performance angkatan bersenjata RRC diambil dari *The Military Balance*, 1990-1991 (London: International Institute for Strategic Studies, 1990), hal. 148-150.

perti 12.000 unit Tipe-63 amphibi, dan 800 Tipe-62; 3.800 peluncur roket ganda (*Multiple Rockets Launchers*); dan 2.800 APC (lihat Tabel 5). Angkatan laut RRC persenjataannya meliputi 93 kapal selam termasuk 1 kapal selam strategis pembawa nuklir, 55 kapal tempur permukaan utama, 52 penjajau ranjau, 58 amphibi, dan 136 kapal pendukung dan lainnya. Sedangkan kekuatan udara angkatan laut RRC didukung oleh 600 pesawat tempur, lebih dari 30 pembom, dan

sekitar 60 helikopter (lihat Tabel 6). Angkatan udara dilengkapi dengan sekitar 4.000 pesawat tempur, 120 pembom ukuran sedang, 350 pembom ringan, 400 helikopter, dan 600 pesawat transpor, serta persenjataan seperti rudal-rudal udara ke udara (*air-to-air missiles*) jenis PL-2/-2A, PL-5B tipe Atoll, dan PL-7; dan rudal-rudal udara ke permukaan (*air-to-surface missiles*) termasuk rudal jelajah dari udara (*air-launched cruise missiles*) (lihat Tabel 7).

Tabel 5

KEKUATAN ANGKATAN DARAT RRC

Personil dan Peralatan (Kategori dan Jenis)	JUMLAH			
	1987	1988	1989	1990
PERSONIL	2,3 juta	2,3 juta	2,3 juta	2,3 juta
Divisi Infantri	118 div	80 div	80 div	80 div
Divisi Lapis Baja	13 div	10 div	10 div	10 div
Divisi Udara	3 div	3 div	3 div	3 div
Divisi Artilleri Medan	17 div	6 div	6 div	6 div
PERSENJATAAN				
Tank Tempur Utama				
T-54	*	*	*	8.000
Tipe-59	6.000	6.000	6.000	6.000
T-69	250	80	200	200
Tipe-79 dan 80	*	*	*	*
Tank Ringan				
Tipe-63 Amphibi	800	800	800	1.200
Tipe-62	1.200	1.200	1.200	800
Peluncur Roket Ganda	4.500	1.250	3.800	3.800
Pengangkut Personil Lapis Baja	2.800	2.800	2.800	2.800

Sumber: *The Military Balance*, 1990-1991 (London: IISS, 1990).

*Tidak ada data

Tabel 6

KEKUATAN ANGKATAN LAUT RRC

Personil dan Peralatan (Kategori dan Jenis)	JUMLAH			
	87	88	89	90
PERSONIL	340.000	300.000	260.000	260.000
Pertahanan Pantai	38.000	38.000	27.000	27.000
Marinir	56.500	4.500	6.000	6.000
Udara AL	34.000	30.000	25.000	25.000
PERSENJATAAN				
Kapal Selam				
Strategis	2	1	1	1
Taktis	115	113	92	92
Kapal-kapal Perang Utama				
Perusak	20	19	19	18
Fregat	33	34	37	37
Kapal Patroli dan Pantai	1.000	850	540	915
Penyapu Ranjau	*	128	56	52
Amphibi	615	76	58	58
Pendukung	50	104	118	136
Kekuatan Udara AL				
Pembom				
H-6	50	50	50	30
H-5	130	130	130	130
FGA				
Q-5		100	100	50
Pesawat Tempur	600	600	600	600

Sumber: *The Military Balance*, 1990-1991 (London: IISS, 1990).

Dalam menilai kekuatan militer RRC sekarang ini, para analis Barat berpendapat bahwa kekuatan militer RRC masih memiliki daya operasional terbatas. Penilaian demikian dapat dimengerti karena sebagian besar analis militer itu menggunakan kekuatan militer AS dan US sebagai basis penilaian. Meskipun demikian, RRC cukup mampu

untuk memproyeksikan kekuatan militernya ke seluruh kawasan Asia. Senjata nuklir RRC, seperti ICBM, mampu menjangkau dan menghancurkan sasaran-sasaran di wilayah Eropa, Uni Soviet dan di seluruh Asia. IRBM mampu menghancurkan pusat-pusat industri di wilayah Soviet tengah dan timur, dan juga sasaran-sasaran di Asia Timur dan

Selatan. Meskipun secara umum kekuatan laut masih merupakan kekuatan pantai, selama beberapa tahun belakangan ini Cina cenderung berusaha untuk menjadi kekuatan laut "air biru" (*blue water navy*).

Kemampuan proyeksi kekuatan militer ini, dipertegas dengan adanya kemauan militer (*military will*) RRC dalam menyelesaikan berbagai konflik. Kecenderungan penggunaan kekuatan militer RRC seperti yang

terlihat dalam konfliknya dengan India, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Vietnam, setidaknya menunjukkan bahwa kemauan militer RRC lebih besar dibanding negara-negara Asia lain dalam menyelesaikan setiap sengketa yang ada. Dengan demikian, kekuatan militer RRC mungkin dan dapat dipergunakan untuk menekan negara-negara tetangganya (misalnya, Taiwan dan Vietnam) untuk mengikuti kebijakan Beijing, atau setidaknya untuk tidak mengancam dan merugikan kepentingan RRC.

Tabel 7

KEKUATAN ANGKATAN UDARA RRC

Personil dan Peralatan (Kategori dan Jenis)	JUMLAH			
	87	88	89	90
PERSONIL	470.000	470.000	470.000	470.000
PERSENJATAAN				
Pembom				
Sedang	120	120	120	120
Ringan	500	300	300	350
FGA	500	500	500	500
Pesawat Tempur	4.000	4.000	4.000	4.000
J-5	400	400	400	400
J-6/B/D/E	3.000	3.000	3.000	3.000
J-7	200	250	300	500
J-8	30	30	200	50
Recce				
HZ-5	40	40	40	40
JZ-5				150
JZ-6	90	90	100	100
Rudal				
AAM			*	
ASM			*	

Sumber: *The Military Balance*, 1990-1991 (London: IISS, 1990).

*Tidak ada data

Proyeksi Peluang Militer

Perkembangan politik di kawasan Asia-Pasifik menyusul peredaan ketegangan AS-US, tampaknya akan menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kekuatan militer RRC. Rasa khawatir Cina mengenai kemungkinan tampilnya kembali Jepang sebagai kekuatan utama yang menggantikan peranan AS di Asia-Pasifik, setidaknya dapat mendorong kepemimpinan di Beijing untuk mempersiapkan kebijakan yang mampu mencegah skenario demikian. Oleh karena opsi pembentukan aliansi dan sarana kekuatan ekonomi masih sulit untuk dijadikan instrumen bagi tujuan demikian, besar kemungkinan RRC akan menggunakan PLA sebagai instrumen politik luar negeri meskipun hanya pada lingkup operasi-operasi terbatas. Dengan kekuatan militernya sekarang, besar kemungkinan RRC mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan utama di kawasan Asia-Pasifik.

Setidaknya terdapat tiga fakta yang dapat mendukung asumsi demikian. *Pertama*, meskipun sejak akhir tahun 1980-an militer Cina mengalami reorganisasi berupa pengurangan personil angkatan bersenjata, kebijaksanaan pertahanan RRC sekarang ini lebih difokuskan kepada peningkatan efektivitas persenjataan dan teknologi yang dimiliki melalui pengembangan program Penelitian dan Pengembangan (R&D).¹⁷ Untuk bidang R&D ini, oleh kalangan analis militer Barat RRC diakui memiliki fasilitas riset yang baik terutama di bidang produksi dan pengembangan teknologi militer.¹⁸ Ber-

¹⁷William T. Tow, "The Interplay of Science and Technology in Chinese Military Modernization," dalam *China's Military Reform: International and Domestic Implications*, Charles D. Lovejoy, Jr. dan Bruce W. Watson, eds. (Boulder: Westview Press, 1986), hal. 17.

¹⁸Wilhem, "National Security," hal. 215.

bagai jenis persenjataan baru, seperti tank Tipe-79 dan Tipe-80, terus diproduksi oleh industri militer RRC. Industri kapal selam berkekuatan nuklir dilaporkan sedang giat memproduksi kapal-kapal selam-jenis baru, seperti *Xia* SSBN, dan kelas *golf*. Meskipun belum terlihat peningkatan kualitas yang berarti, angkatan laut RRC sedang melaksanakan modernisasi kapal-kapal fregat dan perusak, dan sekarang ini sedang membangun sebuah pangkalan baru di propinsi Shandong. Sedangkan dalam bidang pengembangan persenjataan nuklir, RRC terus melakukan berbagai uji-coba.

Kedua, selama berlangsungnya program penghematan akibat kesulitan-kesulitan ekonomi di dalam negeri, anggaran pertahanan RRC selama tahun 1980-an cenderung berkurang. Namun, sejak tahun 1989 mulai meningkat kembali (lihat Tabel 8). Peningkatan itu kemungkinan besar akan berlanjut, mengingat para pemimpin militer RRC menuntut peningkatan yang besar dalam anggaran pertahanan negara sampai mencapai jumlah 10 miliar dolar AS untuk periode Pelita VIII (1991-1995).¹⁹ Peningkatan itu dimaksudkan untuk: (1) pembuatan senjata-senjata baru; (2) renovasi senjata-senjata lama; (3) meningkatkan kualitas persenjataan udara, kapal perang, pesawat tempur, dan sistem komunikasi; dan (4) mengembangkan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan.²⁰

Ketiga, Cina merupakan negara pengekspor senjata terbesar kelima khususnya ke negara-negara Dunia Ketiga, setelah Uni Soviet, AS, Perancis, dan Inggris. Selama periode tahun 1979-1987, nilai ekspor militer RRC mencapai jumlah 8-9 juta dolar AS.

¹⁹SCMP, 9 Februari 1991.

²⁰Bangkok Post, 10 Februari 1991.

Tabel 8

ANGGARAN PERTAHANAN RRC 1980-1990
 (dalam Milyar Yuan)

	TAHUN									
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Belanja Pertahanan	20,17	17,87	17,87	17,87	18,67	20,13	20,98	21,80	25,1*	28,97*
Anggaran Belanja Negara	111,5	115,3	129,2	154,6	184,4	233,1	244,8	270,6	293,1	n.a.
Persentase dari Anggaran Belanja Negara	18,08	15,49	13,82	11,5	10,1	8,6	8,6	8,05	8,56	n.a.
GNP	462,9	503,8	562,7	676,1	833,0	946,4	1.117,9	1.401,5	1.590,7	n.a.
Persentase dari GNP	4,35	3,54	3,17	2,64	2,24	2,12	1,87	1,55	1,57	n.a.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

*Dianggarkan (*budgeted*)

n.a. = data belum tersedia

Kawasan Timur Tengah merupakan penerima utama. Selama tahun 1981-1985, nilai perdagangan militer RRC dengan kawasan ini sebesar 80%, bahkan sebesar 86,4% jika Afrika Utara diperhitungkan, dari keseluruhan penjualan militer RRC. Irak, Iran, dan Arab Saudi, merupakan negara penerima terbesar ekspor senjata dari RRC. Kecenderungan ini terus terlihat selama tahun 1986-1988, meskipun RRC berusaha untuk melakukan diversifikasi pasar persenjataan.²¹ Di samping negara-negara Timur Tengah, Pakistan, Thailand, Korea Utara, dan Bangladesh merupakan pasar yang

cukup besar bagi Cina.

Kebijaksanaan transfer persenjataan ini tampaknya akan terus menjadi salah satu komponen penting dalam politik luar negeri RRC. Selain untuk memperoleh keuntungan finansial, kebijaksanaan ini tampaknya juga didasarkan atas kepentingan geostrategi. Penjualan senjata kepada Thailand, misalnya, dapat memperkuat pengaruh dan posisi RRC dalam konflik di Indocina. Penjualan senjata kepada Arab Saudi, menegaskan posisi RRC yang menentang kebijaksanaan Israel di Timur Tengah. Kebijaksanaan transfer persenjataan ini juga dapat memperkuat keinginan RRC untuk memperoleh status sebagai kekuatan dunia yang independen. Apalagi, para pemimpin RRC sendiri telah berulangkali menegaskan

²¹Yitzhak Sichor, "The Year of the Silkworms: China's Arms Transactions, 1987," dalam *Yearbook on PLA Affairs* (Taiwan: Sun Yat-sen Center for Policy Studies, 1988), hal. 153-154.

bawa kebijaksanaan transfer persenjataan ini akan terus dijalankan,²² terutama dengan diformulasikannya tiga prinsip penjualan senjata pada tahun 1988, yakni untuk memperkuat pertahanan diri negara-negara yang menjadi tujuan penjualan senjata dan untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan tertentu. Pemerintah RRC menegaskan bahwa pihaknya selalu meminta jaminan dari negara pembeli agar senjata-senjata itu tidak dipergunakan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Penutup: Beberapa Catatan untuk ASEAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa RRC sedang mengalami proses transformasi peranan di dalam struktur politik yang sedang berubah di kawasan Asia-Pasifik. Transformasi itu dilakukan melalui kebijakan konsolidasi kekuatan nasional komprehensif yang mengkombinasikan pergeseran tujuan strategis, kerjasama ekonomi luar negeri, dan pengembangan kekuatan militer. Melalui transformasi itu, RRC tampaknya akan mampu untuk menegaskan keberadaannya sebagai kekuatan utama (*major power*) di Asia-Pasifik, namun untuk menjadi kekuatan dominan (*dominant power*) masih memerlukan waktu. Bagi RRC sendiri, tampaknya tujuan untuk menjadi kekuatan dominan itu merupakan tujuan yang bersifat strategis.

Transformasi peranan RRC akan membawa implikasi berupa terbentuknya suatu

lingkungan keamanan baru di kawasan Asia-Pasifik. Lingkungan keamanan yang akan terbentuk merupakan hasil pergeseran di dalam struktur kekuatan di Asia-Pasifik. Berkurangnya kehadiran superpower di kawasan ini, secara politik akan melahirkan pola hubungan empat kekuatan besar yang relatif seimbang. Transformasi peranan RRC akan menegaskan posisi negara itu di dalam struktur tersebut, dan ini berarti memberi peluang bagi RRC untuk memproyeksikan pengaruhnya di kawasan.

Dalam konteks lingkungan keamanan baru ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ASEAN. *Pertama*, di antara empat kekuatan besar -- AS, US, RRC, dan Jepang -- Beijing merupakan aktor yang memiliki potensi konflik dengan ketiga aktor lainnya. RRC merupakan aktor yang potensial untuk mendorong terjadinya pergeseran yang mengganggu stabilitas di dalam struktur segi empat tersebut, jika terjadi ketegangan atau persaingan antara Cina dan Jepang, Cina dan AS, maupun kembaliya konflik antara Cina dan Uni Soviet. Kemungkinan pertama -- persaingan Cina-Jepang -- dan kemungkinan keempat -- konflik Cina-Soviet -- akan membawa implikasi langsung bagi keamanan kawasan Asia Tenggara.

Kedua, dalam memantau arah perkembangan politik segi empat kekuatan besar, kecenderungan-kecenderungan dalam peranan RRC harus mendapat perhatian serius. Sebuah kecenderungan yang mengarah kepada terjadinya transformasi peranan RRC dari kekuatan utama menjadi kekuatan dominan, merupakan kemungkinan yang beresiko tinggi bagi Asia Tenggara, sehingga perlu mendapat antisipasi sejak dini. Kalau tidak, sebuah RRC yang terlanjur dominan akan mempersulit terjaminnya stabilitas di

²²Eden Y. Woon, "Chinese Arms Sales and US-China Military Relations," *Asian Survey*, vol. XXIX, no. 6 (Juni 1989), hal. 610-611.

kawasan. Untuk itu, setiap pengaturan keamanan di Asia Tenggara harus selalu memasukkan Cina ke dalam kerangka politik segi empat kekuatan besar.

Ketiga, munculnya lingkungan keamanan baru membutuhkan bentuk pengaturan keamanan baru pula. Dalam hal ini, tidak ada salahnya kalau negara-negara ASEAN memasukkan masalah keamanan ke dalam agenda diskusi mereka. Diskusi-diskusi demikian perlu memperhatikan bentuk-bentuk keamanan bagaimana yang paling cocok, tidak hanya untuk ASEAN tetapi juga bagi negara-negara ekstra regional. Dengan kata

lain, diperlukan konsensus regional mengenai masalah-masalah keamanan dan bentuk-bentuk peranan kekuatan ekstra regional di kawasan ini.

Keempat, di atas semua itu, yang mendesak untuk dilakukan oleh ASEAN adalah bagaimana menata hubungan intra-Asia Tenggara pasca Konflik Kamboja. Kalau hubungan ASEAN-Indocina sudah memperoleh bentuk yang jelas, setidaknya negara-negara Asia Tenggara akan memiliki pijakan yang jelas dalam membentuk suatu pengaturan keamanan yang baru.

Implikasi Eropa 1992 Terhadap Persaingan Bisnis Global

Ronald NANGOI

EROPA 1992, yang akan membentuk Pasar Tunggal Eropa (PTE), merupakan integrasi ekonomi regional yang menarik untuk diamati kalangan bisnis internasional. Berbagai kemudahan, termasuk penghapusan hambatan tarif antar ke-12 negara anggota Masyarakat Eropa (ME), akan memberi peluang bagi kalangan bisnis Eropa Barat untuk memperkuat daya saing internasional mereka. Sementara itu PTE menimbulkan kekhawatiran di kalangan bisnis negara-negara bukan Eropa, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, akan kemungkinan meningkatnya proteksionisme dengan membentuk "benteng Eropa". Sejauh mana proteksionisme akan diterapkan masih diperdebatkan, namun PTE cenderung meningkatkan persaingan yang akan memperketat arus barang dan jasa negara-negara berkembang ke Eropa. Ini perlu menjadi perhatian terutama perusahaan-perusahaan negara berkembang yang belum memiliki tingkat keunggulan kompetitif yang memadai.

Oleh karena itu, untuk bisa beroperasi di kawasan ME, perusahaan-perusahaan inter-

nasional negara-negara bukan Eropa perlu mengandalkan dan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Dalam perspektif ini, PTE akan merupakan salah satu pendorong persaingan bisnis global. Perusahaan-perusahaan Eropa yang semakin kompetitif akibat dorongan integrasi regional ME dimungkinkan untuk memperluas wilayah operasi mereka. Dengan demikian, keunggulan kompetitif perlu diperhitungkan perusahaan-perusahaan internasional negara bukan Eropa agar bisa bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis global.

Revitalisasi Industri ME

Beberapa literatur antara lain mengatakan bahwa pembentukan ME 1992 banyak dilatarbelakangi oleh keinginan kuat ME untuk memperkokoh kembali daya saing industriya. ME 1992 bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi di mana industri-industrinya semakin kompetitif

pada tingkat dunia.¹ ME menyadari bahwa kelemahan industri Eropa mengurangi daya saing industrinya dan juga menjadi penyebab mundurnya perekonomian Eropa. Menurut Jusuf Panglaykim, industri-industri (Eropa Barat) semakin tidak mungkin bersaing di pasaran internasional. Tingginya tingkat inflasi, tingkat upah, kurangnya investasi di bidang industri berteknologi tinggi telah menyebabkan negara-negara Eropa Barat, kecuali Jerman Barat, tidak lagi mempunyai daya saing untuk menghadapi industri-industri Amerika Serikat dan Jepang.²

Berkurangnya daya saing industri Eropa tidak lepas dari fragmentasi industri dan ekonomi di negara-negara ME, yang menciptakan hambatan-hambatan perdagangan. Tingginya biaya transportasi dan pengenaan tarif perbatasan membatasi arus perpindahan barang dan jasa. Kebanyakan pasar di Eropa dihadapkan dengan pembatasan-pembatasan yang sama: pasar yang tidak lancar dan meningkatnya hambatan-hambatan tarif tinggi untuk masuk berkaitan dengan daya saing perusahaan-perusahaan, yakni investasi industri, riset dan pengembangan dan pemasaran.³ Kondisi seperti ini melemahkan bisnis dan industri Eropa Barat. John F. Magee mengatakan: "Sungguh fragmentasi pasaran Eropa, dengan multiplikasi peraturannya, kondisi ekonomi, preferensi kultural, ketegangan, dan kecemburuan telah membuat bisnis di

Eropa suatu pengalaman yang tidak begitu berarti."⁴

Kelemahan daya saing industri ini dikhawatirkan akan menggeser kedudukan bisnis Eropa tidak hanya di kawasannya sendiri tetapi juga di kawasan dunia lainnya, mengingat ekspansi global industri dan bisnis perusahaan-perusahaan internasional AS, terlebih-lebih Jepang, dan akhir-akhir ini negara-negara industri baru Asia (Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura). Magee menggambarkan kelemahan perusahaan-perusahaan Eropa sebagai berikut: "Eropa pasca perang yang terdiri dari pasar-pasar nasional yang diproteksi dan terpencil, telah mengalami stagnasi secara ekonomi dibandingkan dengan AS dan Timur Jauh. Perusahaan-perusahaan Eropa telah langka akan pasar lokal yang berukuran memadai untuk menunjang investasi yang perlu untuk bersaing dengan pesaing-pesaing Jepang dan Amerika dalam bidang-bidang industri masa mendatang seperti elektronika, teknologi informasi, bioteknologi, dan telekomunikasi.⁵ Dudley dalam analisisnya cenderung menyoroti kemunculan Jepang sebagai ancaman bagi ME dengan menyatakan bahwa penyebab utama terciptanya Pasar Tunggal adalah munculnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kemajuan industri Jepang yang begitu pesat telah mengantikan kedudukan Jerman Barat dan AS sebagai pemimpin perdagangan dunia dalam sepuluh tahun antara 1975 dan 1985.⁶

Perusahaan-perusahaan tersebut di atas berupaya mempertahankan kedudukan

¹James W. Dudley, *1992 Strategies for the Single Market* (London: Kogan Page Ltd., 1989), hal. 25.

²Jusuf Panglaykim, *Bisnis Internasional dalam Lingkungan yang Sedang Berubah* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), hal. 141.

³"Corporate Strategies of Europe's 70 Largest Corporations," *Panorama of EC Industry*, 1990, hal. 51.

⁴John F. Magee, "1992: Moves Americans Must Take," *Harvard Business Review*, Vol. 67, No. 3 (Mei-Juni 1989), hal. 78.

⁵Magee, "1992: Moves American," hal. 78.

⁶Dudley, *1992 Strategies*, hal. 57.

kompetitif internasional dan mencari peluang termasuk di kawasan Eropa. Kehadiran mereka ini dikhawatirkan ME, karena memiliki sumber daya, skala dan kemampuan untuk menciptakan kedudukan yang dominan.⁷ Perlu dicatat bahwa kelemahan industri Eropa berdampak buruk terhadap perdagangan internasionalnya. Banyak negara Eropa Barat mengalami defisit dalam perdagangannya dengan AS atau Jepang. Keadaan ini penting untuk menjadi catatan, karena menyebabkan pihak pemerintah menyetujui pembentukan Pasar Tunggal Eropa.⁸

Integrasi Ekonomi Regional Sebagai Jalan Keluar

Akta Tunggal Eropa (*Single European Act*) jelas bertujuan untuk menjadikan ME satu kesatuan ekonomi sejati melalui suatu perundang-undangan, di samping memperkokoh kekuatan-kekuatan Komisi Eropa, Dewan dan Parlemen Eropa,⁹ walaupun realisasinya memerlukan proses. Salah satu ciri penyatuhan ME adalah beralihnya fragmentasi pasaran industri menjadi pasar tunggal yang akan mengurangi berbagai biaya akibat fragmentasi tersebut. Secara demikian, perusahaan-perusahaan internasional Eropa memperoleh peluang untuk meningkatkan daya saing, sehingga bisa berdagang secara lebih bebas di kawasan intra Eropa.

Perusahaan-perusahaan Eropa bisa memperluas wilayah operasi dan pemasaran, dan juga meningkatkan kerjasama dengan

perusahaan-perusahaan Eropa lainnya. Sebagaimana dikemukakan Dudley, perusahaan-perusahaan memperoleh kesempatan untuk merelokasi produksi dari pasar domestik ke wilayah-wilayah di mana produksi lebih murah atau di mana perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan dalam hal mutu dan penelitian dan pengembangan di pusat-pusat ekselensi. Ini akan memberi mereka keunggulan kompetitif di pasaran dalam negeri sebelumnya dan memperkenalkan mereka ke wilayah pasar yang lain.¹⁰ Pendek kata, kerjasama regional di bidang teknologi baru sebagai sumber masukan bagi produksi industri ditopang oleh peningkatan transportasi, penyederhanaan logistik dan pemotongan biaya akan memperbesar kapasitas dan kemampuan produksi yang kompetitif bagi bisnis dan industri sebagai bagian dari keunggulan kompetitif ME.¹¹

Dalam rangka kemungkinan tercapainya keunggulan kompetitif internasional, tidak bisa diabaikan ME akan mendorong perluasan pasar modal/keuangan Eropa, dengan kata lain, meningkatkan jasa keuangan di kawasan Eropa. Dudley mengemukakan tiga sisi penting pada pasar jasa keuangan sehubungan dengan Eropa 1992 sebagai berikut:

1. Kebebasan arus perpindahan modal;
2. Hak untuk menjual jasa keuangan di seluruh ME; dan
3. Hak bagi organisasi-organisasi keuangan untuk membangun di negara-negara kawasan lainnya.¹²

Perluasan jasa keuangan tentu akan mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi ME.

⁷Ibid., hal. 117.

⁸Ibid., hal. 26.

⁹Ibid., hal. 17.

¹⁰Ibid., hal. 75.

¹¹Lihat Magee, "1992: Moves American," hal. 80.

¹²Dudley, *1992 Strategies*, hal. 39.

Studi yang dilakukan John A. Quelch, Robert D. Buzzell, Eric R. Salama menunjukkan bahwa penyempurnaan integrasi pasar ME akan mengarah pada peningkatan Produk Domestik Bruto sebesar 7%, pengurangan 5% dalam harga, dan terciptanya 5 juta pekerjaan baru.¹³ Kegiatan investasi industri dan produksi di kawasan ME dimobilisasi oleh terbukanya pasar uang Eropa yang disebabkan oleh:

1. Penurunan harga yang dikenakan pada pembeli oleh institusi keuangan;
2. Rendahnya ongkos bunga (*interests charges*) yang memperbesar investasi produksi dan konsumsi rumah tangga; dan
3. Semakin tersedianya kredit yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dan individu swasta untuk memanfaatkan kredit yang ditawarkan secara kompetitif dalam ME.¹⁴

Peningkatan daya saing bisnis ME yang dimungkinkan oleh membaiknya fungsi-fungsi bisnis tersebut di atas akan menjadi landasan yang kuat bagi industri Eropa dalam mempertahankan dan melakukan ekspansi bisnis internasional dan global. Secara demikian, ME akan mampu melakukan perdagangan dan bisnis internasional atas dasar prinsip resiprositas dengan negara-negara maju di luar kawasan Eropa terutama yang selama ini berada di atas posisi Eropa. Magee mengungkapkan: "ME telah mulai mengartikulasi apa yang disebut prinsip resiprositas yang secara umum menjamin bahwa ME akan memberi akses ke suplier

asing dengan persyaratan sama bahwa negara asing memberi akses ke perusahaan-perusahaan Eropa pada industri sejenis."¹⁵

Eropa 1992 Tidak Membentuk Benteng?

Dalam menghadapi kegusaran bahwa PTE akan menerapkan proteksi yang semakin ketat, diajukan argumentasi bahwa ME 1992 merupakan bagian dari upaya liberalisasi perdagangan dan ekonomi yang tetap memungkinkan masuknya barang-barang dan jasa serta investasi perusahaan-perusahaan bukan Eropa.¹⁶ Memang argumentasi tersebut tepat bila dilihat dari upaya penghapusan hambatan-hambatan perdagangan intra-ME.

Argumentasi ini ada benarnya jika ditinjau dari latar belakang keinginan ME terutama untuk meningkatkan daya saing bisnis dan industrinya dan tidak memberi perlindungan/preferensi kepada perusahaan-perusahaan yang lemah. Terciptanya lingkungan persaingan yang intensif akan memperkuat perusahaan-perusahaan Eropa dan membuka jalan bagi konsolidasi bisnis regional, sehingga tidak menutup kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan internasional bukan Eropa. Keunggulan kompetitif yang dicapai industri Eropa pada gilirannya akan memperlancar ME untuk memasuki dan memperluas kegiatan bisnis di kawasan lainnya.

¹³John A. Quelch, Robert D. Buzzell, Eric R. Salama, *The Marketing Challenge of Europe 1992* (New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1991), hal. iii.

¹⁴Dudley, *1992 Strategies*, hal. 40.

¹⁵Magee, "1992: Moves American," hal. 83.

¹⁶Sewaktu kunjungan Presiden Soeharto ke Jerman bulan Juli 1991, antara lain diungkapkan pihak Jerman adanya jaminan bahwa PTE 1992 tidak akan menutup pintu bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Lihat *Suara Pembaruan*, 9 Juli 1991.

Semakin intensifnya lingkungan persaingan telah diperkirakan, dan mungkin sekali diinginkan, negara-negara anggota bisa memperluas investasi asing terutama AS dan Jepang di kawasan tersebut. Pengurangan hambatan-hambatan teknis dan konsolidasi perusahaan Eropa akan menciptakan pasaran konsumen baru dengan potensi yang memadai untuk menarik minat negara-negara Asia dan Amerika.¹⁷ Pandangan serupa juga dikemukakan oleh beberapa pengamat seperti M. Christopher Korth dan Dudley. Korth menilai bahwa akibat dari kekhawatiran perusahaan bukan Eropa yang merasa berada di luar integrasi kelompok negara-negara Eropa adalah semakin tercipta dorongan yang kuat untuk menginvestasi dalam pengelompokan baru.¹⁸ Dudley juga yakin bahwa terciptanya pasar tunggal membuat Eropa tempat yang semakin menarik bagi perusahaan-perusahaan asing di luar Eropa. Melalui akuisisi, perusahaan-perusahaan ini mampu untuk menyatu dalam Eropa.¹⁹ Secara demikian, akan tercipta lingkungan persaingan bisnis yang semakin tajam tetapi berdampak positif bagi terbentuknya kawasan industri Eropa yang semakin kuat dan kompetitif.

Oleh sebab itu, semakin kuat analisis bahwa integrasi Eropa lebih ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dan bisnis Eropa yang menunjang prinsip resiproitas terhadap negara-negara bukan Eropa daripada alasan proteksi. Peningkatan daya saing ini akan memberi peluang sama bagi perusahaan-perusahaan ME untuk mema-

suki pemasaran dan bisnis internasional atau global.

Perluasan investasi perusahaan-perusahaan internasional bukan Eropa yang meliputi AS, Jepang, dan negara-negara Asia Timur lainnya di kawasan tersebut tercermin dari konsolidasi bisnis internasional dalam bentuk merger, akuisisi, dan persekutuan strategik baik di antara perusahaan-perusahaan intra Eropa maupun juga antara perusahaan-perusahaan ME dan perusahaan-perusahaan bukan Eropa. Fakta menunjukkan bahwa bahkan sebelum pengajuan Buku Putih (*White Paper*) pada tahun 1985, perusahaan-perusahaan telah mengupayakan peluang akuisisi dan merger di Eropa. Menurut Direktorat Jenderal Mengenai Persaingan ME (*Directorate General on Competition*), jumlah merger dan akuisisi di 12 negara anggota ME meningkat dari 117 pada tahun fiskal 1983 menjadi sekitar 450 pada tahun fiskal 1988.²⁰

Konsolidasi bisnis, yang menjadi bagian dari strategi korporat perusahaan-perusahaan internasional bukan Eropa, cukup beralasan. Eropa 1992 dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan perusahaan-perusahaan ini untuk bersaing dalam lingkungan bisnis internasional. Motivasi perusahaan-perusahaan tersebut terlihat juga dalam beberapa analisis Quelch *et.al.* sebagai berikut:

1. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan bukan Eropa berupaya memperoleh status "insider," atau memperkokoh posisi yang telah ada di ME, dengan melakukan merger atau akuisisi perusahaan-perusahaan Eropa. Dalam kasus lain, perusahaan-perusahaan Ero-

¹⁷Ibid., hal. 84.

¹⁸M. Christopher Korth, *International Business: Environment and Management* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1985), hal. 219.

¹⁹Dudley, *1992 Strategies*, hal. 128.

²⁰Quelch *et.al.*, *The Marketing Challenge*, hal. 63.

pa berupaya untuk melindungi diri terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang mendominasi pasaran dalam negeri pasca 1992.²¹

2. Kekhawatiran terutama dari kalangan bisnis Jepang untuk menjadi "outsider" dari kawasan Eropa dan kawasan lainnya. Banyak perusahaan manufakturing dan bank Jepang seperti Fuji Bank, Fujitsu, Matsushita, Mitsubishi, Toshiba, dan Toyota yang bertahan di Eropa khawatir bahwa jika mereka tidak membangun di Eropa, mereka akan menderita ketidakmampuan untuk memperoleh akses ke pasar Eropa.²²
3. Upaya untuk menguasai kontrol distribusi. Sebagai contoh; dimulai pada tahun 1986, beberapa produsen utama penyulingan minuman keras melakukan akuisisi terhadap distributor-distributor Eropa atau membentuk usaha patungan demi tujuan serupa. *Guinness* mendirikan perusahaan-perusahaan distribusi patungan dengan *Bacardi*, baik di Jerman maupun di Spanyol dan juga menjalin usaha patungan di Perancis dengan *Moet-Hennessy*.²³
4. Memperbesar skala bisnis dan keunggulan teknologi di hampir semua sektor. Misalnya, Toshiba memiliki keterkaitan dengan *Siemens* dan *GE*; Honda dengan *British Leyland*, dan Nissan dengan *Volkswagen*. Wakil Presiden eksekutif senior Sakae Shimizu dari Toshiba memberi alasan sebagai berikut: "Karena jarak antara negara-negara diperpendek dan teknologi berkembang semakin kompleks, satu perusahaan jelas tidak dapat

menangani semua aspek perkembangan teknologi."²⁴

Gerakan ke Arah Globalisasi

Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional di luar Eropa tidak bisa terhindarkan oleh bisnis ME khususnya atas pertimbangan globalisasi atau internasionalisasi bisnis. Pembentukan "benteng Eropa" yang membatasi kemungkinan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bukan Eropa akan merugikan perusahaan-perusahaan Eropa sendiri.²⁵ Secara demikian, ini akan mengganggu kemajuan yang dicapai perusahaan-perusahaan Eropa dalam tahapan globalisasi. Lagipula, banyak perusahaan Eropa berkepentingan untuk mempertahankan perluasan wilayah pemasaran internasional. Potensi pasaran internasional terutama pasaran AS, yang menguasai sekitar 50% dari pasaran dunia²⁶ tidak bisa diabaikan oleh perusahaan-perusahaan internasional.

Penerapan strategi globalisasi bisnis dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bukan Eropa terlihat pada penyebaran operasi perusahaan-perusahaan Eropa di berbagai kawasan penting dunia. Sebagai gambaran, pada pertengahan 1980-an, perusahaan-perusahaan Eropa meningkatkan kehadiran mereka di Amerika Utara melalui akuisisi perusahaan-perusahaan lokal dan ekspor. Akuisisi oleh perusahaan-perusahaan Eropa di sektor kimia, misal-

²¹Ibid., hal. 63.

²²Ibid., hal. 48-49.

²³Ibid., hal. 64.

²⁴Dudley, *1992 Strategies*, hal. 60.

²⁵Nan Stone, "The Globalization of Europe: An Interview with Wisse Dekker," *Harvard Business Review*, Vol. 67, No. 3 (Mei-Juni 1989), hal. 94.

²⁶Ibid., hal. 95.

nya, melonjak dari 125 pada tahun 1985 menjadi 371 pada tahun 1986.²⁷ Aliansi strategi juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan internasional Eropa. Misalnya di Jepang, *Mercedes Benz* memanfaatkan perusahaan *Yanase* sementara membangun jaringan "dealer"nya sendiri. Perusahaan ini juga mengadakan perjanjian dengan *Mitsubishi Motors* untuk mendistribusi beberapa model berukuran kecil dan menengah.²⁸

Orientasi global dan internasional perusahaan-perusahaan ME, yang tidak diperentangkan oleh PTE,²⁹ merupakan pengakuan terhadap internasionalisasi dan globalisasi bisnis. Michael E. Porter mengungkapkan bahwa sekarang ini semakin banyak aliansi perusahaan-perusahaan dari negara maju yang berkelompok untuk melayani seluruh kawasan atau seluruh dunia.³⁰ Kolaborasi bisnis seakan-akan menjadi resep bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi dalam bisnis internasional. Di samping akan menjamin kehadiran dalam pasaran internasional yang lebih luas, strategi globalisasi memungkinkan perusahaan-perusahaan internasional ME mengejar tingkat kemampuan saing industri negara-negara pesaing, AS dan Jepang. Oleh karena itu untuk mengejar (Jepang dan AS), perusahaan-perusahaan Eropa harus membentuk aliansi dengan perusahaan-perusahaan asing (*Bull* dengan *NEC* dan *Honeywell*, *Olivetti* de-

ngan *ATT*, *Siemens* dan *ICL* dengan *Fujitsu*), dan telah mengembangkan beberapa keterkaitan antar mereka.³¹

Dudley menunjukkan tiga alasan dasar perusahaan-perusahaan ME untuk berorientasi internasional, yakni untuk:

1. Menciptakan skala operasi yang memadai untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dengan menjadi kompetitif dalam hal biaya, harga, inovasi dan pemasaran;
2. Memberi portofolio pasar di mana strategi-strategi ofensif dan defensif terhadap pesaing-pesaing asing dapat dipergunakan; dan
3. Untuk memberi peluang bagi kolaborasi internasional dalam hal penelitian dan pengembangan, jalur pemasaran, produksi, dll.³²

Alasan-alasan seperti ini juga sering dipakai sebagai dasar pertimbangan strategi globalisasi perusahaan-perusahaan internasional pada umumnya. Porter mengungkapkan bahwa mencoloknya aliansi-aliansi perusahaan dalam persaingan internasional agar perusahaan-perusahaan internasional dapat mempercepat proses strategi globalisasi, menciptakan skala ekonomi, memperoleh akses ke teknologi atau pasar, dan mencapai keuntungan-keuntungan lainnya tanpa menghentikan ketergantungan korporat atau mendapat merger secara mahal.³³

Oleh karena itu, terdapat kekaburuan antara pendekatan regionalisme dan pendekatan globalisme dalam bisnis internasional. Walaupun demikian, praktik-praktek kola-

²⁷"Corporate Strategies of Europe's," hal. 40.

²⁸"Japan's Car Imports: Must Try Harder," *The Economist*, Vol. 319, No. 7712 (22 Juni 1991), hal. 74.

²⁹Menurut Dudley, masuknya ke AS tetap menjadi sasaran penting dalam strategi Pasar Tunggal. Lihat Dudley, *1992 Strategies*, hal. 67.

³⁰Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (London: The Macmillan Press Ltd., 1990), hal. 60.

³¹"Corporate Strategies of Europe's," hal. 49.

³²Dudley, *1992 Strategies*, hal. 129.

³³Porter, *The Competitive Advantage*, hal. 612.

borasi bisnis perusahaan-perusahaan ME dengan perusahaan-perusahaan bukan Eropa ini rupa-rupanya bisa menjawab sebagian pertanyaan sejauh mana relevansi alasan proteksionisme dalam rangka integrasi ekonomi regional Eropa. Globalisasi bisnis kiranya sulit dilaksanakan dalam iklim proteksionistik.

Catatan Penutup

Eropa 1992 diperkirakan akan menjadi pendorong globalisasi industri dan bisnis ME. Dengan kata lain, integrasi ekonomi ME akan menciptakan prospek persaingan global yang semakin ketat, memperkuat prinsip resiprositas dalam perdagangan internasional, dan sekaligus memperluas kolaborasi bisnis dalam bentuk merger, akuisisi dan persekutuan strategis dalam bisnis internasional.

Namun integrasi ekonomi dan bisnis ME ini diragukan akan langsung terlaksana begitu saja dalam tahun 1992, mengingat hambatan-hambatan yang ada, sehingga C.P.F. Luhulima menyarankan bahwa hendaknya "1992" janganlah dilihat sebagai suatu peristiwa, melainkan suatu proses.³⁴ Permasalahan yang ditunjuk lebih banyak menyangkut perbedaan-perbedaan kepentingan negara-negara anggota. Luhulima berpendapat: "Sebagian besar masalah yang terdapat dalam upaya itu amat beragam: negara-negara atau kelompok-kelompok dalam negara anggota berpendapat bahwa mereka akan dirugikan oleh usul-usul atau kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu. Seringkali masalah-masalah itu terkait dengan masa-

lah-masalah lain yang melibatkan rangkaian permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, walaupun terdapat konsensus politik yang kuat yang mendorong upaya penyatuan Pasar Eropa, sering sangat sulit untuk mencapai konsensus politik dalam kasus-kasus individual."³⁵ Dari sudut pandang bisnis internasional, penyatuan pasar secara sempurna, yang akan berpengaruh terhadap penerapan strategi bisnis dan pemasaran di kawasan Pasar Tunggal, masih menjadi persoalan sehubungan dengan beberapa perbedaan pasar dan masyarakat Eropa. Sebagaimana dikemukakan Quelch *et.al.*, tidak diragukan bahwa konsumen berbeda di seluruh Eropa. Pendapatan, nilai, dan tingkah laku mereka berbeda jauh sekali. Masih belum jelas, dengan tidak adanya suatu budaya Eropa yang murni, bahwa konvergensi dalam nilai dan perilaku adalah segala sesuatu tetapi sangat lamban. Pertanyaan riil menyangkut sejauh mana perusahaan-perusahaan dapat atau seharusnya melakukan standardisasi produk dan kegiatan pemasaran mereka.³⁶

Walaupun demikian, (proses) integrasi ekonomi Eropa tersebut tidak bisa dianggap remeh terutama oleh negara-negara bukan Eropa. Kecenderungan regionalisme ekonomi ME bisa berpengaruh terhadap kegiatan bisnis negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang sedang mengupayakan ekspor non-migas dan semakin berkepentingan dengan bisnis internasional. Selain AS, Jepang, dan negara-negara Asia Timur, Eropa merupakan wilayah pemasaran dan sumber industri yang menarik bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke negara-negara ME da-

³⁴C.P.F. Luhulima, "Eropa 1992 dan Dampaknya Terhadap Kerjasama di Kawasan Pasifik," *Analisis CSIS*, Vol. XIX, No. 4 (Juli-Agustus 1990), hal. 361.

³⁵*Ibid.*, hal. 360.

³⁶Quelch *et.al.*, *The Marketing Strategies*, hal. 24.

lam tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1988 nilai ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa Barat mencapai US\$1,5 miliar atau meningkat rata-rata sekitar 12% dari jumlah nilai ekspor sebesar US\$1,1 miliar pada tahun 1985.³⁷ Menyatunya pasaran Eropa, yang mengurangi hambatan antar negara Eropa, kiranya akan memudahkan prosedur pemasaran produk-produk dari negara-negara luar Eropa, walaupun harus diakui bahwa PTE mempersyaratkan standar dan kualitas produk yang semakin kompetitif.

Dalam melaksanakan promosi ekspor, Indonesia perlu memelihara kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ME, yang banyak memiliki keunggulan di bidang teknologi. Persaingan regional dan global yang semakin tajam, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menuntut bisnis dan industri nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Keterbukaan perusahaan-perusahaan internasional ME memberi peluang bagi kolaborasi bisnis, walaupun kolaborasi tersebut memerlukan kekuatan berimbang antar perusahaan.

Salah satu aspek penting, yang selama ini kurang diperhatikan perusahaan-perusahaan nasional, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang sangat penting bagi peningkatan mutu produk dan proses. Aspek ini banyak mendapat sorotan. Djisman S. Simandjuntak menegaskan: "Sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk mengupayakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai sumber pertumbuhan."³⁸ Keter-

libatan perusahaan-perusahaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ini merupakan tindakan strategis untuk memperkuat keunggulan kompetitif dalam operasi bisnis internasional.

Kendatipun belum meluas diterapkan dalam strategi korporat, kerjasama aliansi perlu diperhitungkan oleh bisnis nasional untuk meningkatkan kemampuan produksi dan teknologi. Simandjuntak mengungkapkan: "Sungguh diperlukan promosi kerjasama aliansi antar perusahaan demi peningkatan kemampuan sektor swasta dalam hal perolehan teknologi."³⁹

Berkembangnya kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia-Pasifik yang dipicu oleh perkembangan regionalisme di kawasan Eropa bisa menguntungkan bisnis negara-negara anggota termasuk Indonesia. Kerjasama ekonomi regional ini ditujukan untuk membangun ekonomi regional, sehingga membuka jalan bagi kerjasama bisnis nasional dengan kekuatan-kekuatan industri di kawasan Asia-Pasifik. Secara khusus, perolehan teknologi akan semakin dipercepat sebagai sumber keunggulan kompetitif bisnis dan industri nasional. Sebaiknya perusahaan-perusahaan nasional melibatkan diri dalam berbagai kegiatan bisnis di wilayah pemasaran terdekat ini. Secara demikian, perusahaan-perusahaan Indonesia pun pada suatu saat akan diperhitungkan perusahaan-perusahaan ME dan bisa diterima dalam jajaran persekutuan strategis dengan segala konsekuensinya.

³⁷Lihat data Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1989* (Jakarta), hal. 353.

³⁸Djisman S. Simandjuntak, "Concentration and Conglomeration in the Context of Proliferating

Strategic Alliances Among Multinationals," *The Indonesian Quarterly*, Vol. XIX, No. 1 (First Quarter 1991), hal. 60.

³⁹Ibid., hal. 60.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. KERJASAMA EKONOMI

- A. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
 - 1. Promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992
 - 2. Menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992
 - 3. Pertemuan Pengusaha Wisata ASEAN
- B. Kerjasama Pangan, Pertanian dan Kehutanan
 - Koperasi Pertanian ASEAN

II. KERJASAMA NON-EKONOMI

- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi ASEAN
- B. Seminar Regional Tentang Keamanan

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. Hubungan ASEAN-AS
- B. Hubungan ASEAN-Kanada
- C. Hubungan ASEAN-MEE

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

I. KERJASAMA EKONOMI

A. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992

Siaran pers Sub Komite Pariwisata ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 12 April 1991 menjelaskan bahwa: (1) Jepang, Australia dan Jerman tetap menjadi sasaran utama promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992; (2) program promosi Forum Pariwisata ASEAN di Bandung bulan Januari 1991 akan segera dilancarkan; (3) alat promosi utama adalah film dengan masa putar 12 dan 24 menit yang memperagakan keistimewaan ASEAN akan diputar di pesawat terbang nasional negara-negara ASEAN dalam penerbangan antar bangsa (*Antara*, 12-4-1991).

2. Menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992

Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 22 April 1991 bahwa: (1) Indonesia akan menyelenggarakan festival seni budaya memperingati HUT ke-17 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sekaligus menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992; (2) Indonesia yang kaya seni budaya itu, mulai sekarang harus mengadakan inventarisasi di 69 daerah dan yang terbaik dapat dipentaskan pada festival tersebut; (3) festival seni yang bernafaskan agama Islam akan diadakan di Jakarta bulan November 1991 dengan mengetengahkan 600 arsitektur mesjid; (4) seni budaya Indonesia terbuka terhadap pengaruh luar, unsur yang dinilai positif dapat dipetik sekaligus diolah untuk dijadikan budaya Indonesia; (5) hendaknya pemerintah daerah bersama masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan seni budaya untuk menarik wisatawan manca negara agar berlibur di Indonesia (*Angkatan Bersenjata*, 23-4-1991).

3. Pertemuan Pengusaha Wisata ASEAN

Pertemuan para Pengusaha ASEAN berlangsung di Nusa Dua Bali tanggal 29 Mei 1991 untuk membahas konsep standar pendidikan tenaga pariwisata yang dapat diterima oleh hotel-hotel berbintang di dunia internasional.

Sambutan tertulis Menparpostel Soesilo Soedarman,

pada pembukaan pertemuan itu sebagai berikut: (1) masalah ketampilan tenaga kerja merupakan tantangan berat bagi pengembangan kepariwisataan dunia; (2) program latihan pariwisata ASEAN yang didukung dana dari MEE agar mendiskusikan pengembangan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan di masa mendatang; (3) masalah ketampilan tenaga kerja bidang perhotelan di ASEAN perlu segera diatasi sebab kunjungan wisatawan manca negara ke kawasan ini terus meningkat; (4) bila pada tahun 1981 kunjungan wisatawan manca negara ke ASEAN mencapai 10 juta orang, maka pada tahun 1989 telah mencapai 19 juta orang dengan perolehan devisa US\$10 miliar; (5) pelatihan tenaga kerja pariwisata ASEAN dirintis sejak tahun 1986, tetapi baru dapat direalisir pada tahun 1989 dengan mendapat bantuan dari MEE (*Angkatan Bersenjata*, 30-5-1991).

Seusai pertemuan Deparpostel, Jonathan L. Parapak, mengatakan kepada pers bahwa: (1) pelayanan merupakan bagian utama dari usaha industri pariwisata, karena itu perlu standardisasi pelayanan wisata negara ASEAN; (2) standardisasi pelayanan harus dibahas secara matang agar menghasilkan rumusan dan kesepakatan yang dapat dijadikan dasar pengembangan kepariwisataan di ASEAN; (3) standar pelayanan kepada wisatawan di hotel berbintang lima di Indonesia selama ini cukup baik khususnya di Nusa Dua Bali, bahkan telah dijadikan contoh pengembangan kepariwisataan di dunia internasional; (4) pelayanan kepada wisatawan tidak perlu berlebihan, tetapi perlu mencerminkan citra nusantara dan faktor kebersihan yang merupakan sapta pesona (*Angkatan Bersenjata*, 30-5-1991).

B. KERJASAMA PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- Koperasi Pertanian ASEAN

Pertemuan Pengembangan Pusat Koperasi Pertanian ASEAN (*ASEAN Center for the Development of Agriculture Cooperatives* atau ACEDAC) berlangsung di Jakarta tanggal 13-18 Mei 1991 untuk membahas upaya pengembangan pertanian dan kehutanan di ASEAN.

Menteri Muda Pertanian RI, Sjarifuddin Baharsjah mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ACEDAC sangat penting bagi pertukaran informasi

riset dan pengembangan program pertanian di ASEAN; (2) pengalaman masing-masing negara anggota ASEAN sangat bermanfaat untuk mempercepat peningkatan program pengembangan pertanian di kawasan ASEAN (*Jakarta Post*, 15-5-1991).

Pertemuan sepakat membentuk Pusat Pengembangan (ACEDAC) dan menunjuk Prof.Dr. Wagijono Ismangil dari Indonesia sebagai ketuanya (*Suara Pembaruan*, 20-5-1991).

Kepala Litbang Departemen Koperasi Dr. Muslimin Nasution mengatakan pada peresmian ACEDAC di Jakarta tanggal 18 Mei 1991 bahwa: (1) lembaga ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama koperasi di ASEAN; (2) ACEDAC bertujuan memberi bantuan bagi pengembangan koperasi-koperasi pertanian di ASEAN untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada; (3) ACEDAC bertugas menyebarluaskan informasi pembangunan perkoperasian sekaligus mempromosikan perdagangan di antara anggotanya (*Suara Pembaruan*, 20-5-1991).

gatif globalisasi informasi, diperlukan penanganan khusus melalui solidaritas pengelolaan media massa cetak dan elektronika antar sesama anggota ASEAN; (5) di kawasan ASEAN belum ada izin penggunaan DBS secara tegas, karena masih mempelajari dampak yang akan terjadi. Demikian pula di Indonesia diperkenankan tetapi dengan batasan tertentu untuk menjaga stabilitas nasional; (6) penerapan teknologi canggih mencerminkan keterbukaan informasi di Indonesia untuk mengikuti arus kemajuan tanpa harus hanyut (*Antara*, 29-5-1991); (7) ASEAN perlu meningkatkan kerjasama di bidang informasi dan kebudayaan untuk mempertahankan ciri khasnya di mata dunia; (8) peningkatan kerjasama ini dapat dilakukan melalui peningkatan arus informasi langsung dan lebih teratur untuk membangun identitas regional negara masing-masing; (9) kerjasama COCI bermanfaat untuk mencegah kemungkinan dampak negatif globalisasi di kawasan ASEAN yang memiliki ciri tersendiri; (10) semangat kebersamaan serumpun negara-negara ASEAN sudah menjadi modal dasar untuk mempertahankan ciri khas budayanya (*Merdeka*, 30-5-1991).

II. KERJASAMA NON EKONOMI

Sidang Komite Kebudayaan dan Informasi ASEAN (*Committee of Culture and Information* atau COCI) ke-24 berlangsung di Prigen Pasuruan Jawa Timur tanggal 29 Mei 1991-1 Juni 1991 untuk membahas upaya peningkatan proyek budaya dan informasi menyambut tahun anggaran kerja 1991-1992 di bidang video, arkeologi, sastra dan seni. Di samping itu juga dibahas upaya peningkatan mutu profesi sineas muda yang merupakan hasil kerjasama dengan Jepang, Kanada dan Australia serta UNDP.

Menteri Penerangan RI, Harmoko mengatakan pada pembukaan pertemuan itu: (1) Indonesia menjadi pelopor keterbukaan informasi melalui siaran langsung televisi dengan menggunakan antena parabola atau DBS (*Direct Broadcasting Satelite*); (2) keterbukaan itu didasari kenyataan bahwa arus informasi dengan menerapkan kemajuan teknologi media massa tidak dapat dibendung lagi. Kemajuan itu mampu menembus ke seluruh wilayah secara serentak; (3) keprkasaan arus informasi itu tidak mungkin dihalangi secara teknis, baik dengan peralatan teknologi sejenis maupun yang lebih canggih; (4) untuk menghindari dampak ne-

Sementara itu Pemimpin Umum Kantor Berita Malaysia, Bernama, Mohammad Raus Borhan mengatakan bahwa: (1) keterbukaan informasi yang senantiasa membawa dampak negatif perlu ditanggulangi secara nasional dan regional; (2) penanganan ini untuk menjaga dan sekaligus mengembangkan pola budaya antara generasi di suatu kawasan yang memiliki ciri-ciri tersendiri; (3) salah satu cara yang ditempuh oleh ASEAN untuk melestarikan kebudayaan khas secara regional adalah melalui pertukaran informasi antar kantor berita (*ANEX* atau *ASEAN News Exchange*); (4) kebijakan dan penerapan tatanan informasi di Indonesia yang memiliki kantor berita dan studio televisi tertua di ASEAN serta mampu menjangkau wilayah yang luas dibanding dengan negara lain dapat dijadikan pengalaman yang positif (*Antara*, 29-5-1991).

Hasil-hasil sidang antara lain COCI sepakat untuk: (1) meningkatkan promosi budaya khas ASEAN untuk mengimbangi dominasi globalisasi arus informasi; (2) mengadakan promosi kebudayaan melalui berbagai saran komunikasi seperti media massa dan program duta budaya ASEAN ke berbagai negara; (3) menggalang kerjasama secara global agar ASEAN mampu menjadi salah satu potensi regional seperti MEE (*Antara*, 3-6-1991).

B. SEMINAR REGIONAL TENTANG KEAMANAN

Seminar regional pertama tentang keamanan dengan tema "ASEAN and the Asia Pacific Region: Prospects for Cooperation in 1990s", berlangsung di Manila tanggal 6-7 Juni 1991, dihadiri oleh pejabat tinggi dan cendekiawan dari 20 negara, termasuk AS, Uni Soviet, Jepang, Cina dan ASEAN.

Menlu Filipina, Raul Manglapus, mengatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) ASEAN agar memperjuangkan konsensus tentang keamanan dan integrasi ekonomi yang kuat; (2) AS mempunyai peranan untuk memelihara perdamaian; (3) pasca Perang Dingin menunjukkan bahwa keamanan regional harus disusun di wilayah negara itu sendiri bukan di ibukota beberapa negara adi daya; (4) geografi ASEAN dan perbedaan besar dalam ukuran ekonomi negara-negara anggotanya menyebabkan organisasi tersebut sulit mendukung integrasi ekonomi (*Antara*, 6-6-1991); (5) Asia Tenggara tidak pernah sepakat untuk menangani isyu tentang keamanan karena selama Perang Dingin beberapa negara kawasan itu berpihak pada salah satu negara adi daya dan beberapa negara lainnya tidak berpihak; (6) konsensus tentang keamanan merupakan pilihan yang dituju dalam seminar itu; (7) semua pihak yang berpartisipasi dalam seminar agar terbuka dalam sikap politiknya yang berhubungan dengan masalah yang menjadi perselisihan faham; (8) ASEAN diharapkan mampu menyatakan kesamaan pendapat tentang masalah keamanan, termasuk konsep ZOPFAN yang disepakati pada tahun 1971; (9) tanggung jawab keamanan suatu wilayah harus dilahirkan dari wilayah itu sendiri; (10) tiang utama ASEAN ada tiga, yaitu ekonomi, politik dan keamanan; (11) syarat utama merencanakan suatu integrasi ekonomi harus ada bentuk perjanjian ekonominya (*economic treaty*) (*Kompas*, 7-6-1991).

Dubes Indonesia untuk Filipina, Soewarso Hardjo-soedarmo, mengatakan: (1) resiliensi (ketahanan) ASEAN sebaiknya diutamakan daripada pembicaraan yang menyangkut hubungan regional Asia Pasifik; (2) ASEAN sebaiknya memenuhi apa yang menjadi tujuan Deklarasi Manila, sebelum membahas masalah Asia Pasifik; (3) ruang lingkup yang dibahas dalam seminar terlalu luas sedangkan kepentingan masing-masing negara beragam; (4) ketahanan hubungan antar negara ASEAN seharusnya diwujudkan lebih dulu sebelum melangkah ke kawasan yang lebih luas; (5) kriteria peserta seminar tidak jelas apakah datang dengan kapasitas pribadi atau mewakili pemerintah; (6) kesan hasil seminar akan dipaksakan sebagai masukan bagi pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Singapura tahun 1992; (7) beberapa negara bersikap seakan-akan ZOPFAN tidak ada, dan ingin menerapkan kerjasama dengan negara di luar ASEAN; (8) ASEAN dan negara-negara besar harus menghormati ZOPFAN; (9) ia tidak setuju jika pertemuan tersebut mengarah kepada pemberian kehadiran pasukan AS di Subic dan Clark, walaupun menurut AS stabilitas ASEAN terjamin dengan kehadiran AS di dua pangkalan itu; (10) kehadiran pangkalan AS di Filipina itu hanya untuk menjaga kepentingannya sendiri atas pertimbangan geostrategis; (11) ASEAN harus mampu menjaga keamanannya sendiri dengan menjaga stabilitas nasional maupun regional yang bebas dari pengaruh kekuatan luar (*Kompas*, 7-6-1991).

Mantan Menteri Pertahanan Filipina, Rafael Ileto, mengatakan: (1) pertemuan regional masalah keamanan ini mempunyai arti penting untuk menggali pendapat dari negara-negara tetangga ASEAN tentang konsep keamanan ASEAN; (2) sampai sejauh ini konsep ZOPFAN tidak efektif; (3) dalam kondisi dan situasi sekarang yang dihadapi ASEAN tentang masalah ZOPFAN hanya ada dua kemungkinan, yaitu meninjau kembali ZOPFAN atau pembubaran ZOPFAN; (4) dalam berbagai konferensi yang diselenggarakan ASEAN, masalah militer tidak pernah dibicarakan (*Kompas*, 7-6-1991).

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Richard Woolcott, mengatakan: (1) sebagian besar peserta seminar setuju dipertahankannya pangkalan militer di wilayah Asia Pasifik; (2) sampai sekarang belum ada ancaman tertentu di wilayah Asia Pasifik, tetapi ancaman datang dari ketidakpastian dan konflik yang tidak diselesaikan di kawasan tersebut; (3) pertemuan ini sangat tepat untuk membicarakan masalah keamanan regional, bukan hanya ASEAN tetapi juga melibatkan negara-negara lainnya; (4) Australia mendesak Filipina untuk mengijinkan pasukan AS terus menggunakan pangkalan militernya; (5) Australia menganggap pangkalan militer AS penting untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Asia; (6) Australia mengharapkan agar AS dan Filipina dapat menyepakati persyaratan-persyaratan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak demi kelanjutan keberadaan pangkalan AS di Filipina (*Pelita*, 8-6-1991).

Dirjen Bidang Asia Pasifik Deplu Filipina, Romualdo Ong, mengatakan: (1) para peserta seminar hadir dalam kapasitas pribadi bukan mewakili negaranya; (2) ancaman terbesar di wilayah Asia Pasifik ada-

lah masalah stabilitas, kekacauan intern, keadaan dalam negeri masing-masing negara, perebutan wilayah dan masalah politik seperti di Kamboja; (3) kerjasama keamanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berbagai bidang (*Kompas*, 8-6-1991).

Pejabat Senior pada Kementerian Luar Negeri AS, Desaix L. Anderson, mengatakan: (1) di masa mendatang AS akan melanjutkan peranannya di kawasan Asia Tenggara apabila masih dibutuhkan (*Kompas*, 8-6-1991); (2) perjanjian baru AS-Filipina mengenai kontrak pangkalan Clark dan Subic belum disepakati (*Pelita*, 8-6-1991).

Panglima Besar Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Hashim Mohamad Ali, mengatakan: (1) Laut Cina Selatan akan menjadi wilayah konflik di Asia dan mengundang ikut campurnya kekuatan negara-negara di luar kawasan; (2) semua negara yang mengakui wilayah teritorialnya di kawasan Laut Cina Selatan sudah mengirim pasukannya, kecuali Brunei Darussalam; (3) negara-negara ASEAN agar melakukan usaha bersama untuk melawan terorisme internasional; (4) ia menolak usul pembentukan pakta pertahanan multilateral yang melibatkan semua atau beberapa negara ASEAN (*Merdeka*, 8-6-1991).

Anggota Akademi Pertahanan Nasional Jepang, Masashi Nishihara, mengatakan bahwa jika pasukan AS ditarik dari kawasan Asia Tenggara, maka kemungkinan Cina akan mengisi kekosongan kekuatan tersebut (*Pelita*, 8-6-1991).

Wakil Direktur Hubungan Internasional Beijing, Jin Dexiang, mengatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dapat mengarah kepada friksi yang meningkat antara Washington-Tokyo yang memungkinkan terjadinya konflik ekonomi dan politik (*Pelita*, 8-6-1991).

Direktur CSIS, Jusuf Wanandi, mengatakan: (1) persaingan ekonomi AS dan Jepang serta kurangnya ketergantungan Jepang terhadap Barat setelah ancaman dari Uni Soviet, akan memicu ketegangan dalam hubungan AS-Jepang di masa yang akan datang; (2) ketegangan hubungan AS-Jepang akan meningkat karena persaingan ekonomi; (3) rakyat AS melihat Jepang sebagai ancaman daripada Uni Soviet; (4) Jepang dinilai ingin menantang supremasi ekonomi AS dan Jepang ingin memainkan peranan politik yang lebih besar di tingkat dunia (*Bisnis Indonesia*, 8-6-1991).

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. HUBUNGAN ASEAN-AS

Mantan Dubes AS untuk Singapura, John H. Holdridge, mengatakan di Kansas City, Michigan, AS tanggal 12 Juni 1991 bahwa: (1) ASEAN merupakan pasar besar yang prospektif bagi produk asing; (2) kondisi perekonomian ASEAN jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Eropa Timur; (3) Eropa Timur tidak mempunyai infra struktur, tenaga ahli dan manajemen yang baik, tetapi ASEAN memiliki; (4) perekonomian Korea Selatan dan Taiwan maju, tetapi skala ekonomi kedua negara tersebut kecil; (5) Jepang sedang dalam proses menguasai seluruh pasar AS; (6) dunia bisnis AS harus meletakkan dasar perekonomian yang kuat di ASEAN; (7) negara-negara ASEAN tidak takut berbisnis dengan AS; (8) negara-negara ASEAN menerima kehadiran warga AS untuk memperluas skala bisnis di ASEAN; (9) kesempatan bisnis bagi AS antara lain di bidang eksplorasi minyak dan gas; (10) Indonesia tidak menyertuji 15 kontrak tambang bagi pengusaha AS; (11) pertumbuhan infrastruktur ASEAN, kecuali Singapura, sangat ketinggalan dari pertumbuhan ekonominya; (12) pengembangan usaha bisnis di ASEAN tidak mudah; (13) untuk mengembangkan kegiatan bisnis di AS, dunia usaha tidak bisa mengandungkan pada koneksi pemerintah; (14) AS tidak bisa lagi mempertahankan pasar dalam negerinya karena telah dikuasai pengusaha asing; (15) dunia usaha AS harus mempertahankan pasar ASEAN yang berpenduduk 320 juta dan menampung US\$20 miliar impor AS selama tahun 1990 (*Kompas*, 13-6-1991).

Pertemuan ASEAN-AS ke-10 berlangsung di Washington tanggal 20-21 Juni 1991, untuk membahas masalah ekonomi, perdagangan, investasi serta beberapa perbedaan persepsi antara ASEAN dan AS.

Dirjen Bidang Politik Luar Negeri AS, Robert Kimmit, mengatakan: (1) hubungan ekonomi antara ASEAN dan AS meningkat; (2) perdagangan Indonesia-AS lebih besar jika dibandingkan dengan perdagangan AS-Eropa Timur; (3) perdagangan Malaysia-AS lebih besar jika dibandingkan dengan perdagangan AS-Soviet; (4) stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara selama 20 tahun terakhir ini mantap.

Dubes Muangthai untuk AS, Vitthaya Vejjajiva, mengatakan: (1) hubungan perdagangan dan ekonomi ASEAN-AS meningkat; (2) penduduk ASEAN yang

berjumlah 320 juta merupakan pasar yang potensial; (3) proyek-proyek pembangunan prasarana di sektor swasta dan pemerintah di kawasan ASEAN menarik minat para pengusaha AS; (4) ASEAN melihat AS sebagai sumber pasar modal dan teknologi; (5) pertemuan ASEAN-AS diharapkan dapat meningkatkan kerjasama berbagai bidang di masa mendatang.

Dubes RI untuk AS, AR Ramly, mengatakan: (1) pertemuan ASEAN-AS mempunyai arti penting; (2) pertemuan tersebut merupakan ajang pertukaran informasi serta pemecahan masalah yang bersifat internasional maupun regional; (3) pertemuan ASEAN-AS sekarang ini juga merupakan persiapan pertemuan tingkat menteri antara ASEAN-AS yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Juli 1991; (4) pertemuan ASEAN-AS sekarang ini merupakan pertemuan tingkat Dirjen, guna mempersiapkan post ministerial meeting ASEAN-AS (*Suara Pembaruan*, 21-6-1991).

Dalam pertemuan itu pihak ASEAN: (1) mendorong AS untuk menanggalkan kebijakan sepihak dalam hubungan dagang yang dinilai bertentangan dengan prinsip GATT; (2) menegaskan bahwa Undang-undang Anti Dumping seksi 301 Omnibus Trade Act 1988, dan beberapa peraturan dagang AS lainnya bertentangan dengan prinsip GATT yang berusaha meluaskan perdagangan dunia tanpa hambatan dan dapat disalahgunakan oleh kepentingan tertentu; (3) menyatakan bahwa Undang-undang Anti Dumping telah digunakan pihak tertentu di AS dengan berbagai petisi atas dasar tuduhan-tuduhan bahwa negara-negara ASEAN melakukan politik dumping untuk melawan produk serupa AS; (4) menilai bahwa seksi 301 Omnibus Trade act 1988 di samping mengharuskan pemerintah AS untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara yang dianggap menjalankan politik dagang tidak adil juga dapat menghancurkan GATT; (5) menghendaki agar isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak intelektual dan hak cipta diselesaikan dalam sistem konsultasi di bawah GATT, bukan lewat tindakan sepihak; (6) prihatin atas kebijakan dagang akhir-akhir ini, terutama masalah hubungan dagang yang dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hendaknya ditujukan pada sumber masalahnya bukan pada kegiatan dagang; (7) prihatin terhadap gagasan pembentukan persetujuan dagang bebas Amerika Utara (*North America Free Trade Agreement - NAFTA*) yang mencakup AS, Kanada dan Meksiko. Masuknya Meksiko ke dalam persetujuan itu dapat mengalihkan modal AS dan Kanada dari ASEAN ke

Meksiko yang upah buruhnya murah dan sumber lainnya melimpah.

Pihak AS menyatakan: (1) dalam masalah perdagangan dan investasi, ASEAN dan AS melancarkan suatu strategi promosi bersama; (2) ASEAN telah menikmati US\$8 miliar perdagangannya dengan AS; (3) AS akan mengurangi laju perdagangannya dengan ASEAN jika ASEAN terus menikmati surplus besar dan mempertahankan penghalang atas produk dan jasa AS yang kompetitif masuk ASEAN; (4) mendesak ASEAN untuk menghilangkan batasan jumlah saham dan peraturan pajak berganda yang boleh dimiliki perusahaan AS di bidang investasi; (5) mendesak ASEAN untuk memberikan perhatian atas perlindungan hak-hak intelektual, merk dagang dan hak paten (*Angkatan Bersenjata*, 22-6-1991).

Pernyataan bersama mengatakan: (1) setuju untuk mengambil sikap keras dalam masalah perdagangan hasil pertanian pada Putaran Uruguay guna negosiasi dagang multilateral; (2) sepakat bahwa kemajuan ekonomi akan tergantung pada sebuah sistem perdagangan multilateral yang kuat; (3) menghendaki dicapainya kesepakatan akhir dari Putaran Uruguay; (4) setuju dicapainya sebuah paket hasil yang berimbang, berarti dan bermanfaat bagi semua negara tentang sistem perdagangan hasil pertanian yang masih menjadi masalah dengan pihak Eropa; (5) sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan narkotika dan perlindungan lingkungan hidup; (6) sepakat menegaskan kembali dukungannya atas upaya kedua ketua bersama Konferensi Paris tentang Kamboja, yaitu Menlu Indonesia dan Menlu Perancis, guna memulihkan kemerdekaan dan perdamaian di Kamboja berdasarkan kerangka kerja PBB (*Antara*, 23-6-1991).

Richard Solomon mengatakan: (1) perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan bukan untuk membuat hambatan-hambatan tarif baru bagi pihak luar, tetapi dimaksudkan sebagai wahana untuk mendinamisasi pasar; (2) bagi ASEAN, AS adalah pasar eksport terbesar dan mitra dagang nomor dua terbesar setelah Jepang. ASEAN bagi AS merupakan rekan dagang terbesar kelima; (3) tahun 1980 nilai perdagangan ASEAN-AS mencapai US\$23 miliar, sedangkan tahun 1990 meningkat hampir dua kali lipat mencapai US\$44 miliar (*Antara*, 23-6-1991).

B. HUBUNGAN ASEAN-KANADA

Direktur CANASEAN (Program Kanada dan ASEAN) Edwin Wong mengatakan di Vancouver tanggal 14 Juni 1991 bahwa: (1) pendekatan antara ASEAN dan Kanada di bidang perdagangan belum mengalami perkembangan yang cukup berarti; (2) ia merencanakan suatu forum khusus yang dapat mempertemukan kepentingan dunia usaha ASEAN dengan Kanada; (3) melalui program CANASEAN, masyarakat bisnis kedua pihak diharapkan dapat memahami budaya masing-masing, dengan demikian pendekatan hubungan bisnis dapat dilakukan lebih berhasil. Mekanismenya adalah dengan mempertemukan pengusaha, manajer dan pejabat pemerintah kedua negara melalui seminar, lokakarya, kunjungan ke berbagai perusahaan serta observasi lapangan; (4) program CANASEAN yang dimulai sejak tahun 1989 dilaksanakan dengan melibatkan fasilitator ahli, pengusaha dan pejabat pemerintah serta partisipan; (5) program CANASEAN dirancang agar kalangan pengusaha kedua negara dapat menemukan mitra yang cocok dan dapat memelihara hubungan kerja yang baik; (6) sponsor program CANASEAN adalah Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA) dan Kementerian Penduduk Provinsi British Columbia Kanada; (7) tahun 1988 nilai perdagangan ASEAN-Kanada relatif kecil, mencapai US\$2,64 miliar; (8) pihak-pihak yang terkait di kedua negara agar mendukung program CANASEAN (*Bisnis Indonesia*, 15-6-1991).

C. HUBUNGAN ASEAN-MEE

Forum Panel Global 1991 yang diprakarsai oleh The European Center berlangsung di Amsterdam tanggal 8-10 April 1991, dihadiri oleh Presiden Turki, Turgut Ozal, Wapres Komisi Eropa, Frans Andriessen, Menlu Belanda, Hans van den Broek, Mantan Kanselir Jerman Barat, Helmut Schmit, Ketua Partai Buruh Israel, Shimon Peres dan Mantan Menlu AS, Henry Kissinger serta pimpinan bisnis, politik dan pers dari berbagai negara.

Dirjen Badan Ekonomi dan Pembangunan Filipina (NEDA), Cayetano W. Paderanga Jr., mengatakan: (1) mengalirnya investasi asing ke kawasan Asia Tenggara menguntungkan negara-negara ASEAN; (2) masuknya modal dan teknologi asing yang terus meningkat menimbulkan ekonomi negara-negara ASEAN; (3) apabila kecenderungan arus investasi terus meningkat,

ASEAN akan menjadi fokus investasi asing dalam dasawarsa 1990-an; (4) laporan IMF tahun 1991 tentang Produk Domestik Bruto (GDP) negara-negara berkembang di Asia meningkat menjadi 5,5%; (5) berakhirnya Perang Teluk memberi peluang bagi meningkatnya pertumbuhan GDP di kawasan Asia Tenggara; (6) evolusi dalam industri-industri khusus yang padat karya di negara-negara ASEAN, kecuali Singapura, banyak menarik minat negara-negara maju untuk menanam modalnya di bidang industri; (7) negara-negara ASEAN terus berupaya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan; (8) ASEAN khawatir tentang berlakunya Pasar Tunggal Eropa 1992. Pasar Tunggal Eropa hanya akan meningkatkan perdagangan antar negara ME, bukan menciptakan peluang bagi pihak ketiga; (9) ASEAN khawatir tentang standarisasi teknis apabila hal itu digunakan oleh ME sebagai bentuk hambatan non-tarif; (10) ASEAN khawatir tentang standar yang dipakai untuk menentukan margin anti dumping sementara, yang didasarkan atas kebijakan yang diberlakukan di negara-negara maju, yang akan mengakibatkan produk-produk ASEAN mengalami kesulitan memasuki pasar ME; (11) hasil perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay bulan Desember 1990 tampaknya memperkuat ketakutan ASEAN tentang kemungkinan proteksionis Eropa pasca 1992; (12) ASEAN mengharapkan suatu perbaikan dalam akses pasar bagi produk-produk pertanian atas kegagalan ME melakukan reformasi kebijakan umum tentang pertanian (CAP) (*Antara*, 10-4-1991).

Menristek BJ Habibie mengatakan: (1) perkembangan dan pertumbuhan di Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya pada dasawarsa 1990-an meningkat; (2) masih terdapat kesenjangan pendapatan yang menyolok antara negara-negara ASEAN dan ME; (3) total produksi nasional bruto (GNP) ASEAN tahun 1988 mencapai US\$232.855 atau 5,29% dari jumlah keseluruhan GNP ke-12 negara ME tahun 1988; (4) produk dan pendapatan total rata-rata per kapita ASEAN sekarang masih kecil jika dibandingkan dengan produk dan pendapatan ME; (5) ASEAN harus meningkatkan perhatian pada pembangunan prasarana ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar (*Kompas*, 10-4-1991); (6) investasi untuk membangun prasarana ekonomi dan penyediaan kebutuhan pokok di negara ASEAN harus dipenuhi, baik dengan modal dalam negeri ASEAN maupun dari luar ASEAN; (7) jumlah pendudukan Indonesia yang mencapai 56,5% dari total penduduk ASEAN dan lebih dari 40% dari jumlah penduduk Asia Tenggara merupakan segmen terbesar dari pasar Asia

Tenggara; (8) stabilitas politik Indonesia sangat penting bagi pasar Asia Tenggara (*Merdeka*, 10-4-1991); (9) ia mengundang dunia usaha Belanda untuk berperan dalam pembangunan industri di Indonesia melalui penanaman modal dan bantuan keahlian. Pembangunan industri itu meliputi industri pesawat terbang, kapal dan telekomunikasi (*Bisnis Indonesia*, 10-4-1991).

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ME berlangsung di Luxemburg tanggal 31 Mei 1991 dihadiri oleh para Menlu dari negara-negara ASEAN dan ME untuk memperbarui perjanjian kerjasama antara kedua kelompok regional tersebut.

Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) dalam pembaruan kerjasama ASEAN-ME, ASEAN akan mengutamakan peningkatan kerjasama industri dan alih teknologi modern; (2) sejak tahun 1980 negara-negara ASEAN dan ME secara teratur mengadakan pertemuan dalam rangka mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan; (3) pertemuan akan membahas langkah-langkah kerjasama menghadapi perubahan-perubahan dunia; (4) pola kerjasama ASEAN-ME perlu diubah ke arah pengembangan kerjasama yang lebih adil dan seimbang yang mencerminkan kepentingan dasar dan kedudukan kedua belah pihak; (5) perkembangan dan pertumbuhan negara ASEAN meningkat dan stabil; (6) negara-negara ASEAN berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, rata-rata 7% per tahun dibandingkan negara-negara Eropa yang hanya 2-3% per tahun (*Antara*, 31-5-1991); (7) negara-negara ASEAN tidak ingin menjadi kelompok yang selalu minta bantuan saja (*Kompas*, 1-6-1991).

Komisioner ME Abel Matutes mengatakan: (1) ME menerima usulan ASEAN tentang peningkatan bantuan di bidang industri; (2) menyetujui kerjasama di bidang iptek, pendidikan dan penanaman modal untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar internasional (*Kompas*, 1-6-1991).

Menlu Luxemburg, Jacques Poos, mengatakan: (1) kebijaksanaan bantuan ekonomi ME harus dihubungkan dengan pelaksanaan hak-hak asasi dan kemajuan demokrasi di negara penerima; (2) kriteria kebijaksanaan bantuan ekonomi ME dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi dan kemajuan demokrasi di negara penerima, bukan hanya sebagai pertanyaan terhadap legitimasi, tetapi merupakan sarana terpenting dalam mencapai kemajuan ekonomi (*Kompas*, 1-6-1991).

Menlu Perancis, Roland Dumas, mengatakan: (1) hak-hak asasi, keamanan dan kerjasama ekonomi sa-

ngat diperlukan untuk mempercepat kemajuan; (2) ASEAN bukan satu-satunya kelompok yang menerima kecaman tentang masalah hak asasi manusia (*Kompas*, 1-6-1991).

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

Pertemuan lanjutan ke-2 Ketua Bersama Konperensi Paris (PICC) dengan ke-12 anggota Dewan Tertinggi Nasional Kamboja (SNC) berlangsung di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991 untuk membahas masalah demiliterisasi, pencegahan praktik genocide dan masalah hubungan pemerintahan interim PBB dengan SNC.

PM Kamboja dukungan Hanoi, Hun Sen, mengatakan: (1) perlu dibentuk badan semacam pengadilan (tribunal) bagi mereka yang bertanggung jawab atas terbunuhnya kurang lebih sejuta penduduk Kamboja pada akhir tahun 1970; (2) konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan nasional tidak menyatakan bahwa seorang kepala negara atau kepala pemerintahan akan dikecualikan dari kewajiban untuk bertanggung jawab. Pernyataan ini bukan untuk mewakili pihak pengadilan tetapi merupakan usul pentingnya suatu proses pengadilan bagi kejahatan Khmer Merah (*Antara*, 2-6-1991).

Pemimpin kelompok nasionalis KPNLF Son Sann mengatakan: (1) rencana perdamaian lima pasal kelima anggota tetap DK-PBB sudah diterima oleh keempat faksi yang berselisih di Kamboja, yaitu KPNLF, Sihanoukist, Khmer Merah dan pemerintah Phnom Penh pada pertemuan 10 September 1990; (2) kelima pasal itu menyangkut pemerintahan sementara sebelum pemilu yang bebas, pengaturan militer dalam masa transisi, pemilu di bawah pengawasan PBB, perlindungan hak asasi manusia dan jaminan internasional atas kemerdekaan dan netralitas Kamboja; (3) jika pasukan dan orang-orang Vietnam ditarik dari Kamboja, pemimpin Khmer Merah, Pol Pot, dan pengikutnya tidak akan punya dalih apa pun untuk kembali berkuasa (*Antara*, 1-6-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) Indonesia dan Perancis selaku ketua bersama PICC akan menyelesaikan masalah Kamboja secara menyeluruh; (2) para Menlu Eropa menerima baik penjelasan ketua bersama PICC tentang perdamaian Kamboja; (3) pertemuan ke-2 PICC dengan SNC merupakan kelanjutan dari per-

temuan pertama di Paris bulan Desember 1990; (4) keseluruhan rancangan persetujuan tentang penyelesaian masalah Kamboja telah dibicarakan di pertemuan Luxemburg tanggal 31 Mei 1991 dan telah dikeluarkan suatu komunike bersama yang menyatakan adanya kesepakatan antara semua anggota SNC tentang isu fundamental; (5) fokus pertemuan itu yaitu adalah masalah demiliterisasi, pencegahan praktik genocide dan masalah hubungan pemerintahan interim PBB dengan SNC; (6) masalah penyelesaian Kamboja bukan untuk kepentingan rakyat Kamboja sendiri tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis dan kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara (*Antara*, 2-6-1991).

PM Kamboja dukungan Hanoi, Hun Sen, mengatakan: (1) jika persetujuan mengenai Sihanouk menjadi pemimpin SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya, maka komposisi SNC adalah tujuh wakil dari pihak tiga pemerintah Phnom Penh dan tujuh wakil dari pihak tiga koalisi CGDK; (2) kesepakatan itu belum diterima oleh Khmer Merah.

Pangeran Sihanouk mengatakan: (1) ia bersedia menjadi Ketua SNC jika ketua bersama PICC, Hun Sen dan pihak-pihak lain setuju; (2) jika ia berhalangan, ia akan menunjuk seorang wakil yang bersama Hun Sen akan bertindak sebagai wakil ketua bersama SNC secara temporer; (3) kedua wakil bersama PICC dapat bertindak sebagai Ketua SNC (*Antara*, 3-6-1991).

Dalam pertemuan konsultatif PICC dengan SNC, PM Hun Sen mengusulkan agar dalam naskah 26 November 1990 tentang penggunaan istilah kebijakan dan praktik di masa lampau diganti dengan istilah genocide (*Kompas*, 4-6-1991).

Pertemuan ke-2 PICC dengan SNC berakhir dengan mencatat perkembangan penting terutama yang menyangkut isu mekanisme kepemimpinan Dewan yang mewakili kedaulatan rakyat Kamboja.

Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) isu mekanisme kepemimpinan SNC dapat diselesaikan berkat adanya kesepakatan atas penunjukkan Sihanouk sebagai ketua SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya; (2) dipilihnya Sihanouk sebagai ketua SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya bukan merupakan suatu hal yang baru; (3) persetujuan yang memungkinkan Sihanouk menunjuk penggantinya jika ia sakit atau berhalangan yang bersama dengan Hun Sen akan menjadi wakil ketua bersama dan bertindak sebagai ketua secara bergantian adalah merupakan perkembangan baru; (4) mekanisme itu dapat menghilangkan kekhawatiran pihak-pihak

tertentu mengenai keinginan Hun Sen untuk mengambil alih kursi ketua SNC apabila terjadi sesuatu pada Sihanouk; (5) diharapkan agar pelantikan ketua dan wakil ketua SNC terlaksana dan SNC dapat segera berfungsi sehingga dapat menyumbang upaya pencapaian perdamaian di Kamboja; (6) gencatan senjata agar dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja; (7) waktu bagi penyelesaian masalah Kamboja hampir habis, artinya rakyat Kamboja tidak dapat secara terus-menerus menderita karena perang; (8) para Menlu negara-negara yang terlibat dalam penyelesaian masalah Kamboja yang telah berlangsung selama 12 tahun akan menemui kesulitan bila terus mengadakan pertemuan. (*Antara*, 5-6-1991).

PM Hun Sen mengatakan: (1) sidang berakhir dengan mencatat beberapa kemajuan penting dan bukan suatu kegagalan; (2) ia menolak bahwa faksinya tidak dapat menerima rancangan penyelesaian konflik oleh lima anggota tetap DK-PBB; (3) kesepakatan tentang mekanisme kepemimpinan SNC merupakan hal yang penting sebab Dewan ini merupakan jantung bagi penyelesaian masalah Kamboja; (4) mekanisme kepemimpinan SNC tidak dapat dipisahkan dari rancangan perdamaian lima anggota tetap DK-PBB; (5) ia mengusulkan perubahan hal-hal yang menyangkut upaya pencegahan terulangnya praktik pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja (*Antara*, 5-6-1991); (6) ia dan Sihanouk sepakat untuk menghentikan bantuan militer dari luar negeri guna mengakhiri konflik Kamboja; (7) ia mengusulkan agar hak veto Khmer Merah atas berbagai usulan perdamaian dicabut, sebab hak veto hanya menghambat proses penyelesaian konflik Kamboja; (8) ia mendesak agar SNC segera berfungsi; (9) tanpa Khmer Merah SNC tetap dapat berjalan (*Merdeka*, 5-6-1991).

Pemimpin Khmer Merah Khiem Samphan mengatakan: (1) pihak Khmer Merah telah menerima gencatan senjata yang dimulai sejak awal Mei 1991; (2) ia mendesak pemerintah Phnom Penh untuk menerima usulan perdamaian PBB; (3) ia keberatan atas usul mekanisme baru yang menyangkut keinginan Hun Sen menjadi wakil ketua SNC, karena pada waktu pembentukan SNC di Jakarta bulan September 1990 tidak ada menyebutkan tentang wakil ketua SNC; (4) ia menginginkan penempatan Badan Pemerintahan Peralihan PBB (UNTAC) di Kamboja dan pasukan pengawas perdamaian PBB untuk mengawasi segala aspek dalam pencarian penyelesaian politik secara menyeluruh dan pengaturan pemilu yang bebas (*Antara*, 5-6-1991).

Menteri Muda Luar Negeri Perancis, Alain Vivien, mengatakan ada tiga kesimpulan dari sidang PICC dengan SNC, yaitu: (1) masalah teknis dari perbedaan soal interpretasi diharapkan dapat diselesaikan; (2) ke-

sepakatan Sihanouk-Hun Sen merupakan peristiwa penting sehingga dapat mendorong ke arah penyelesaian masalah Kamboja; (3) perlu dicapai syarat-syarat perundingan guna menghindari polemik (*Kompas*, 5-6-1991).

Para Penulis

- **BANDORO**, Bantarto,
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **KARTASASMITA**, Sabana,
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di Jakarta; kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Ekonomi, Vrye Universitas di Amsterdam dan menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi, Universitas Ekonomi dan Sosial di Keulen (Jerman Barat). Memperoleh gelar Doktor Ekonomi pada Universitas di Keulen tahun 1961. Adalah mantan Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan Perusahaan Tambang Timah; dan mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI. Jabatan sekarang Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, di samping sebagai "pembina Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan" (Jawa Barat).
- **NANGOI**, Ronald,
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atma-Jaya, Jakarta (1981) dan MBA dari Institut Manajemen Prasetiya Mulya (IMPM) Jakarta (1985). Sejak 1978 menjadi Staf CSIS, sekarang mengamati masalah-masalah ekonomi dan bisnis internasional. Sejak 1989 menjabat Wakil Sekretaris *Indonesian National Committee for Pacific Economic Cooperation* (INCPEC).
- **PRASETYONO**, Edy,
Sarjana Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (1989). Sejak Maret 1990, staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah Indocina.
- **SUKMA**, Rizal,
Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (1989); sejak Juni 1990, Staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah RRC dan Asia Timur.
- **WANANDI**, Jusuf,
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta (1960). Pada tahun 1964 menjadi dosen di fakultas dan universitas yang sama. Tahun 1977: Congressional Fellow yang disponsori oleh American Political Science Association (APSA). Kini Ketua Dewan Penyantun dan Anggota Dewan Direktur CSIS; Anggota, Board of Governors, East-West Center, Honolulu; Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi Pasifik.

atatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:
Biro Pemasaran
Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 356532-5

an-
tau

daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.